



LAPORAN KINERJA

Pemerintah Provinsi Jambi

TAHUN 2023



JAMBI MANTAP
2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamualaikum wr. wb.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2023 dalam rangka perwujudan visi Provinsi Jambi yaitu 'Jambi MANTAP, Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT. LKjIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan *progress* pembangunan Provinsi Jambi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.



LKjIP Tahun 2023 ini, menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja berikut efisiensi penggunaan anggaran. Alhamdulillah, secara umum, rata-rata target kinerja mencapai **100,30%**. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi yang ingin dicapai melalui penetapan sasaran strategis secara umum dapat terpenuhi sesuai harapan.

Semoga penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja pembangunan Provinsi Jambi di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih.

Wassamulaikum wr. wb.

Jambi, Maret 2024

GUBERNUR JAMBI,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen. M.T. Haryono No. 02 Telanaipura Jambi - 36122
Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Jambi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jambi, 4 Maret 2024



INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAMBI,

H.AGUS HERIANTO,SH, QGIA, CGCAE, QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Diagram	v
Daftar Tabel	vi
BAB I Pendahuluan	1
I Latar Belakang	1
II Maksud dan Tujuan	2
III Gambaran Umum Organisasi	3
3.1. Kondisi Geografis Daerah	3
3.1.1. Letak Wilayah dan Topografi	3
3.1.2. Potensi Wilayah	4
3.2. Luas dan Batas Wilayah	5
3.2.1. Aspek Demografi	6
3.3. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi	6
3.4. Data Kepegawaian	7
IV Permasalahan dan Isu Strategis	8
4.1. Permasalahan Pembangunan	8
BAB II Perencanaan Kinerja	14
BAB III Akuntabilitas Kinerja	19
BAB IV Penutup	108
Lampiran	vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Provinsi Jambi	3
Gambar 1.2. Obyek Wisata Gunung Kerinci dan Taman Nasional Berbak	4
Gambar 1.3. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi tahun 1990 – 2018 (GGP, 2019)	11
Gambar 2.1. Logika Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jambi	15
Gambar 3.1. Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	22
Gambar 3.2. Capaian RB General dan RB Tematik	23
Gambar 3.3. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)	43
Gambar 3.4. IPM Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2023	100

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2021-2023	28
Grafik 3.2.	Trend Perkembangan Indesk Kearsipan Tahun 2000-2023	30
Grafik 3.3.	Perkembangan Capaian Akses Terhadap Air Minum Layak Provinsi Jambi	57
Grafik 3.4.	Trend Peningkatan Internet Desa	60
Grafik 3.5.	Trend Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	71
Grafik 3.6.	Peningkatan Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA	71
Grafik 3.7.	Luas Izin Perhutanan Sosial yang Dikelola Masyarakat	72
Grafik 3.8.	Persentase Luas Tanam Lahan Kritis 207-2023	72
Grafik 3.9.	Trend Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2023	79
Grafik 3.10.	Ketersediaan Protein (Ketahanan Pangan)	83
Grafik 3.11.	Umur Harapan Hidup Saat Lahir 2020-2023	99
Grafik 3.12.	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	99
Grafik 3.13.	Pengeluaran Riil PerKapita yang Disesuaikan	99
Grafik 3.14.	Perkembangan IDG	109
Grafik 3.15.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (IPG)	110

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1. Capaian Nilai Variabel Kematangan Perangkat Daerah	25
Diagram 3.2. Capaian Nilai SAKIP per Komponen	28
Diagram 3.3. Nilai Rata-Rata IKM	36
Diagram 3.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2023	48
Diagram 3.5. Capaian Kinerja IKLH	61
Diagram 3.6. Indeks Kualitas Udara	63
Diagram 3.7. IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD 2023	66
Diagram 3.8. Perbandingan Target IKAL dengan RPJMD	67
Diagram 3.9. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan	77
Diagram 3.10. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	78
Diagram 3.11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2023	79
Diagram 3.12. Skor PPH Tahun 2023	83
Diagram 3.13. Ketersediaan Energi 2023 KKal/Kap/Hr	83
Diagram 3.14. IPM 2020-2023	98
Diagram 3.15. IPM Menurut Kabupaten/Kota	101
Diagram 3.16. Capaian dan Pertumbuhan UHH Kabupaten/Kota	103
Diagram 3.17. Capaian dan Pertumbuhan Rata-Rata RLS 2023	104
Diagram 3.18. Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran PerKapita 2023	105
Diagram 3.19. Trend Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Jambi	109
Diagram 3.20. Persentase Penduduk 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah	112
Diagram 3.21. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keAtas Memperoleh Pendidikan	112
Diagram 3.22. Persentase Penduduk yang Mengakses Komputer Menurut Jenis Kelamin	113
Diagram 3.23. Persentase Penduduk yang Mengakses Internet	113
Diagram 3.24. Persentase Penduduk 15 Tahun keAtas yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	114
Diagram 3.25. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin	114
Diagram 3.26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur	115
Diagram 3.27. Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin	116
Diagram 3.28. Rasio Penduduk 15 Tahun keAtas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk ...	116
Diagram 3.29. Rasio Penduduk 15 Tahun keAtas yang Bekerja Terhadap Penduduk Berusia 15 Tahun keAtas	117
Diagram 3.30. Persentase Pekerja Berstatus Kawin	118
Diagram 3.31. Persentase Pekerja Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Sebagai Kepala Rumah Tangga	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Provinsi Jambi	5
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023	17
Tabel 2.2. Rencana Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023	18
Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja	20
Tabel 3.2. Data Capaian Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 3.3.	
Tabel 3.3. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2023	35
Tabel 3.4. PDRB Atas Harga Berlaku dan Harga Konstan	45
Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB	45
Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi d Sumatera ...	46
Tabel 3.7. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera	49
Tabel 3.8. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan	49
Tabel 3.9. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan Beserta Kontribusinya	50
Tabel 3.10. Garis Kemiskinan PerKapita Rumah Tangga Miskin	50
Tabel 3.11. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Pelarahan Kemiskinan (P2)	50
Tabel 3.12. Persentase Rumah Tangga Menurut Kab/Kota, Sumber Air Bersih, Akses Air Bersih ...	57
Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak	58
Tabel 3.14. Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Batang Hari	65
Tabel 3.15. Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Pangabuan	65
Tabel 3.16. Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Lintas	65
Tabel 3.17. Capaian Kinerja IKEG 2021-2023	68
Tabel 3.18. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja	76
Tabel 3.19. Karakteristik Pengangguran 2023	78
Tabel 3.20. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kab/Kota	80
Tabel 3.21. Cadangan Beras Provinsi Jambi Tahun 2023	83
Tabel 3.22. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Dimensi	98
Tabel 3.23. IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota 2020-2023	101
Tabel 3.24. Tingkat Efisiensi Anggaran Per Sasaran	122

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi Pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai gambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggung-jawaban Pemerintah Provinsi Jambi kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023. Adapun tujuan dari penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2023, menggambarkan upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.



Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H
Gubernur Jambi

Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I
Wakil Gubernur Jambi

III. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

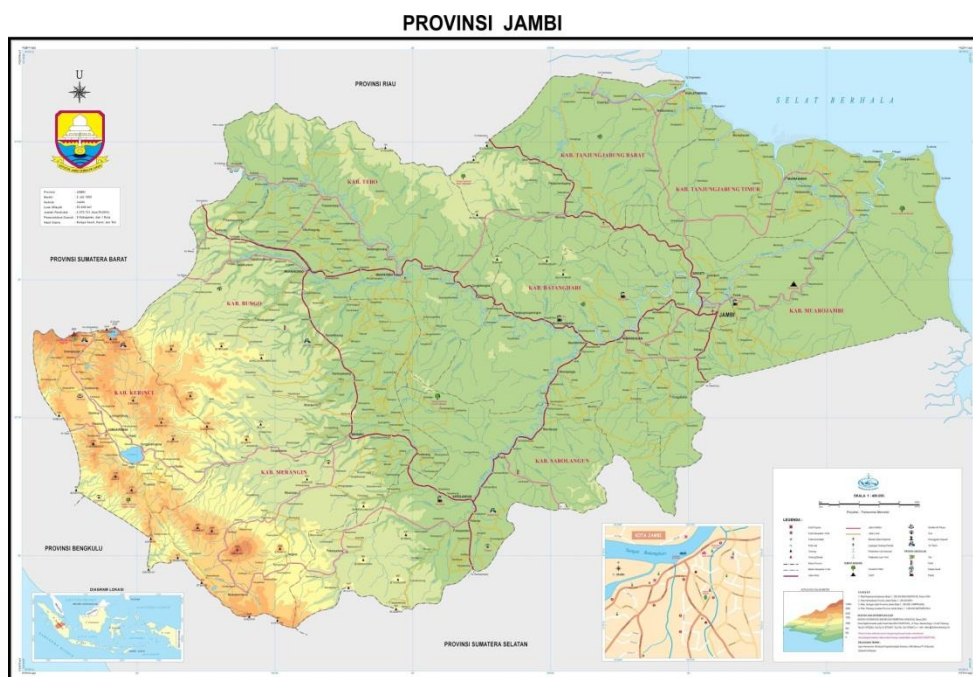
3.1. Kondisi Geografis Daerah

3.1.1. Letak Wilayah dan Topografi

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0°45' sampai 2°45' lintang selatan dan antara 101°10' sampai 104°55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.

Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle).

Gambar 1.1. Peta Provinsi Jambi



Luas Wilayah Provinsi Jambi sebesar 53.435 Km² dengan luas daratan 50.160,05 KM² dan luas perairan sebesar 3.274,95 KM² terdiri dari :

1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 KM² (6,69%)
2. Kabupaten Merangin 7.679 KM² (15,31%)
3. Kabupaten Sarolangun 6.184 KM² (12,33%)
4. Kabupaten Batanghari 5.804 KM² (11,57%)
5. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 KM² (10,62%)
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.445 KM² (10,86%)
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4.649,85 KM² (9,27%)
8. Kabupaten Tebo 6.461 KM² (12,88%)
9. Kabupaten Bungo 4.659 KM² (9,29%)

10. Kota Jambi 205,43 KM² (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 KM² (0,78%)

3.1.2. Potensi Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- a. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan)
- b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Gambar 1.2. Obyek Wisata Gunung Kerinci dan Taman Nasional Berbak



Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang merupakan wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi. Adapun kawasan-kawasan strategis yang berada di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
2. Kawasan strategis Metropolitan Jambi dan sekitarnya.
3. Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.
4. Kawasan strategis Bungo - Tebo
5. Kawasan strategis Merangin - Sarolangun
6. Kawasan strategis Sungai Penuh dan sekitarnya

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci. Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Lindung

112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berpotensi terhadap bencana Geologi yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasen, longsor, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan dengan wilayah terjadinya kebakaran yang berada pada Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

3.2. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435,92 km yang terdiri dari daratan seluas 48.989,98 km² dan lautan 4.445,94 km² dengan panjang garis pantai 223,025 km. Wilayah daratan terluas di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin seluas 7.508 km² atau 15,31 % dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing seluas 6.205 km² dan 5.948 km², sedangkan rincian luas perkabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kerinci	3.334,99	18	287
2	Merangin	7.508,23	24	215
3	Sarolangun	5.948,73	10	158
4	Bungo	4.673,16	17	153
5	Tebo	6.205,81	12	112
6	Batanghari	5.536,86	8	124
7	Muaro Jambi	5.321,67	11	155
8	Tanjung Jabung Barat	Darat 4.990,95	13	134
		Laut 384,21		
9	Tanjung Jabung Timur	Darat 4.943,36	11	93
		Laut 4.061,73		
10	Kota Sungai Penuh	353,76	8	69
11	Kota Jambi	172,26	11	62
Luas Daratan		48.989,98		
Luas Lautan		4.445,94		
Total		53.435,92	143	1.562

Sumber : Jambi Dalam Angka 2023, 2023

Jumlah kecamatan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 143 kecamatan, dengan kabupaten dengan jumlah kecamatan terbesar adalah kabupaten Merangin yaitu sebanyak 24 kecamatan, diikuti oleh Kabupaten Kerinci pada urutan kedua dengan jumlah kecamatan sebanyak 18 kecamatan. Sementara jumlah desa kelurahan adalah sebanyak 1.562 desa/kelurahan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci sebanyak 287 desa/kelurahan.

3.2.1. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Semester I Tahun 2022 yang dirilis oleh BPS adalah sebanyak 3.642.763 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 66,5 jiwa/km dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 2.961 jiwa/km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 257 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2010-2022 adalah sebesar 1,38 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 1,86 persen dan terendah di Kabupaten Merangin sebesar 0,54 persen.

3.3. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

Struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan merupakan struktur yang telah dikondisikan sesuai amanat Presiden tentang penyederhanaan birokrasi. Secara total, jumlah perangkat daerah terdiri dari 22 Dinas Daerah, 8 Badan Teknis, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Inspektorat Provinsi.

Nomenklatur Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas ;
 1. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi
 2. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
 4. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
 5. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi
 6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
 7. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
 8. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
 9. Biro Umum Setda Provinsi Jambi
- b. Sekretariat DPRD Provinsi
- c. Inspektorat Daerah Provinsi
- d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
 2. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
 3. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
 4. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jambi
 5. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi
 6. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jambi
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
 8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi

9. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
 10. Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
 11. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
 12. Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
 13. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jambi
 15. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
 16. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi
 17. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
 18. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
 19. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
 20. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
 21. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi
 22. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
- e. Badan Daerah Provinsi, terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
 2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
 4. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 6. Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
 7. Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

3.4. Data Kepegawaian

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi per Desember 2023 pegawai Pemerintah Provinsi Jambi berjumlah 9.979 orang. Secara komposisi, jumlah tersebut didominasi oleh generasi X dengan rentang usia 41-55 tahun yaitu sebanyak 63,04% sementara generasi Z merupakan komposisi paling minor yaitu sebanyak 0,85%. Kondisi ini bermakna bahwa Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan perubahan mindset dan cultural set organisasi untuk mendukung pemberian pelayanan publik secara lebih adaptif. Terutama mengingat mayoritas penerima layanan yang merupakan generasi milenial dan generasi Z yang secara karakteristik cenderung lebih terbuka dan berorientasi teknologi informasi. Perubahan pun penting dalam mendukung perwujudan Pemerintah Provinsi Jambi yang agile untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir ini, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

4.1.1. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan permasalahan pembangunan yang mengemuka maka saat ini masih terdapat masalah yang dihadapi oleh Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bagian berikut memaparkan beberapa indikasi permasalahan ini, yaitu :

1. Belum diterapkannya prinsip aturan hukum dengan baik. Pemerintah belum menjamin kepastian tegaknya hukum terhadap beberapa hal yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hingga kini masih berlangsung aktivitas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti perambahan kawasan hutan, pembakaran hutan dan lahan untuk kepentingan budidaya pertanian dan aktivitas penambangan ilegal.
2. Prinsip daya tanggap yang baik terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi. Daya tanggap yang dibutuhkan adalah terkait dengan :
 - a. Tata guna lahan (*land use planning*), yaitu struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah dan pemeliharannya (UUPA No.5 tahun 1960). Pemerintah Provinsi Jambi perlu menanggapi dengan cepat masalah ini dikarenakan basis

perekonomian wilayahnya terletak pada sektor-sektor yang memanfaatkan sumber daya lahan (pertanian, kehutanan dan pertambangan) serta masih tingginya konflik lahan. Dikhawatirkan jika tidak ditangani dengan segera akan mengakibatkan situasi yang kontra produktif bagi para pelaku usaha serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat pada umumnya.

- b. Kapasitas fiskal dan pendanaan pembangunan, yaitu separuh anggaran Pendapatan Daerah masih bersumber dari dana perimbangan. Hal ini berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan dasar. Penggalan sumber pendanaan diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dapat mendanai pembangunan wilayah sesuai tujuan dan sasaran yang saat ini kontribusinya relatif rendah merupakan masalah dalam terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

3. Belum diterapkannya prinsip visi strategis dengan baik, terlihat dari belum dilakukannya penataan lahan dengan cepat sebagaimana yang telah dijelaskan serta masih minimnya upaya membangun iklim investasi yang mendukung penguatan infrastruktur perekonomian, khususnya investasi sektor industri pengolahan berbasis komoditas lokal dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode manakala Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi tahun 2005-2025 ditetapkan.

4.1.2. Terbatasnya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Perekonomian

Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Provinsi Jambi pada tahun 2020, juga dialami oleh Provinsi lainnya di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di Provinsi Jambi ini juga masih lebih baik dari nasional, demikian pula indeks ketimpangan pendapatan (indeks gini) masih tetap memperlihatkan tren membaik. Namun demikian

jika melihat tren lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi masih berada di bawah nasional, sehingga perlambatan ini juga perlu diintervensi dengan baik.

Permasalahan infrastruktur dasar lainnya yang masih terbatas adalah penataan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan hidup dan penegakan aturan pemanfaatan ruang. Khusus terkait pelayanan dasar, dibutuhkan tata ruang kawasan permukiman penduduk dalam rangka mitigasi bencana, khususnya bencana banjir dan longsor terkait karakter topografi dan hidrologi Provinsi Jambi. Ketersediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebagai pendorong bergeraknya sektor pertanian pangan dan pengendalian banjir juga masih terbatas, disamping peningkatan konektivitas antar daerah sebagai pembangkit aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat.

Penatagunaan lahan untuk kepastian hak pemilikan dan/atau pengelolaan lahan masih menjadi faktor yang mendorong terjadinya masalah ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Konflik perebutan hak atas pengelolaan sumber daya lahan, yang merupakan basis perekonomian wilayah, menjadi sumber konflik paling tinggi di wilayah Provinsi Jambi hingga kini.

Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan, juga masih merupakan masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi juga menjadi

masalah terkait dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fungsi infrastruktur.

Infrastruktur pembiayaan usaha, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha skala mikro dan kecil juga masih menjadi permasalahan didalam memacu laju pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini terkait dengan masalah keterbatasan infrastruktur ekonomi yang berbasis sistem sosial masyarakat, dalam bentuk kelembagaan koperasi, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan dan cakupan pelayanannya.

4.1.3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat selama periode pembangunan lima tahun terakhir, namun capaian tersebut masih dibawah nasional dan Provinsi Jambi masih menghadapi masalah rendahnya kualitas SDM. Selain itu capaian IPM juga belum merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Jambi sehingga kesenjangan masih cukup tinggi.

Pada aspek pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. RLS hingga tahun 2020 di Provinsi Jambi adalah 8,55 tahun, ini berarti rata-rata penduduk Provinsi Jambi hanya mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau kelas 2 SMP. Walaupun pada dasarnya angka ini lebih baik dari nasional, namun capaian tersebut tergolong rendah dalam mendorong daya saing sumber daya manusia. Kondisi ini berimbas pada aspek ketenagakerjaan, yaitu menyebabkan rendahnya akses masyarakat Provinsi Jambi ke lapangan usaha formal yang memiliki tingkat

pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan lapangan usaha informal.

Hingga kini, masyarakat Provinsi Jambi masih dominan bekerja sebagai pekerja informal di sektor pertanian dan jasa, dan bahkan terjadi pengangguran semu (*false unemployment*) karena berstatus sebagai tenaga kerja tidak dibayar (*unpaid labor*) pada usaha yang dimiliki oleh keluarga atau kerabat di lapangan usaha pertanian dan jasa skala mikro-kecil. Hal ini juga berhubungan dengan isu revitalisasi SMK, dimana Provinsi Jambi masih kekurangan guru produktif dan keterbatasan peralatan praktek serta guru yang memahami penggunaan peralatan praktek. Selain itu jurusan dan peluang kerja yang belum link match serta pembelajaran yang lebih banyak teori dibandingkan praktek menambah permasalahan keterampilan pada lulusannya, sehingga kurang terserap di dunia kerja.

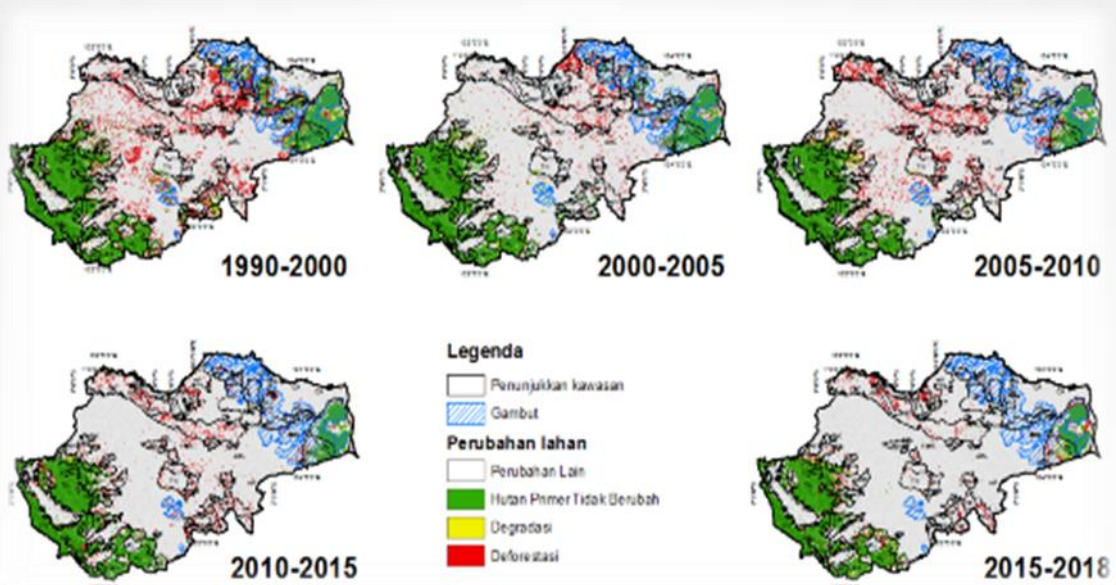
Rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat pada rendahnya akses ke lapangan usaha formal dan berpendapatan relatif tinggi, pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya keberdayaan masyarakat untuk mengakses aspek pendukung kesejahteraan lainnya dan semakin menurunkan tingkat kualitas SDM masyarakat Provinsi Jambi itu sendiri, salah satunya adalah akses kepada kesehatan. Pada usia harapan hidup, dalam 5 tahun terakhir, capaian Provinsi Jambi terlihat meningkat, namun masih dibawah nasional. Usia harapan hidup penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2016-2020 terus menunjukkan peningkatan dimana usia harapan hidup dari 70,71 tahun pada 2016 meningkat menjadi 71,16 tahun pada 2020.

4.1.4. Degradasi Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi juga masih menghadapi permasalahan di bidang lingkungan hidup. Kondisi ini nampak dari indeks kualitas lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi saat ini yang menunjukkan indeks kualitas air masih relatif rendah. Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (*water catchment area*) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan.

Masih terbatasnya infrastruktur perekonomian yaitu jalan pengangkutan/ kargo komoditas serta pelabuhan untuk distribusi hasil produksi dari wilayah Provinsi Jambi juga berakibat pada terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan bahan bakar fosil, baik langsung maupun tidak langsung, disamping menyebabkan rendahnya daya saing Provinsi Jambi dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan KLHS sektor energi Provinsi Jambi, kontributor emisi selama 2011-2017 dari pemanfaatan energi didominasi oleh kegiatan-kegiatan pada bidang industri (33%), bidang transportasi (26%) dan bidang energi (penyediaan energi dan pemanfaatan energi) sebesar 13%. Sementara emisi gas rumah kaca pada sektor limbah tahun 2020 sebesar 8.066,94 ton CO_e, (1,41%). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2018 sebesar 10.000 ton CO₂e (1,75%).

Gambar 1.3. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi tahun 1990 – 2018 (GGP, 2019)



Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Persentase penurunan emisi GRK tahun 2020 hanya 80,57% dibandingkan tahun 2019. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat emisi gas rumah kaca ini antara lain timbunan sampah domestik/industri, serta masih minimnya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan. Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kerapatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Masih adaya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang masih belum seimbang. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas jasa lingkungan yang dapat diberikan, sementara pada area kawasan budidaya masih banyak sekali area yang belum dioptimalkan fungsinya untuk berbagai penggunaan.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jambi pada periode tahun 2021-2026 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) belum optimal

Reformasi Birokrasi diperlukan untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Dengan demikian maka akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Terkait dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi, serta memperhatikan pilar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2019-2024, maka upaya reformasi birokrasi di Provinsi Jambi difokuskan untuk pencapaian beberapa hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan pendidikan
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan
 - c. Penanganan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan pemukiman tangguh bencana,
 - d. Penataan ruang yang berdasarkan potensi lokal dan daya dukung lingkungan hidup
 - e. Penatagunaan lahan dan penertiban kawasan dan lahan terlantar
 - f. Penguatan iklim investasi infrastruktur yang mendukung penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi hijau
 - g. Penertiban aktivitas yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - h. Peningkatan kemandirian keuangan daerah.
 - i. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara
 - j. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- ### 2. Daya Saing Ekonomi masih rendah sementara daya dukung lingkungan semakin menurun
- Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 diharapkan bahwa pada akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026, yang merupakan tahap keempat atau terakhir dari RPJPD Provinsi Jambi periode ini telah dicapai kondisi sebagai berikut :
- a. Terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah;
 - b. Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah
 - c. Penguatan sektor industri
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jambi tahun 2013-2033 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengarahkan rencana pengembangan struktur ruang agar terjadi konektivitas antar pusat-pusat kegiatan, mulai dari bagian barat, tengah hingga bagian timur dan berporos pada ibukota provinsi (Kota Jambi).
- Selain itu diarahkan pembangunan sarana-prasarananya sesuai dengan skala kegiatannya. Dalam peraturan tersebut juga dilakukan arahan

pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada kawasan lindung, diarahkan berbagai program yang bertujuan memantapkan fungsi kawasan, diantaranya : rehabilitasi dan konservasi lahan, pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan lindung, pemeliharaan fungsi hidrologis pada kawasan yang memberikan fungsi perlindungan pada kawasan bawahannya hingga perwujudan kawasan konservasi baru dan kawasan rawan bencana. Pada kawasan budidaya, diarahkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perekonomian Provinsi Jambi hingga kini masih ditopang oleh sektor pertanian dan ada kecenderungan mulai bergeser pada sektor non pertanian, khususnya sektor perdagangan dan jasa. Situasi ini dapat mengindikasikan bahwa sektor pertanian semakin tidak mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat, di sisi lain akses kepada pekerjaan formal di sektor-sektor non-pertanian juga terbatas terkait dengan rendahnya kualitas pendidikan SDM sebagian besar masyarakat. Untuk itu, daya saing ekonomi dan lingkungan hidup merupakan isu strategis pembangunan Provinsi Jambi dengan fokus pada :

- a. Peningkatan produktivitas lahan pertanian yang berkelanjutan.
- b. Penguatan sistem ekonomi kerakyatan juga perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi dengan anggotanya.
- c. Pembangunan infrastruktur pengangkutan komoditas hasil produksi rakyat maupun sektor lainnya (pertambangan).
- d. Pembangunan dan peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung.
- e. Pembangunan kawasan strategis ekonomi industri pengolahan berbasis komoditas sektor pertanian.
- f. Penguatan infrastruktur ekonomi digital.
- g. Penataan ruang dan tata guna tanah.
- h. Kebutuhan kejelasan alokasi lahan produktif untuk komoditas strategi yang lebih baik

3. Kualitas Sumber Daya Manusia belum baik dan merata

Rendahnya kualitas SDM hingga kini menjadi penyebab pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan sebagian penduduk di wilayah Provinsi Jambi. Pada bidang pendidikan, angka rata-rata lama sekolah yang rendah mengindikasikan tidak mampunya sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan, dan pada akhirnya memilih untuk menjadi tenaga kerja pada sektor informal dan/atau usaha-usaha yang dimiliki keluarga atau kerabat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk memperbanyak dan memperkuat institusi - institusi pendidikan menengah kejuruan yang menciptakan manusia berdaya saing untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yang saat ini mulai bergeser dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian seperti sektor perdagangan dan jasa.

Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud difokuskan melalui inovasi kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, sehingga terjadi pembangunan yang inklusif di bidang pendidikan, yaitu berupa peningkatan kerjasama dengan para pelaku usaha maupun stakeholder lainnya, sehingga lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat bekerja pada sektor-sektor formal yang mendukung terwujudnya industri hilir berbasis penguatan ekonomi kerakyatan.

Dari sisi peningkatan pelayanan kesehatan terutama difokuskan pada program-program yang dapat menekan angka kematian ibu, *stunting*, kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk merokok bagi kesehatan dan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Fasilitas-fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan puskesmas pembantu beserta tenaga medisnya difokuskan pada hal-hal tersebut.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

I. Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan merupakan tahun pertama periode Jambi MANTAP yang bermakna perkembangan pembangunan berada di awal visi misi RPJMD baru menuju pencapaian target di akhir tahun RPJMD 2026. Berbagai macam strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran terutama pada pelaksanaan program/kegiatan benar-benar selektif dilakukan.

Mengusung visi Provinsi Jambi yang tetap konsisten dalam mewujudkan 'Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT'. Inovasi dan kolaborasi menjadi metode yang esensial dalam penyelenggaraan pembangunan di tengah keterbatasan yang dihadapi terutama berkaitan dengan persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Secara konsep, Jambi MANTAP memiliki makna :

- | | |
|--------------------------|---|
| Jambi Maju | : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman. |
| Jambi Aman | : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. |
| Jambi Nyaman | : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja. |
| Jambi Tertib | : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat. |
| Jambi Amanah | : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural. |
| Jambi Profesional | : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab. |

Secara umum, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki tiga misi. Lebih rinci berdasarkan urusan sebagai berikut :

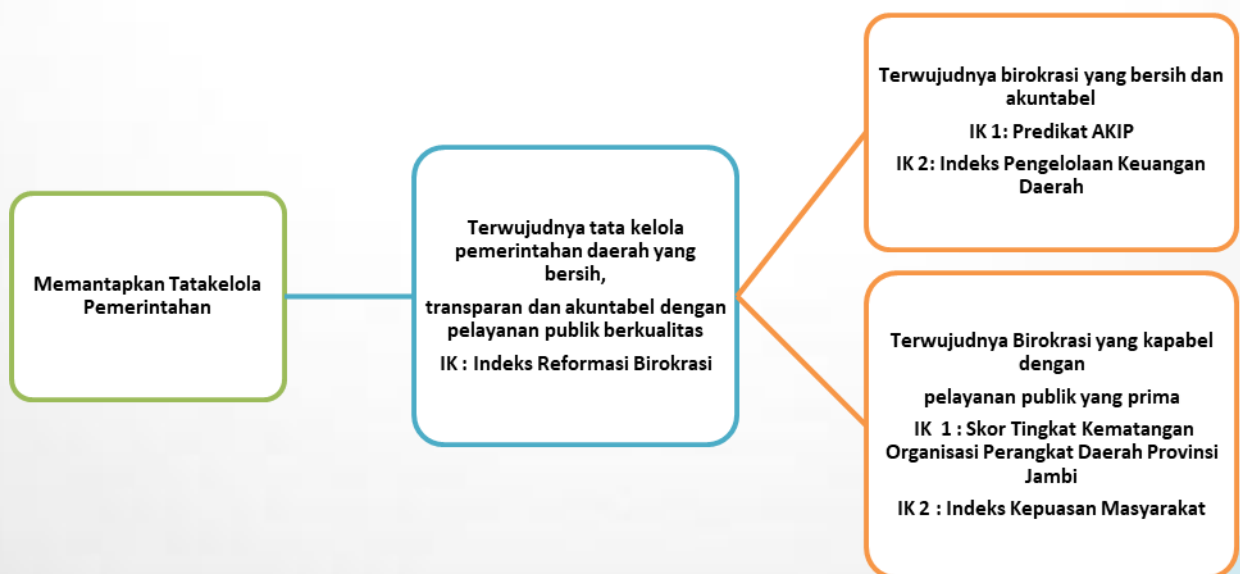
Misi 1 memuat kondisi : **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.

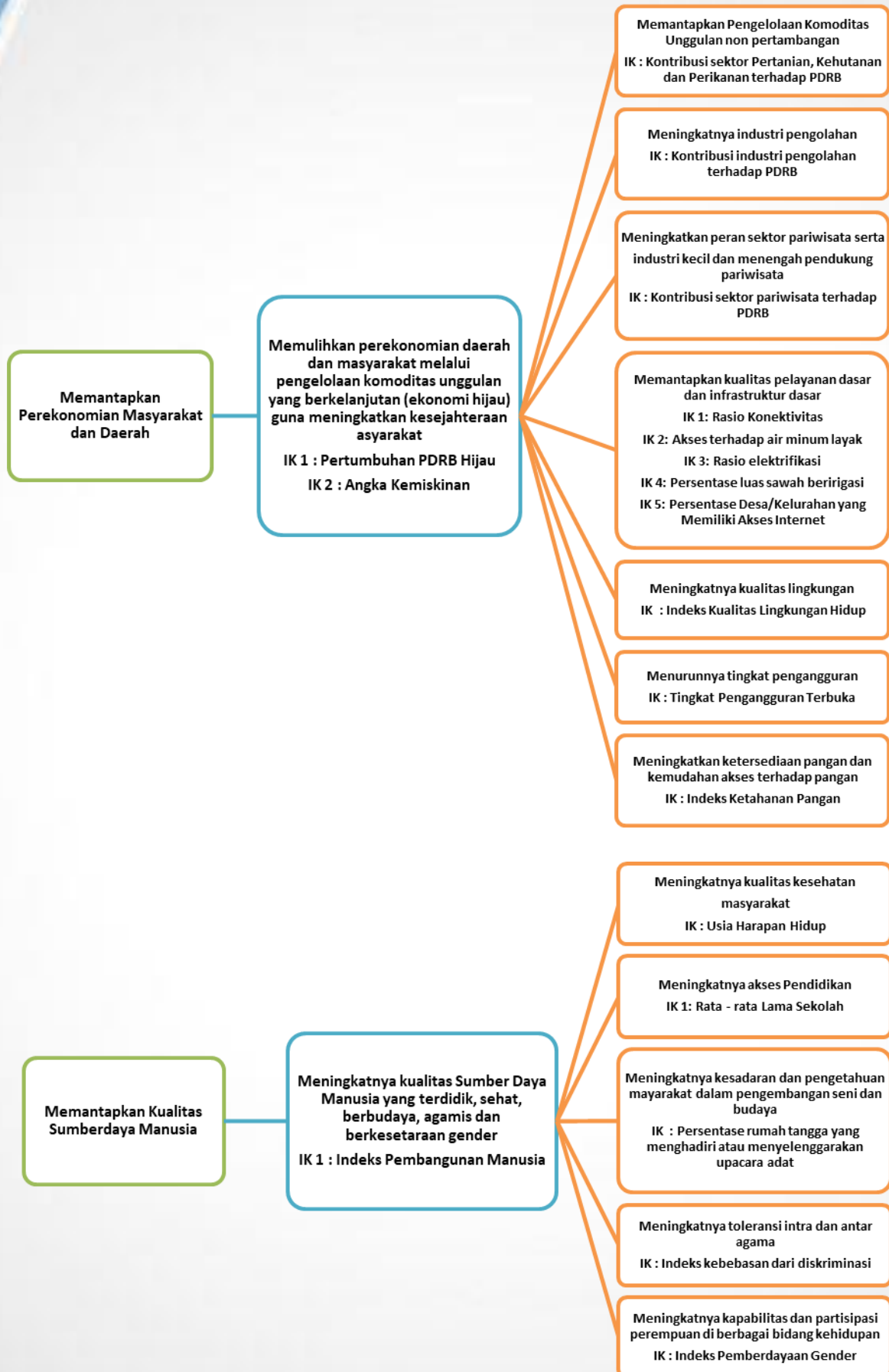
Misi 2 memuat kondisi **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

Misi 3 berkaitan dengan kondisi **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender. Selanjutnya, ketiga misi tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) tujuan dengan 4 (empat) indikator, 12 (dua belas) sasaran strategis, dan 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan digambarkan pada logic kinerja utama sebagai kinerja berikut :

Gambar 2.1. Logika Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi





Dari beberapa indikator tujuan maupun sasaran maka telah ditetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sekaligus ditetapkan menjadi perjanjian kinerja Tahun 2023 sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

II. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Kinerja Utama yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	4,75%
		Tingkat Kemiskinan	7,60%
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	54
		Akses terhadap Air Minum Layak	83,92%
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,43
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO ₂ eq)	3,348 juta ton CO ₂ eq
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50%
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	72%
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	72,62
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	69,02

III. Rencana Anggaran Tahun 2023

Sesuai perubahan yang terjadi dalam RKPD Provinsi Jambi, perubahan dilakukan pula terhadap rencana pendapatan dan anggaran belanja daerah Provinsi Jambi Tahun 2023. Dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 14 November 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Jambi menunjukkan belanja daerah sebesar Rp. 4.681.703.850.610,- bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 2.2. Rencana Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023

Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
4.681.703.850.610,-	4.605.217.044.542,11	98,37%
Bertambah/Berkurang	76.486.806.068,56	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2023, 2024

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam mereview kinerja organisasi pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran diukur berdasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian realisasi Kinerja	Kode Warna
1.	91 ≥100	Sangat tinggi	
2.	76 s.d. 90,99	Tinggi	
3.	66 s.d. 75,99	Sedang	
4.	51 s.d. 65,99	Rendah	
5.	s.d. 50,99	Sangat rendah	

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, diolah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2023.

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023 tercermin dari capaian 8 Tujuan/Sasaran strategis RPJMD dan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

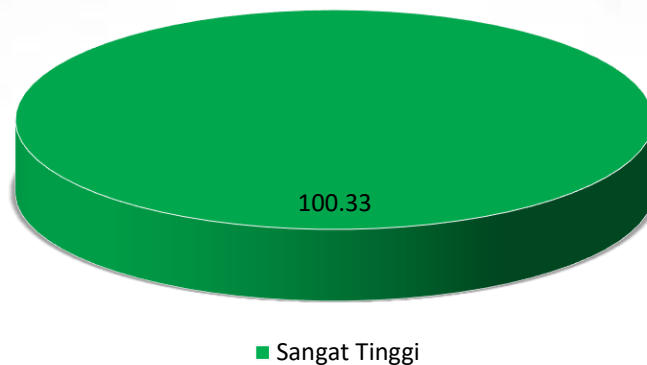
Berdasarkan hasil pengukuran, capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2023 memperoleh persentase capaian “sangat tinggi” sebesar 100%. Artinya, seluruh indikator kinerja memperoleh capaian kinerja diatas 91% dengan kategori sangat tinggi. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Data Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	4,75	4,75	100
		Tingkat Kemiskinan	7,60	7,58 (Maret)	100,26
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	54	54,05	100,09
		Akses terhadap Air Minum Layak	83,92	80,02	95,35
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	100	94,88	94,88
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,43	68,15	94,09
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO ₂ eq)	3,348 juta ton CO ₂ eq	4 juta ton CO ₂ eq	119,47
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50%	4,53	99,34
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	72%	72,17	100,24
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	72,62	73,73	101,53
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	69,02	67,86	98,32

Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2023 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang yang tentunya akan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1. Persentase Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023



Dari 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 7 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel di atas, maka seluruh indikator atau sebesar 100% masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi dengan rata-rata capaian secara keseluruhan sebesar 100,33.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS 1 :

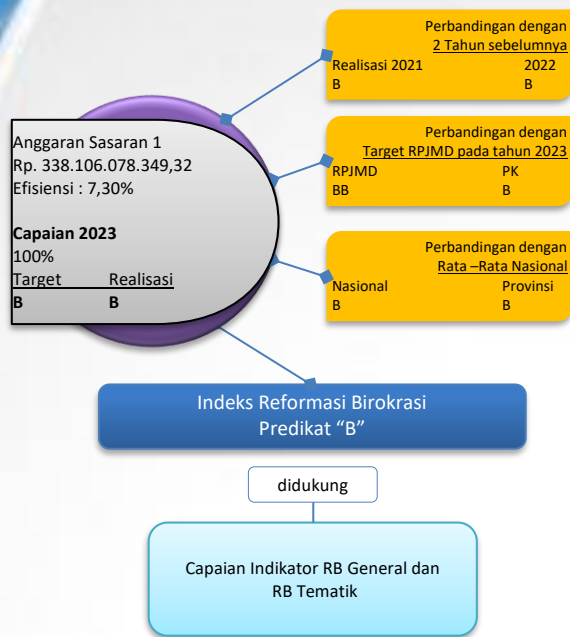
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas

IK ; INDEKS REFORMASI BIROKRASI



Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

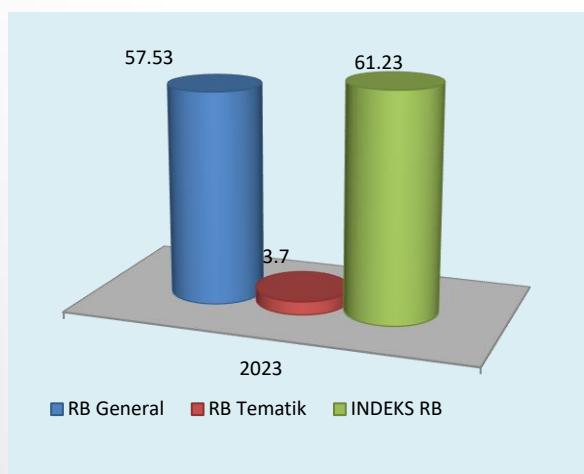
Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tidak terlepas dari berbagai komponen pendukung yang turut memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian secara umum.

Sebagaimana hasil evaluasi terhadap implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023 terdapat berbagai variabel pendukung diantaranya dilihat dari capaian RB General dan RB Tematik.

Gambar 3.2. Capaian RB General dan RB Tematik



Sumber: Kemenpan RB Data hasil Indeks RB 2023

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama yang harus diwujudkan dan menggambarkan keberhasilan misi 1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023 adalah sebesar **61,23** dengan kategori B. Evaluasi ini dilakukan guna menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi RB secara nasional mengalami perubahan kebijakan dengan mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor : 9 tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi. Evaluasi RB tahun 2023 menitikberatkan pada RB General dan RB Tematik yang diukur berdasarkan capaian Komponen dan Sub Komponen pada 41 Indikator penilaian. Capaian indikator RB General dan RB Tematik Pemerintah Provinsi Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut :

RB General

Strategi Pelaksanaan RB General :

Rencana Aksi Pembangunan RB General : Indeks 1.96

Dalam implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General ditemukan beberapa catatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi, diantaranya :

1. Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi Nasional (Kepmenpanrb Nomor 739 Tahun 2023).
2. Indikator Output atas Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan.

3. Penetapan target atas Output belum sepenuhnya didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.
4. Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai.



Atas catatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi berupaya menindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Telah dilakukan reviu dan memastikan target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023).
- b. Telah dilakukan reviu serta memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan.
- c. Telah dilakukan reviu dan memastikan target atas Output berdasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.
- d. Telah dilakukan reviu pada Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi.

Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General : Indeks "0"

Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi : Indeks 2

Pemerintah Provinsi Jambi cukup mendapatkan feedback yang sangat baik Pada capaian indikator persentase penyederhanaan struktur organisasi. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jambi segera menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi serta nantinya akan ditindaklanjuti ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.

Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi : Indeks 0,8

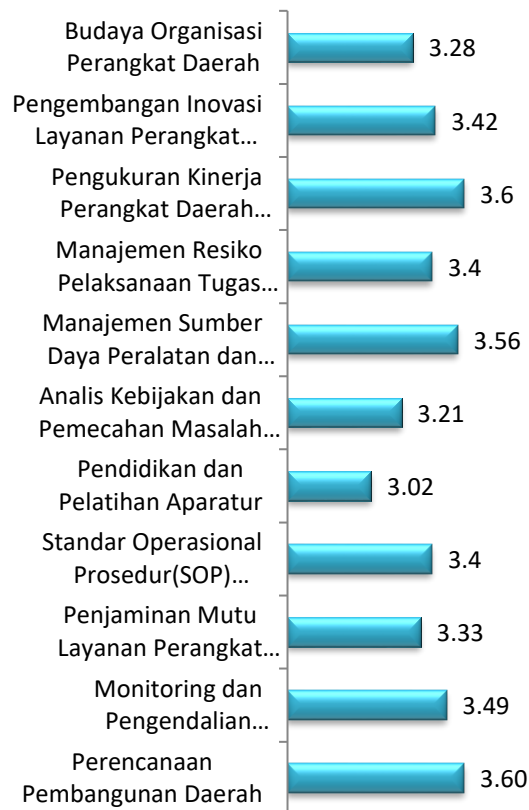


Guna mendorong peningkatan capaian sistem kerja, maka pada Tahun 2024 akan segera ditetapkan dalam Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur Jambi dan segera diimplementasikan lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Penyederhanaan struktur organisasi turut disupport oleh tingkat kematangan perangkat daerah. Dalam rangka peningkatan penataan organisasi / kelembagaan dilakukan penataan struktur organisasi dan tata laksana yang terus disempurnakan setiap tahun guna mencapai struktur ideal yang diinginkan, pada tahun 2023 tingkat kematangan perangkat daerah mencapai indeks 37,3 dan masuk dalam kategori **Tinggi**.

Rata-rata nilai variabel pendukung pencapaian indeks kematangan perangkat daerah dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini :

Diagram 3.1. Capaian Nilai Variabel
Kematangan Perangkat Daerah



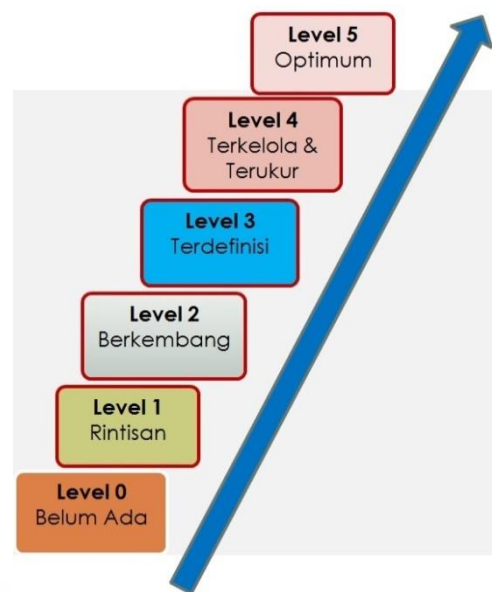
Sumber : Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2023, 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa skor tertinggi berada pada variabel Perencanaan Pembangunan Daerah, dan disusul pada variabel Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Sarpras. Capaian pada variabel ini merupakan bentuk komitmen yang kuat dari seluruh pihak terutama dengan penyempurnaan perencanaan berbasis kinerja serta didukung oleh peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik.

Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) : Indeks 2,46

Dalam upaya peningkatan sistem pengendalian intern, Pemerintah Provinsi Jambi senantiasa mengupayakan berbagai langkah-langkah strategis. Namun dalam implementasinya terdapat catatan yang perlu segera ditindaklanjuti diantaranya :

1. Masih terdapat indikator kinerja baik pada tingkat Pemda/OPD, maupun program/kegiatan/sub kegiatan yang belum cukup (tidak dapat menggambarkan sasaran).
2. Masih terdapat indikator kinerja baik pada tingkat Pemda/OPD, maupun program/kegiatan/sub kegiatan yang belum relevan dan spesifik mendukung pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan.
3. Masih terdapat target kinerja yang belum selaras dengan target di atasnya.
4. Memanfaatkan pengelolaan risiko sebagai dasar penilaian kinerja/ indikator pada Renstra/Renja Bappeda & Litbang serta Inspektorat
5. Belum terdapat pencantuman MR sebagai indikator kinerja di tingkat OPD maupun Pemda.
6. Pemerintah Daerah belum memiliki kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur.



Oleh sebab itu pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat pilar utama pada OPD guna memastikan proses perencanaan, pengukuran, serta monitoring dan evaluasi kinerja berjalan dengan baik. Kedepan, akan dilakukan :

- a. Perbaikan pada indikator kinerja.
- b. Perbaikan pada target kinerja.

- c. Mencantumkan Manajemen Resiko sebagai indikator kinerja dan menganggarkan SDM maupun dana untuk pengelolaan risiko di tingkat Pemda dan OPD.
- d. Menyusun kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur.

Demikian pula dalam hal pembangunan zona integritas, terdapat upaya peningkatan jumlah unit yang siap diajukan oleh Provinsi Jambi tahun 2024 serta tingkat Maturitas SPIP berada pada level 3.

Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas : Indeks 0,43

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jambi belum mengajukan unit pembangunan zona integritas karena keterbatasan waktu dan minimnya kesiapan perangkat daerah untuk diusulkan dalam zona integritas.

Berdasarkan hasil evaluasi terkait zona integritas bahwa Tingkat keberhasilan pembangunan ZI sebesar 0% (kategori Cukup) dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2021 Jumlah unit yang diusulkan: 2 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja Tahun 2022 Jumlah unit yang diusulkan: 2 unit kerja Jumlah unit

yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM : 0 unit kerja Tahun 2023 Jumlah unit yang diusulkan: 0 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi telah mempersiapkan pengusulan hasil pembangunan unit kerja Zona Integritas kepada TPN.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) : Indeks 2,69



Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP
bagi Pemerintah Daerah
Oleh Wakil Presiden Republik Indonesia

Dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, capaian Pemerintah Provinsi Jambi cukup baik dengan peningkatan nilai sebesar 0,83. Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting dalam rangka perbaikan SAKIP kedepan diantaranya :

1. Penjenjangan kinerja yang telah disusun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam penetapan kinerja pada dokumen perencanaan.
2. Aplikasi E-SAKIP Provinsi Jambi lebih berorientasi pada pengumpulan data perencanaan kinerja. Sedangkan pengukuran kinerja masih lebih berorientasi pada penyerapan anggaran.
3. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja lebih rendah

dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup.

4. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja output dan outcome pada setiap Perangkat Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 2024 akan dilakukan upaya strategis diantaranya ;

- a. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan dokumen perencanaan dan penetapan kinerja tiap level jabatan
- b. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan monitoring dan

evaluasi kinerja level pimpinan sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan)

- c. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja. Serta menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang.
- d. Menyusun kebijakan reward dan punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Sejak tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SAKIP di Jakarta yang dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Jambi dan Bapak Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan RBKunwas Wilayah 1 dalam menyempurnakan komponen SAKIP.

Bimbingan teknis ini dilakukan sebagai upaya untuk kembali memperkuat komitmen

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan RBKunwas Wil I Bapak Ahmad Hasmy bertempat di Hotel Grand Kemang Jakarta

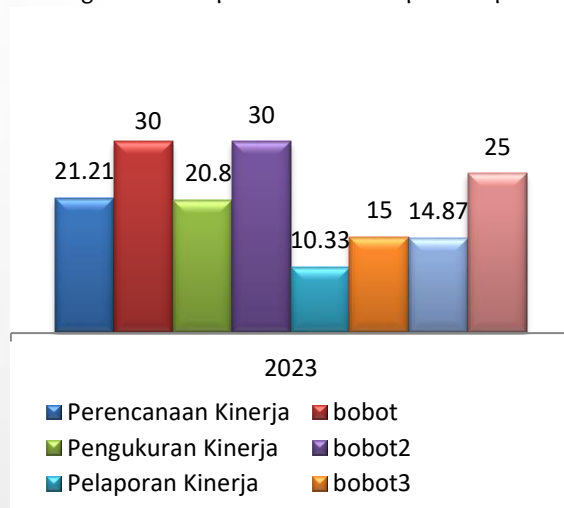


pimpinan perangkat daerah agar senantiasa meningkatkan kualitas implementasi SAKIP yang diantaranya bersama-sama mereviu dan melakukan penyusunan Pohon Kinerja (Logical Framework) beserta Cascading Kinerjanya. Selanjutnya melakukan penjabaran melalui Cascading Kinerja Perangkat Daerah, menyempurnakan indikator kinerja disetiap level jabatan sampai dengan staf, serta memanfaatkan media teknologi informasi untuk mengukur kinerja dengan penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online berbasis kinerja, dan e-SAKIP Provinsi Jambi.

Dari sisi perbaikan komponen akuntabilitas kinerja memberikan sumbangsih terhadap capaian kinerja yang baik, sehingga Provinsi Jambi berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2021 mendapatkan nilai 64,08, tahun 2022 mendapatkan nilai 66,38, dan pada tahun 2023 mendapat nilai 67,21. Bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tepatnya pada tahun 2026 adalah A, maka persentase realisasi capaian kinerja pada indikator ini mencapai **96%** atau masuk dalam kategori **tinggi**.

Peningkatan nilai terjadi hampir pada seluruh komponen penilaian sebagaimana grafik berikut :

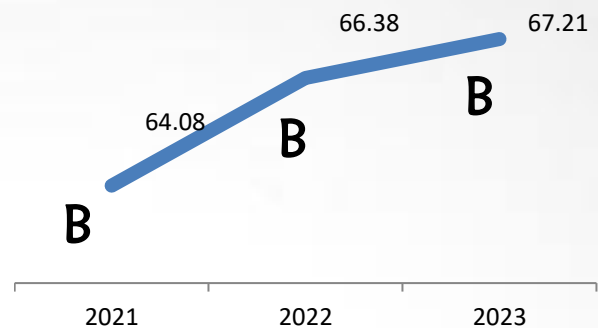
Diagram 3.2. Capaian Nilai SAKIP per komponen



Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP 2023 (2024)

Perkembangan capaian nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1. Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2021-2023



Indeks Perencanaan Pembangunan : Indeks 2,02

Upaya peningkatan indeks perencanaan pembangunan cukup baik, Catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi diantaranya :

- Untuk Pemerintah Provinsi Jambi masih terdapat beberapa aspek penilaian yang perlu ditingkatkan , yaitu :
 - 1.a.1.a tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan sasaran PN RPJMN, memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sejumlah 0,32 dari bobot maksimal 0,50.
- Rendahnya hasil penilaian dokumen Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah pada sub-indikator 2.a.1 bernilai masih Kurang dengan nilai 12,67 dari total nilai 18,00
- Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada sub-indikator 1.b.1 bernilai masih Kurang dengan Bobot nilai 1,53 dari Bobot Maksimum 2,50
- Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada sub-indikator 1.b.2 bernilai masih Sangat Kurang dengan Bobot Nilai 0,75 dari Bobot Maksimum 1,50
- Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada subindikator 1.b.3 bernilai masih Sangat Kurang dengan Bobot nilai 0,63 dari Bobot Maksimum 1,50
- Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada sub-

indikator 1.b.4 bernilai masih Sangat Kurang dengan Bobot nilai 0,87 dari Bobot Maksimum 1,50

7. Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada subindikator 1.b.5 bernilai masih Sangat Kurang dengan Bobot nilai 0,63 dari Bobot Maksimum 1,50
8. Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada sub-indikator 1.b.6 bernilai masih Kurang dengan Bobot nilai 1,00 dari Bobot Maksimum 1,50
9. Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada sub-indikator 1.b.7 bernilai masih Sangat Kurang dengan Bobot nilai 0,87 dari Bobot Maksimum 1,50
10. Rendahnya hasil penilaian dokumen Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah pada sub-indikator 2.a.1 bernilai masih Kurang dengan nilai 11,98 dari total nilai 18,00
11. Rendahnya hasil penilaian Kualitas Perencanaan dokumen Inovasi Perencanaan Pembangunan 2.b.1 bernilai masih Kurang dengan Bobot nilai 2,88 dari Bobot Maksimum 4,50
12. Rendahnya hasil penilaian Kualitas Perencanaan dokumen Keterkaitan Output dengan Outcome Inovasi 2.b.2 bernilai masih Sangat Kurang dengan nilai 2,68 dari total nilai 4,50

Oleh sebab itu, pada tahun 2024 akan dilakukan upaya perbaikan yakni :

- a. Meningkatkan dan menyesuaikan target indikator sasaran pembangunan daerah pada RPJMD.
- b. Menyesuaikan Isu Strategis dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan Hasil evaluasi pembangunan yang dirumuskan menjadi permasalahan daerah seharusnya menjadi dasar dalam menentukan Prioritas Pembangunan, sehingga Prioritas Pembangunan daerah

yang dirumuskan bisa menyelesaikan permasalahan daerah.

- c. Meningkatkan Indikator Kesesuaian antara Isu Strategis–Target– Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD atau RKPD (2.a) terutama pada sub-indikator Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah (2.a.1)

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) : Indeks 0,4

Pada capaian tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE cukup baik, Pemerintah Provinsi Jambi sudah menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA, dan kedepan pada tahun 2024 akan disiapkan menyusun Arsitektur SPBE to-be dalam SIA.

Tingkat Digitalisasi Arsip : Nilai Indeks 2,28

Implementasi Digitalisasi Arsip telah terimplementasi dengan baik, namun perlu upaya teknis sebagaimana catatan hasil evaluasi yang diberikan yakni : Seluruh kebijakan kearsipan telah ditetapkan dan disosialisasikan namun sebagian belum memenuhi kriteria diantaranya kebijakan klasifikasi, SKKAD, JRA, Arsip Vital, Alih Media, dan pengorganisasian kearsipan (Untuk kebijakan terkait alih media belum memenuhi kriteria yakni belum menjelaskan Metode, sarana prasarana, pelaksanaan, dan prosedur alih media arsip).

Untuk itu, selama tahun 2023 lalu Pemerintah Provinsi Jambi terus konsisten dalam melakukan berbagai hal guna peningkatan digitalisasi arsip diantaranya :

1. Telah melakukan alih media arsip namun belum memenuhi target yang sudah ditetapkan.
2. Telah menggunakan SRIKANDI versi Live dengan lebih dari 5 perangkat daerah di lingkungannya dan melaksanakan proses bisnis secara menyeluruh meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan (pemberkasan) termasuk penerapan tanda tangan elektronik yang bersertifikat BSSN.
3. Telah tersedia sumber daya pendukung dalam pengelolaan arsip elektronik, namun

Sumber Daya Manusia baru mengikuti Bimtek Srikandi dan Sertifikasi proyek arsitektur informasi, belum diikutsertakan pada Diklat Pengelolaan Arsip Elektronik.

4. Telah menjadi simpul JIKN dan melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai simpul pada JIKN



Penyerahan Hasil Evaluasi Kearsipan Bagi OPD Oleh Wakil Gubernur Jambi

Oleh sebab itu, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi akan :

- a. Menetapkan kebijakan kearsipan yang masih dalam bentuk rancangan dan menyosialisasikan
- b. Melaksanakan alih media arsip sesuai yang telah ditetapkan.
- c. Menerapkan aplikasi SRIKANDI pada seluruh perangkat daerah dan melaksanakan seluruh proses bisnis aplikasi SRIKANDI termasuk pemberkasan arsip
- d. Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan arsip elektronik melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan/atau sertifikasi kompetensi.

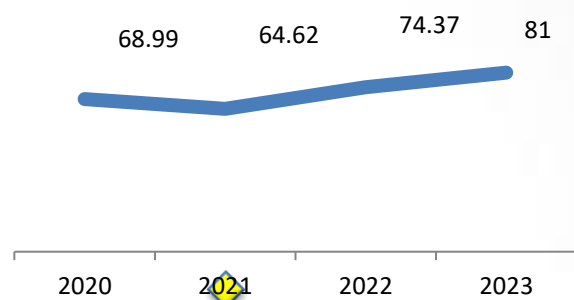
Dalam tata kelola kearsipan terdapat peningkatan hasil evaluasi atas pengawasan kearsipan oleh ANRI, dimana Provinsi Jambi memperoleh penilaian kategori baik dengan nilai 91,65.

Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pun memberikan nilai A (memuaskan) di peringkat ke-9 bagi pemerintah provinsi Jambi. Kepastian itu disampaikan ANRI

pada penyerahan Sertifikat Akreditasi Kearsipan dan pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023.

Pengawasan kearsipan telah dilakukan terhadap 86 Kementerian/Lembaga, sepuluh Perguruan Tinggi Negeri, 34 Pemerintah Daerah Provinsi, dan verifikasi terhadap 508 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peringkat terbaik diraih D.I Yogyakarta. Berturut kedua dan ketiga diraih Jawa tengah dan Jawa Barat.

Grafik 3.2. Trend Perkembangan Indeks Kearsipan Provinsi Jambi Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, 2023, 2024

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan : Nilai Indeks 1.

Adanya aplikasi LAPOR! menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 25/2020 tentang Pelayanan Publik, masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada implementasi SPAN LAPOR Provinsi Jambi tahun 2023 belum optimal, atas hasil catatan yang disampaikan dalam implementasi RB Pemerintah dijabarkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi yakni belum menyampaikan renaksi dan waktu tindak lanjut masih lama. Atas catata tersebut, pada tahun 2024 akan dilakukan penyusunan rencana aksi dan sosialisasi guna percepatan tindak lanjut SPAN LAPOR.

Indeks Kualitas Kebijakan : Nilai Indeks 0

Implementasi kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi masih perlu mendapatkan perhatian lebih baik lagi,

Indeks Reformasi Hukum : Nilai Indeks 1,11

Dari sisi pelaksanaan reformasi hukum mendapat apresiasi kategori cukup, kendati demikian perlu adanya upaya yang lebih serius dalam konteks penerapannya pada tahun 2024.

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral : Nilai Indeks 0,38

Penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Provinsi Jambi masih berada pada predikat Cukup. Oleh sebab itu kedepan perlu peningkatan kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik yang terdiri dari Pembina Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah, Walidata dan Produsen Data telah tertuang dalam Peraturan SDI Pemerintah Provinsi Jambi.

Selanjutnya pada tahun 2024 akan ditetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur yang mengatur penerapan SDI oleh seluruh produsen data di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Peraturan terkait SDI yang terbit pada akhir tahun 2022 harus dibuat aturan turunannya berupa petunjuk teknis penerapan Prinsip SDI yang harus dipedomani oleh seluruh Produsen Data di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Indeks Tata Kelola Pengadaan : Nilai Indeks 1,15

Dalam kategori Tata Kelola Pengadaan memperoleh nilai yang cukup baik, dan pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi akan meningkatkan pencapaian dengan memastikan keterisian Formasi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ.

Indeks Sistem Merit : Nilai Indeks 1,71

Dalam implementasi Sistem Merit Pemerintah Provinsi Jambi perlu dilakukan upaya penyempurnaan, oleh sebab itu kedepan Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan langkah-langkah antara lain :

- Menyusun SKJ secara lengkap (manajerial, sosiokultural, teknis) untuk seluruh jabatan;
- Melakukan pemetaan kompetensi bagi seluruh pegawai;
- Melakukan pemetaan talenta berdasarkan Permenpan 3/2020;

- Menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang (5 tahun);
- Melakukan pengisian Administrator dan Pengawas dengan menggunakan metode assessment;
- Menyusun analisis permasalahan kinerja secara terstruktur dan menentukan strategi yang tepat untuk mengatasinya.

Indeks Pelayanan Publik : Nilai Indeks 0,98**Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik : Nilai Indeks 1,33**

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga telah dikembangkan guna peningkatan kualitas pelayanan, baik layanan pada masyarakat maupun layanan internal. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan mendapatkan nilai dengan tingkat kepatuhan **tertinggi Zona Hijau** dengan raihan nilai 88,41 sebagaimana yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia di tahun ini. Dari 34 provinsi yang dinilai Pelayanan Publiknya di tahun 2023, Pemprov Jambi masih bertahan pada peringkat 10 terbaik. Atas prestasi tersebut, Gubernur Jambi diundang sebagai Penerima Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Jakarta.

Adapun nilai yang diraih Pemerintah Provinsi Jambi mencapai 88,41. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi mengalami penurunan nilai dan peringkat. Tahun lalu, Provinsi Jambi mendapatkan nilai 89,62 dan meraih peringkat 7 secara nasional.



Penerimaan Penghargaan atas
Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
Provinsi Jambi
Dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia
kepada Gubernur Jambi

Pada tahun 2023 ini penilaian Ombudsman terhadap pelayanan publik menjadi semakin ketat. Oleh sebab itu banyak Pemerintah Daerah, khususnya di Provinsi Jambi, yang kesulitan mendapatkan nilai sempurna.

Pemerintah Provinsi Jambi sendiri juga mengalami penurunan nilai. Namun dibandingkan dengan provinsi lain, Jambi masih bertengger di posisi 10 besar secara nasional.

Indeks SPBE : Nilai Indeks 5,96

Capaian IKU Makro : Nilai Indeks 2

Capaian IKU Non Makro : Nilai Indeks 3,14

Opini BPK : Nilai Indeks 5

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga pilar tersebut menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-

urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah lainnya.

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, hingga kembali menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk kesepuluh kalinya Provinsi Jambi dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Atas pencapaian opini BPK ini maka kinerja indikator pendukung indikator Kinerja Utama Indeks RB ini menjadi **sangat tinggi** atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 100% atau sangat tinggi.

Pada komponen kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya.



Penerimaan Opini WTP dari BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Jambi

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK : Nilai Indeks 2,74

Indeks BerAkhlak : Nilai Indeks 2.28

Survei Penilaian Integritas : Nilai Indeks 7,15

Penilaian atas Survei Integritas Provinsi Jambi sudah cukup baik dengan memperoleh indeks RB 7,15. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan, pengawasan, serta monev penyelenggaraan pemerintahan sudah cukup baik. Namun demikian, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi perlu memperkuat dan melakukan pembenahan-pembenahan berupa :

- a. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/ gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.
- b. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan suap/gratifikasi dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/

pengelolaan gratifikasi di instansi. (2) Menegakkan sanksi/hukuman penerimaan suap/ gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten. (3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/ gratifikasi. (4) Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.

- c. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap pengawasan internal agar lebih proaktif, seperti audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
- d. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut: (1) Menyusun proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Memperkuat peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Membangun mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Memastikan dan memperkuat vendor management system. (5) Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Implementasi proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Perbaikan mendasar dan menyeluruh dalam proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.
- f. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Memasukkan larangan dan sanksi terkait pelaksanaan tugas dalam kode etik di instansi dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan di instansi untuk menciptakan perilaku baru dalam melaksanakan tugas. (3) Menyusun kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Menyusun program/kegiatan bagi calon pimpinan/pejabat di instansi untuk meningkatkan integritas dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat. (5) Membangun mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.
- g. Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar

responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.

- h. Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan.
- i. Perbaikan mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut : (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan. (3) Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.

Survei Kepuasan Masyarakat : Nilai Indeks RB 6.56

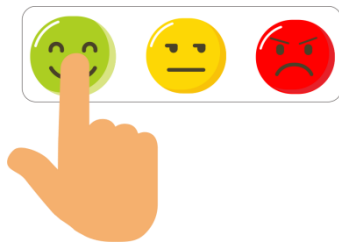


Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkan. Keluhan masyarakat yang tidak direspon oleh pemerintah akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah yang responsif dalam arti positif merupakan dambaan seluruh masyarakat.

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan

publik bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disamping telah menerbitkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebagai upaya untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.

Pada komponen kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya.



Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini, kesembilan unsur yang ada dalam survei dijadikan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Pada tahun 2023, perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil

survey pada 43 Perangkat Daerah guna mendapatkan gambaran secara utuh hasil pelaksanaan upaya perbaikan kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil perhitungan dan konversi Indeks menjadi mutu pelayanan dan kinerja dapat dilihat pada tabel bawah. Berdasarkan tabel di bawah, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2023 masuk dalam kategori “Baik” atau “B” dengan nilai rata-rata **83,809**.

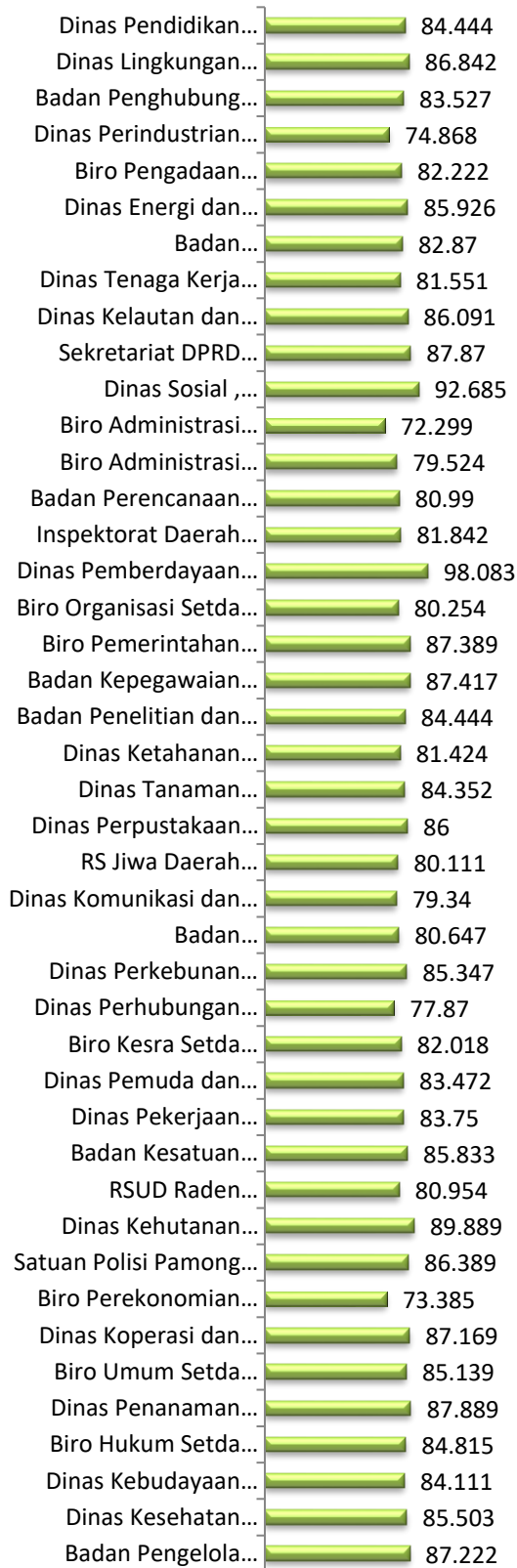
Tabel 3.3. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2023

Unsur Pelayanan	2022	2023
U1: Persyaratan pelayanan	83,926	83,684
U2: Prosedur pelayanan	83,460	83,164
U3: Waktu pelayanan	81,738	80,659
U4: Biaya/tarif pelayanan	89,653	90,108
U5: Produk/hasil pelayanan	83,654	82,362
U6: Kemampuan petugas pelayanan	83,548	82,605
U7: Perilaku petugas pelayanan	83,707	84,120
U8: Maklumat pelayanan	70,716	80,855
U9: Mekanisme pengaduan pelayanan	88,546	86,720
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,333	83,809

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2023, 2024

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi masuk dalam kategori baik namun cenderung menurun secara akumulasi. Unsur dengan nilai tertinggi adalah biaya/tariff pelayanan dengan perolehan nilai 90,108 dan nilai terendah adalah pada unsur waktu pelayanan dengan perolehan 80,659. Berdasarkan hasil survey ini, kedepan harus dilakukan perbaikan atas waktu pelayanan sehingga akan berdampak pada komitmen dalam memberikan layanan. Selanjutnya, perlu juga upaya penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan menerapkan SOP yang lebih baik dan tetap melaksanakan perbaikan-perbaikan pada unsur lainnya.

Diagram 3.3. Nilai Rata-Rata IKM
Perangkat Daerah Tahun 2023



Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
(Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2023) 2024

RB Tematik



Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi) : Nilai Indeks RB 0,2

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik merupakan agenda penting yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Jambi telah menjalankan RB Tematik dalam Pengentasan Kemiskinan, pada penerapannya terdapat beberapa catatan kiranya perlu mendapat perhatian, yakni :

1. Sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada
2. Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan
3. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi

4. Rencana aksi tematik yang disusun belum menjabarkan "how to" atau bagaimana langkah-langkah mencapai sasaran
5. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan

Oleh sebab itu, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi telah menyusun langkah- langkah strategis diantaranya :

- a. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait.
- b. Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan/atau mandat RB Tematiknya
- c. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
- d. Memastikan Rencana aksi tematik yang disusun telah menjabarkan "how to" atau bagaimana langkah-langkah mencapai sasaran
- e. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain



Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melakukan beberapa hal antara lain :

1. Secara berkala melaksanakan internalisasi arah perubahan yang ditetapkan kepada

seluruh pegawai dan melakukan survei kepada seluruh pegawai terkait internalisasi nilai-nilai organisasi, budaya kerja, dan pemahaman reformasi birokrasi;

2. Meningkatkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis. Selain itu, melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ingin diwujudkan oleh agen perubahan dengan karakter layanan utama pada masing-masing unit kerja;
3. Mendorong agen perubahan untuk meningkatkan kualitas rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, core values ASN BerAKHLAK, area perubahan dalam reformasi birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana RB Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah sehingga dapat dilakukan strategi perbaikan dalam internalisasi RB;
5. Memastikan proses deregulasi kebijakan berjalan secara menyeluruh dengan melakukan identifikasi secara keseluruhan peraturan yang ada dan memastikan bahwa tidak ada yang tumpang tindih dan menghambat kinerja maupun pelayanan;
6. Membangun sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sehingga memudahkan dalam menganalisis peraturan/kebijakan yang mungkin saja tidak harmonis/sinkron dengan kebijakan lainnya;
7. Melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mengusulkan kembali pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional. Selain itu juga menyelesaikan mekanisme hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional dengan adanya penyederhanaan organisasi;
8. Mereviu proses bisnis dan SOP untuk menyesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi dan memastikan keduanya

mendukung proses kerja di Provinsi Jambi menjadi lebih efektif dan efisien;

9. Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebermanfaatan dari SPBE yang telah dibangun dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi serta pengguna layanan. Selanjutnya melakukan tindak lanjut perbaikan untuk menjawab temuan yang ada;
10. Melakukan reviu dan menyempurnakan identifikasi resiko khususnya pada hal yang bersifat strategis sampai ke tingkat Perangkat Daerah;
11. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada seluruh Perangkat Daerah dan memastikan tindak lanjut dari SKM kepada seluruh layanan melakukan strategi teknis guna memberikan layanan sesuai harapan masyarakat;
12. Mengintegrasikan seluruh website Perangkat Daerah dalam website Pemerintah Provinsi Jambi guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru terkait layanan;
13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan memastikan pemanfaatan aplikasi e-SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah guna mewujudkan manajemen kinerja yang baik dan konsisten;

Permasalahan :

- a. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah telah dilakukan, namun belum sepenuhnya terimplementasi dikarenakan sebagian Perangkat Daerah masih mengacu pada dokumen perencanaan induk (RPJMD) sehingga perbaikan-perbaikan yang dilakukan terkendala pada kecenderungan atas ketidakonsistenan dokumen perencanaan jika Renstra OPD diperbaiki.
- b. Unsur-unsur pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama berkaitan dengan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Solusi :

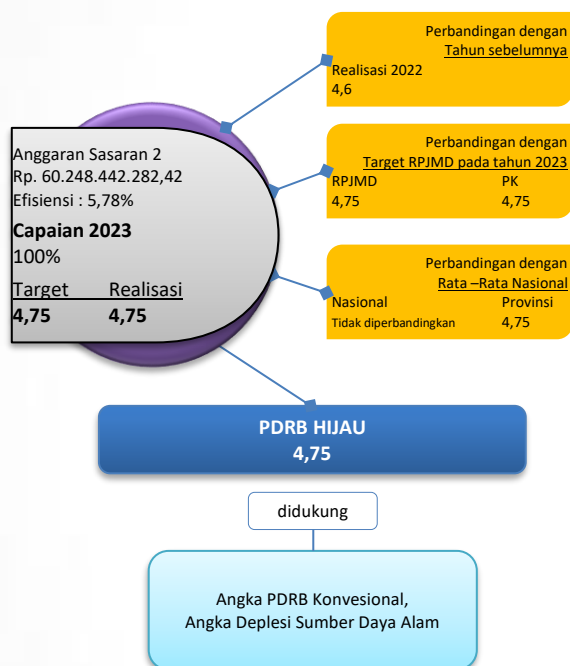
- a. Penyempurnaan perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja sehingga sasaran strategis berorientasi pada hasil atau bermanfaat bagi masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja yang SMART dan terjalin keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*)
- b. Penetapan standar operasi pelayanan (SOP) pelayanan yang diterapkan secara terbuka kepada pihak pemakai jasa atau masyarakat, yang disertai tenggat waktu yang jelas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu Perangkat Daerah dan masyarakat karena seluruh petugas pada unit pelayanan akan bekerja secara maksimal berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan pada sisi lain, masyarakat merasa yakin akan mendapatkan produk/ jasa pelayanan yang cepat, murah dan maksimal.
- c. Pemberian reward atau prestasi kerja penyelenggara pelayanan publik dan punishment terhadap hasil kerja yang tidak baik.
- d. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan maka perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan petugas pemberi pelayanan pada setiap unit di masing-masing Perangkat Daerah Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan yang didukung oleh sistem IT pada setiap unit pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Program-program yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Penataan Desa
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Pengelolaan Arsip
6. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
11. Program Penyelenggaraan Pengawasan
12. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
13. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
14. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
15. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan jasa
16. Program Kesejahteraan Rakyat
17. Program Perekonomian Dan pembangunan
18. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
19. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
20. Program Penataan Organisasi
21. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
22. Program Pencatatan Sipil
23. Program Pendaftaran Penduduk
24. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
26. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat hukum Adat
27. Program Peningkatkerjasama Desa
28. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
29. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
30. Program Kepegawaian Daerah
31. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia
32. Program Pelayanan Penanaman Modal
33. Program Pelayanan Penghubung
34. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
35. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

SASARAN STRATEGIS 2 :

Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
IK : 1. PDRB HIJAU,
2. TINGKAT KEMISKINAN

**INDIKATOR KINERJA :
PDRB HIJAU**

Indikator makro terkait dengan keadaan sosial dan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam membangun suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, indikator ini merupakan data strategis karena digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah.

Perekonomian Provinsi Jambi 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp293,73 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp79,8 juta atau US\$5.239,4.

Ekonomi Jambi tahun 2023 tumbuh sebesar 4,66 persen, melambat dari tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,12 persen. Dari sisi

produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 16,84 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 10,31 persen.

Ekonomi Jambi triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,15 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,10 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,00 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,10 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 73,00 persen.

Struktur ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2023 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 31,83 persen. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 64,11 persen.

**PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2023 (C-TO-C)**

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023 tumbuh sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Perusahaan sebesar 16,84 persen. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,15 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 8,87 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

sebesar 8,76 persen; kategori Jasa lainnya tumbuh 8,54 persen; Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 8,29 persen; dan Konstruksi tumbuh 7,98 persen. Sedangkan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 5,61 persen; Industri Pengolahan sebesar 4,16 persen; dan Pertambangan dan Penggalan tumbuh 0,07 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,83 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalan sebesar 15,31 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,30 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,98 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi mencapai 70 persen.

5 BESAR PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
y-on-y Provinsi Jambi Triwulan 4-2023 (%)



PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2023 TERHADAP TRIWULAN IV-2022 (Y-ON-Y)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,03 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 21,15 persen; diikuti Konstruksi sebesar 16,30 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,31 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,18 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 9,97 persen. Sementara itu terdapat beberapa lapangan usaha pertumbuhannya terkontraksi pada periode ini.

Kontraksi terdalam terjadi pada Pertambangan dan Penggalan sebesar -6,99 persen. Kategori lain yang mengalami kontraksi pertumbuhan secara y-on-y adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (-1,86 persen) dan Jasa Keuangan dan Asuransi (-0,29 persen).

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2023 TERHADAP TRIWULAN III-2023 (Q-TO-Q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2023 dibanding triwulan III-2023 (q-to-q) terkontraksi sebesar 1,00 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah Pertambangan dan Penggalan sebesar 10,14 persen. Selain itu, lapangan usaha lainnya yang terkontraksi adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,40 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,70 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,04 persen; dan Industri Pengolahan yang terkontraksi 0,86 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan, diantaranya Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh signifikan sebesar 26,10 persen; Jasa Pendidikan sebesar 11,33 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,70 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 6,08 persen; kategori Konstruksi sebesar 4,11 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 3,68 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 3,28 persen.



PDRB MENURUT PENGELUARAN

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2023 (C-TO-C)

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023 tumbuh sebesar 4,66 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PKLNPRRT) sebesar 10,31 persen; diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 9,88 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,19 persen; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 1,97 persen. Sedangkan komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi sebesar 1,69 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami terkontraksi sebesar 3,79 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 64,11 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah Komponen PK-RT di Provinsi Jambi yaitu sebesar 42,17 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 21,95 persen. Komponen PK-P memiliki andil sebesar 6,75 persen. Sedangkan peranan Komponen PK-LNPRT dan Perubahan Inventori relatif kecil, yaitu masing-masing sebesar 0,58 persen dan 0,82 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 36,37 persen.

PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN
y-on-y Provinsi Jambi Triwulan 4-2023 (%)**PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2023 TERHADAP TRIWULAN IV-2022 (Y-ON-Y)**

Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,03 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 21,10 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 9,34 persen; PK-P tumbuh 3,58 persen; dan PK-RT sebesar 2,79 persen. Sementara itu, komponen lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu Komponen Ekspor Barang dan Jasa 5,47 persen, serta Impor Barang dan Jasa sebesar 8,71 persen.

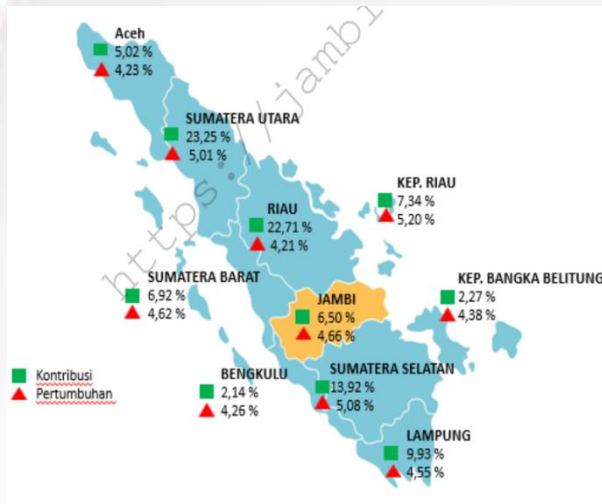
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan III-2023 (Q-TO-Q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2023 dibanding triwulan III-2023 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,00 persen (q-to-q). Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen PK-P yang tumbuh sebesar 73,00 persen; berikutnya adalah Komponen PK-LNPRT sebesar 11,49 persen; Komponen PK-RT sebesar 2,43 persen; dan PMTB tumbuh 1,62 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa (merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) mengalami pertumbuhan 13,78 persen, dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi sebesar 2,02 persen. Ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi (q-to-q) secara umum mengalami kontraksi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian provinsi-provinsi di Sumatera menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di semua provinsi tercatat kondusif, dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Secara kumulatif pertumbuhan tertinggi (c-to-c) tercatat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,20 persen, diikuti Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,08 persen, serta Provinsi Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,01 persen. Sementara itu, provinsi lainnya berada pada pertumbuhan di bawah 5 persen. Provinsi Jambi berada pada peringkat empat dengan pertumbuhan sebesar 4,66 persen.

Gambar 3.3. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2024

Secara spasial, struktur perekonomian Sumatera pada tahun 2023 masih didominasi oleh provinsi lumbung energi. Tiga Provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,25 persen, Provinsi Riau dengan kontribusi sebesar 22,71 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 13,92 persen. Provinsi Jambi bila dilihat dari distribusinya terhadap PDRB Sumatera berada pada peringkat tujuh dengan share sebesar 6,50 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator keberhasilan ekonomi suatu Provinsi/Kabupaten. Perhitungan PDRB Konvensional tersebut dapat disimpulkan bahwa perhitungan tersebut hanya mengukur hasil kegiatan ekonomi tidak memasukkan dimensi lingkungan di dalamnya. Sehingga PDRB Konvensional tersebut memiliki beberapa kelemahan. Sektor kehutanan yang memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan dengan jasa lingkungannya yang tak ternilai mengharuskan perhitungan PDRB yang ramah lingkungan dengan memperhitungkan penyusutan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga

diperoleh nilai ekonomi sumber daya hutan secara menyeluruh, disebut PDRB Hijau. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat lebih terarah dan akurat sesuai kinerja perekonomian yang sebenarnya.

Pada laporan kinerja ini menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau sektor kehutanan Provinsi Jambi dengan pendekatan jasa lingkungan dengan menggunakan data regional Provinsi Jambi. Data yang dikumpulkan pada laporan ini yaitu berupa data sekunder yang meliputi data Statistik Kehutanan dan tutupan lahan hutan Provinsi Jambi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan data PDRB Provinsi Jambi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

Analisis data yang dipergunakan adalah estimasi nilai PDRB Hijau kehutanan dengan mengurangi nilai deplesi dan degradasi sumberdaya hutan dan menambahkan nilai jasa lingkungan dengan pendekatan benefit transfer. Perhitungan PDRB Hijau sektor kehutanan dengan pendekatan jasa lingkungan diperoleh nilai PDRB Hijau kehutanan jadi lebih tinggi dengan mengintegrasikan nilai jasa lingkungan ke dalam perhitungan.

Dalam konsep penghitungan PDRB Hijau dilakukan melalui tahapan antara lain :

1. Menghitung nilai tambah sektor kehutanan.
2. Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya hutan yang diambil.
3. Memberikan nilai ekonomi terhadap sumberdaya hutan yang diambil.
4. Mengurangi nilai tambah PDRB sektor kehutanan dengan nilai deplesi sumberdaya

hutan diperoleh nilai kontribusi semi hijau sektor kehutanan.

5. Melakukan identifikasi kerusakan atau degradasi tanah/lahan, air dan udara akibat kegiatan kehutanan.
6. Menghitung besar volume kerusakan atau degradasi sumberdaya alam akibat kegiatan kehutanan.
7. Menentukan nilai ekonomi (valuasi) degradasi lingkungan,
8. Nilai degradasi dikurangkan dari nilai kontribusi semi hijau sektor kehutanan dan diperoleh nilai kontribusi hijau dari sektor kehutanan



(DR), sebagai pungutan yang dikenakan untuk pengganti nilai intrinsik terhadap hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Sementara estimasi Nilai Degradasi sumber daya hutan didekati dari data luas deforestasi berdasarkan perubahan tutupan lahan hutan Sumatera Utara dan Nilai jasa lingkungan hutan dihitung dengan menggunakan pendekatan Benefit Transfer.



Dari pengumpulan data di atas, maka model estimasi nilai PDRB Hijau Kehutanan dapat dilihat pada model estimasi nilai PDRB Hijau PDRB Konvensional Kehutanan (-) Depleksi Sumberdaya Hutan, PDRB Semi Hijau Hutan (-) Degradasi Sumberdaya Hutan, PDRB Hijau Kehutanan Tanpa Jasa Lingkungan, PDRB Hijau Kehutanan + Jasa Lingkungan.

Adapun estimasi Nilai Depleksi sumberdaya hutan yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan besarnya nilai pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi

Perhitungan PDRB menggunakan pendekatan nilai tambah dengan membagi sektor perekonomian Provinsi Jambi menjadi 17 sektor.

Tabel 3.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	73.232,4	83.574,9	93.493,2	41.209,1	43.267,9	45.697,3
B.	Pertambangan dan Penggalian	32.981,3	53.248,6	44.971,8	35.730,2	38.502,0	38.529,0
C.	Industri Pengolahan	23.805,8	27.051,4	29.323,6	15.727,4	16.218,8	16.892,9
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	165,6	191,1	220,7	86,9	97,0	108,8
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	331,1	351,8	381,6	213,1	219,8	220,3
F.	Konstruksi	18.470,8	19.406,8	21.649,6	12.025,0	11.919,0	12.870,5
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29.050,3	33.593,9	39.071,9	15.049,6	15.857,8	17.264,4
H.	Transportasi dan Pergudangan	6.060,0	7.914,2	9.416,3	4.437,5	5.190,3	5.620,5
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.568,6	2.901,8	3.189,7	1.661,4	1.845,6	2.007,3
J.	Informasi dan Komunikasi	9.513,0	10.176,7	10.910,0	6.335,0	6.794,2	7.304,0
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.976,4	6.425,2	6.670,0	3.674,3	3.647,8	3.692,4
L.	Real Estat	3.753,5	4.151,4	4.367,8	2.281,9	2.378,2	2.456,6
M,N.	Jasa Perusahaan	2.765,5	3.559,0	4.365,9	1.540,3	1.773,4	2.071,9
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.999,5	9.922,3	10.335,5	4.929,3	4.897,5	5.043,2
P.	Jasa Pendidikan	8.201,0	8.585,0	9.036,8	5.216,5	5.321,8	5.457,1
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.315,4	3.284,7	3.540,3	2.211,8	2.158,8	2.252,5
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	2.104,1	2.380,8	2.784,7	1.521,3	1.640,1	1.780,3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		232.294,2	276.719,4	293.729,3	153.850,6	161.730,0	169.268,8

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023 (2024)

Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

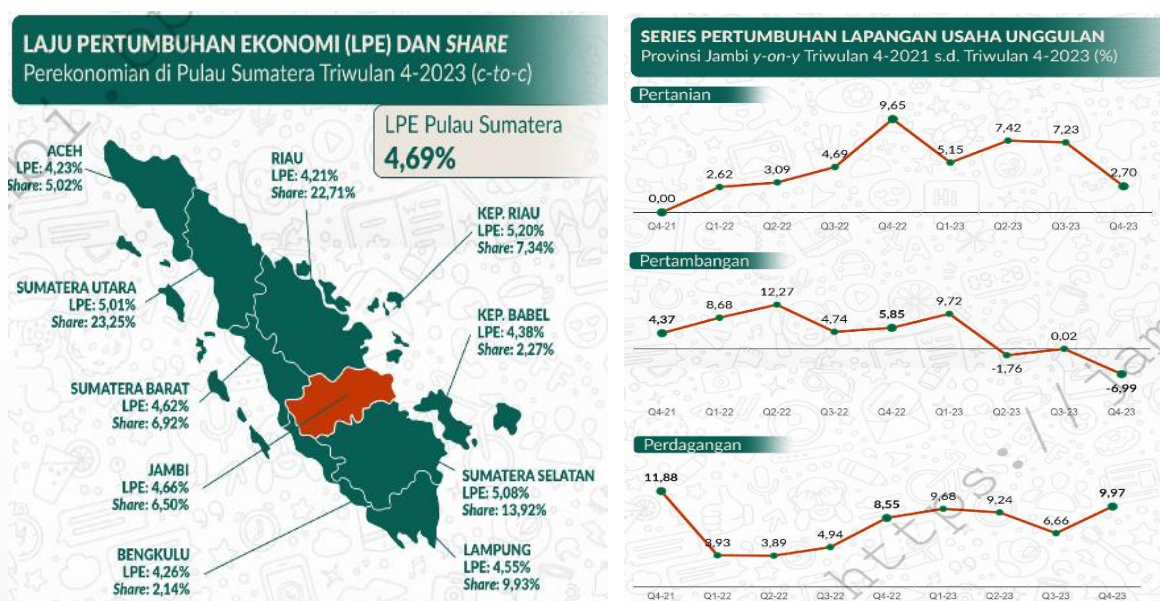
Lapangan Usaha	Triw III-2023 Terhadap Triw II-2023 (q-to-q)	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023 (q-to-q)	Triw III-2023 Terhadap Triw III-2022 (y-on-y)	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2023	Sumber Pertumbuhan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,60	-3,70	7,23	2,70	5,61	1,50
B. Pertambangan dan Penggalian	5,66	-10,14	0,02	-6,99	0,07	0,02
C. Industri Pengolahan	6,44	-0,86	5,07	9,02	4,16	0,42
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,72	1,42	12,92	14,31	12,15	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,11	-4,40	-0,11	-1,86	0,21	0,00
F. Konstruksi	7,31	4,11	12,63	16,30	7,98	0,59
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,43	6,08	6,66	9,97	8,87	0,87
H. Transportasi dan Pergudangan	5,57	7,70	9,31	7,07	8,29	0,27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,78	3,28	9,16	7,74	8,76	0,10
J. Informasi dan Komunikasi	0,10	3,68	6,61	9,71	7,50	0,32
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,93	-3,04	-1,07	-0,29	1,22	0,03
L. Real Estat	1,06	1,72	3,89	3,27	3,30	0,05
M,N. Jasa Perusahaan	-0,55	1,73	19,98	21,15	16,84	0,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-22,58	26,10	-9,40	14,18	2,97	0,09
P. Jasa Pendidikan	-7,96	11,33	-0,09	7,82	2,54	0,08
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,31	2,94	8,20	7,46	4,34	0,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-3,39	3,04	9,17	7,05	8,54	0,09
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2,50	-1,00	4,84	4,03	4,66	4,66

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023 (2024)

Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)

Provinsi	Triw III-2023 Terhadap Triw II-2023 (q-to-q)	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023 (q-to-q)	Triw III-2023 Terhadap Triw III-2022 (y-on-y)	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2023	Sumber Pertumbuhan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	1,44	7,16	3,78	4,15	4,23	0,24
2. Sumatra Utara	2,00	0,53	4,94	5,02	5,01	1,15
3. Sumatra Barat	0,82	2,31	4,28	4,30	4,62	0,34
4. Riau	3,40	0,10	4,01	4,02	4,21	0,90
5. Jambi	2,50	-1,00	4,84	4,03	4,66	0,30
6. Sumatra Selatan	2,39	-1,90	5,08	4,94	5,08	0,70
7. Bengkulu	-2,45	3,04	3,97	4,76	4,26	0,09
8. Lampung	0,74	-3,99	3,93	5,40	4,55	0,47
9. Kep. Bangka Belitung	0,03	2,65	4,01	4,00	4,38	0,10
10. Kepulauan Riau	0,42	6,80	4,88	4,45	5,20	0,40

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023 (2024)



Program yang dilakukan guna pencapaian kinerja ini antara lain :

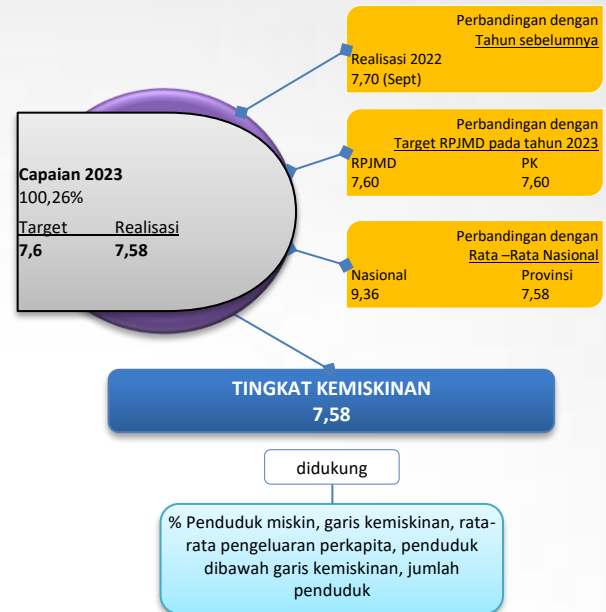
1. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Penyuluhan pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau kecil
7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
9. Program Pengawasan sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

10. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
12. Program Pengembangan Ekspor
13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
15. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
16. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman modal
17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
18. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
19. Program Promosi Penanaman Modal
20. Program Pemasaran Pariwisata
21. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual
22. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
23. Program Peningkatandaya Tarik Destinasi Pariwisata
24. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
25. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
26. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
27. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
28. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
29. Program Pengembangan UMKM

INDIKATOR KINERJA : TINGKAT KEMISKINAN



Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 7,58 persen, menurun 0,12 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,04 persen poin terhadap Maret 2022.



Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 280,68 ribu orang, menurun 3,1 ribu orang terhadap September 2022 dan 1,31 ribu orang terhadap Maret 2022.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 10,48 persen, turun menjadi 10,19 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 6,32 persen juga turun menjadi 6,28 persen pada Maret 2023.

Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan turun sebanyak 2,5 ribu orang (dari 127,80 ribu orang pada September 2022 menjadi 125,30 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 600 orang (dari 156,03 orang pada September 2022 menjadi 155,39 ribu orang pada Maret 2023).

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp599.688,-/ kapita / bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp452.478,- (75,45 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp147.210,- (24,55 persen).

Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Jambi memiliki 4,93 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara

rata-rata adalah sebesar Rp2.956.462,-/rumah tangga miskin/bulan.

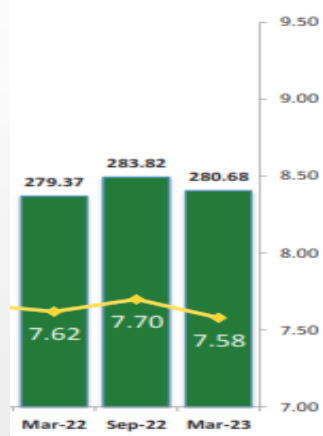
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi, September 2012–Maret 2023

Secara umum, pada periode September 2012–Maret 2023, tingkat kemiskinan di Jambi mengalami kenaikan dari sisi jumlah penduduk miskin, sedangkan persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Pada Maret-September 2015 mengalami kenaikan signifikan baik jumlah maupun persentase, dan seterusnya mengalami penurunan. Pada September 2020 dan Maret 2021 kembali mengalami kenaikan setelah cukup lama melandai.

Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret-September 2015 dipicu oleh dampak kebakaran hutan. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2020 dan Maret 2021 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pada Maret 2023 kembali turun sebagai dampak membaiknya kondisi perekonomian.

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp397.125,00 (74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422,00 (25,85 persen). Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2022 sampai dengan Maret 2023 disajikan pada Gambar berikut ini :

Diagram 3.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2022 - Maret 2023



BPS Provinsi Jambi, 2023

Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Maret 2022–Maret 2023

Jumlah penduduk miskin di Jambi pada Maret 2023 mencapai 280,68 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 3,1 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,31 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 7,58 persen, menurun 0,12 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,04 persen poin terhadap Maret 2022.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022–Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 2,5 ribu orang, dan di perdesaan juga turun sebesar 600 orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 10,48 persen menjadi 10,19 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 6,32 persen menjadi 6,28 persen.

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera Maret 2023

Persentase dan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera pada Maret 2023. Persentase penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung yaitu masing-masing sebesar 14,45 persen, 14,04 persen, 11,78 persen, dan 11,11 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi Bangka Belitung, yaitu sebesar 4,52 persen.

Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Bangka Belitung. Berikut disajikan Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera, Maret 2023.

Tabel 3.7. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera, Maret 2023.

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9.79	16.92	14.45
Sumatera Utara	8.23	8.03	8.15
Sumatera Barat	4.67	7.23	5.95
Riau	6.73	6.65	6.68
Jambi	10.19	6.28	7.58
Sumatera Selatan	11.07	12.21	11.78
Bengkulu	14.21	13.96	14.04
Lampung	8.02	12.65	11.11
Bangka Belitung	3.54	5.85	4.52
Kepulauan Riau	5.05	10.69	5.69
INDONESIA	7.29	12.22	9.36

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Perkembangan Garis Kemiskinan, Maret 2022–Maret 2023

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Berikut disajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2022 sampai dengan Maret 2023.

Tabel 3.8. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2022-Maret 2023

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2022	478.149	157.559	635.708
September 2022	517.739	166.816	684.555
Maret 2023	527.501	171.622	699.123
Perubahan Mar'22–Mar'23(%)	10,32	8,93	9,98
Perubahan Sep'22–Mar'23(%)	1,89	2,88	2,13
Perdesaan			
Maret 2022	380.967	122.845	503.811
September 2022	410.425	130.842	541.267
Maret 2023	417.580	135.140	552.720
Perubahan Mar'22–Mar'23(%)	9,61	10,01	9,71
Perubahan Sep'22–Mar'23(%)	1,74	3,29	2,12
Total			
Maret 2022	411.537	134.333	545.870
September 2022	443.292	142.658	585.950
Maret 2023	452.478	147.210	599.688
Perubahan Mar'22–Mar'23(%)	9,95	9,59	9,86
Perubahan Sep'22–Mar'23(%)	2,07	3,19	2,34

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 adalah sebesar Rp599.688,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,34 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2022, terjadi kenaikan sebesar 9,86 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK Maret 2023 sebesar 75,45 persen.

Pada Maret 2023, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar di perdesaan yakni sebesar 20,06 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 16,61 persen. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar di perdesaan yaitu sebesar 17,61 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 15,10 persen.

Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (5,39 persen di perkotaan dan 3,77 persen di perdesaan), telur ayam ras (4,00 persen di perkotaan dan 3,20 persen di perdesaan), cabe merah (3,93 persen di perkotaan dan 4,00 persen di perdesaan), mie instan (2,86 persen di perkotaan dan 2,19 persen di perdesaan), bawang merah (2,37 persen di perkotaan dan 2,27 persen di perdesaan), gula pasir (2,19 persen di perkotaan dan 2,38 persen di perdesaan), dan seterusnya.

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, dan pakaian jadi perempuan dewasa.

Tabel 3.9. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2023

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	75.45	Makanan	75.55
Beras	16.61	Beras	20.06
Rokok kretek filter	15.10	Rokok kretek filter	17.61
Daging ayam ras	5.39	Cabe merah	4.00
Telur ayam ras	4.00	Daging ayam ras	3.77
Cabe merah	3.93	Telur ayam ras	3.20
Mie instan	2.86	Gula pasir	2.38
Bawang merah	2.37	Bawang merah	2.27
Gula pasir	2.19	Mie instan	2.19
Tongkol/tuna/cakalang	2.16	Cabe rawit	2.02
Kue basah	1.81	Tongkol/tuna/cakalang	1.60
Lainnya	19.03	Lainnya	16.45
Bukan Makanan	24.55	Bukan Makanan	24.45
Perumahan	6.35	Perumahan	7.07
Bensin	4.66	Bensin	5.36
Listrik	3.33	Listrik	2.36
Pendidikan	1.64	Pendidikan	1.15
Perlengkapan mandi	1.09	Perlengkapan mandi	0.96
Air	0.74	Pakaian jadi perempuan dewasa	0.94
Pakaian jadi perempuan dewasa	0.72	Pakaian jadi laki-laki dewasa	0.83
Lainnya	6.02	Lainnya	5.78

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Garis Kemiskinan per Rumah Tangga, Maret 2023

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2023 adalah sebesar Rp2.956.462,-/bulan naik sebesar 6,00 persen dibanding kondisi Maret 2022 yang sebesar Rp2.789.122,-/bulan.

Tabel 3.10. Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin, September 2022–Maret 2023

Tahun	Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/kapita/bulan)	Rata-rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
September 2022	585.950	4,76	2.789.122
Maret 2023	599.688	4,93	2.956.462
Perubahan September 2022–Maret 2023 (%)	2,34	3,57	6,00

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan

memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode September 2022– Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan, sama halnya dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 1,195, naik dibandingkan September 2022 yang sebesar 1,193. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami kenaikan dari 0,237 menjadi 0,287.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,616, sedangkan di perdesaan jauh lebih rendah, yaitu mencapai 0,985. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,368, sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,246.

Tabel 3.11. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2022–Maret 2023

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
Maret 2022	1.673	0.928	1.174
September 2022	1.739	0.923	1.193
Maret 2023	1.616	0.985	1.195
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P₂)			
Maret 2022	0.385	0.199	0.260
September 2022	0.393	0.160	0.237
Maret 2023	0.368	0.246	0.287

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Berbagai Program yang dilakukan secara crosscutting antar peangkat daerah turut mempengaruhi pencapaian penurunan angka kemiskinan. Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

3. Program Peningkatandaya Tarik Destinasi Pariwisata
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Pemberdayaan Sosial
8. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
9. Program Rehabilitasi Sosial
10. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

SASARAN STRATEGIS 3 :

Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar

Indikator Kinerja :

1. RASIO KONEKTIVITAS
2. AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK
3. PERSENTASE DESA/ KELURAHAN YANG MEMILIKI AKSES INTERNET

INDIKATOR KINERJA : RASIO KONEKTIVITAS

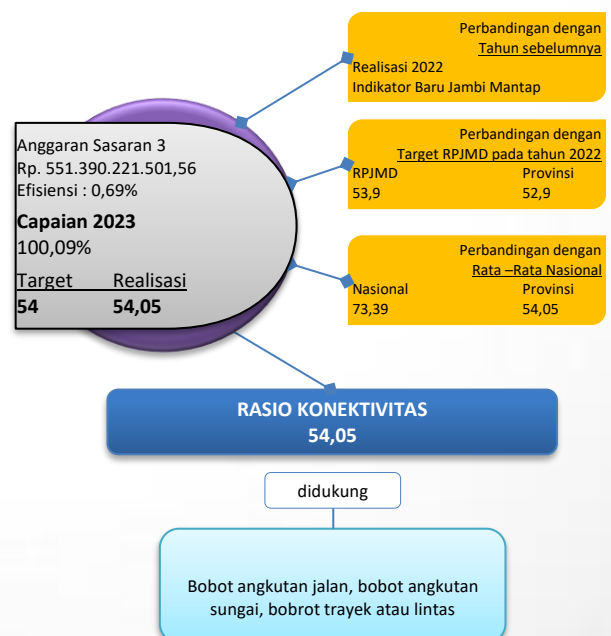
Konektivitas transportasi yang memadai menjadi prasyarat bagi kemajuan dan kualitas bangsa dan negara untuk bisa bersaing dengan negara dan bangsa lain. Sistem dan konektivitas transportasi yang memadai juga dapat meningkatkan devisa dan pendapatan negara, mempermudah alur distribusi barang dan jasa sehingga mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dapat mendistribusikan barang dan jasa lebih efektif dan efisien.

Upaya mengintegrasikan sektor transportasi yang efektif dan efisien terus dilakukan, demikian juga konektivitas transportasi dari satu titik ke

titik yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain.

Di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki provinsi dan luasnya jangkauan wilayah, strategi desain konektivitas transportasi diarahkan pada prioritas konektivitas transportasi yang mendukung pengembangan potensi ekonomi wilayah dan kelancaran logistik.

Dalam sistem transportasi, konektivitas memainkan peran penting dalam sebuah penyelenggaraan transportasi. Konektivitas merupakan satu kesatuan dalam jaringan transportasi yang mengacu pada kerapatan sambungan di jalan atau jaringan jalan dan kelangsungan dalam jaringan tersebut. Apabila konektivitas meningkat, jarak perjalanan menurun dan pilihan rute meningkat atau semakin banyak, sehingga perjalanan lebih mudah dan dapat langsung berpindah cepat antar tujuan dengan sistem yang sudah terbangun.



Rasio Konektivitas Provinsi Jambi mencapai angka 54,05%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 54% maka capaian

kinerja pada indikator ini sebesar 100,09% masuk dalam kategori tinggi.

Terwujudnya konektivitas nasional, regional, dan lokal merupakan dambaan seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Rasio konektivitas diukur dengan rumusan sebagai berikut :

Rasio konektivitas pelayanan angkutan = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot ASDP})$

$$\begin{aligned} IK1 (\text{angkutan jalan}) &= \frac{\text{Jumlah trayek yang dilayani} \times \text{bobot trayek}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek}} \\ &= \frac{(32 \times 0,8)}{47} \\ &= 0,545 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} IK1 (\text{ASDP}) &= \frac{\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi} \times \text{bobot lintas}}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan}} \\ &= \frac{(2 \times 0,8)}{3} \\ &= 0,53 \end{aligned}$$

Maka :

$$\begin{aligned} \text{Rasio konektivitas pelayanan angkutan} &= (0,545 \times 70) + (0,53 \times 30) \\ &= 38,15 + 15,9 \\ &= 54,05 \end{aligned}$$

Bobot angkutan jalan atau ASDP : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot ASDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)

Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{54,05}{54} \times 100\% \\ &= 100,09\% \end{aligned}$$

Sasaran dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas Pelayanan Angkutan ini dicapai melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayanan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
2. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
3. Penerbitan izin usaha untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.

Rasio konektivitas turut didukung oleh pentingnya kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengukuran atas indikator kinerja Kinerja lalu lintas dilakukan dengan cara membandingkan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Adapun hasil pengukuran kinerja lalu lintas angkutan jalan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{VC Rasio di Jalan Provinsi} &= \frac{(\text{VC rasio perkotaan} + \text{VC rasio luar kota})}{2} \\ &= \frac{0,66 + 0,45}{2} \\ &= 0,55 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{0,55}{0,55} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sasaran dengan indikator Kinerja Lalu Lintas dicapai melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Provinsi
2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
3. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi

Pengecekan Kondisi Jalan Nasional Oleh Gubernur Jambi
bersama Bapak Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri PU-PR Republik Indonesia



4. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
7. Peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal type B

Adapun faktor - faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, penertiban dan pengawasan operasional sektor perhubungan baik LLAJ, Sungai, Laut maupun Udara yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sarana prasarana dan sumber daya yang ada; keterbatasan kewenangan Provinsi di sektor perhubungan khususnya perhubungan laut dan udara.
2. Belum tuntasnya proses perencanaan yang berkelanjutan khususnya perencanaan pembangunan jalan kereta api trans sumatera di Provinsi Jambi dan tindak lanjut Penyusunan Master Plan Angkutan Sungai Provinsi Jambi, karena tidak tersedianya alokasi dana.

3. Tingginya tingkat kerusakan jalan akibat overloading karena belum didukung oleh prasarana dan fasilitas pendukung pengawasan angkutan yang sesuai kebutuhan operasional dan standar yang ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja indikator konektivitas tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. Manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, peng mawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis
- b. Kesesuaian penyusunan APBD Provinsi Jambi dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
- c. Kondisi sosial masyarakat Provinsi Jambi yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan tata tertib lalu lintas

Tingkat pencapaian konektivitas yang lebih baik tidak terlepas dari peningkatan kualitas jalan yang semakin baik pula. Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral, karena jika tidak mampu dilaksanakan akan berakibat terhambatnya aktifitas perpindahan barang dan orang. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi

Jambi berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi sampai dengan Tahun 2015 adalah 1129,906 km. Beberapa ruas Jalan provinsi yang telah ditetapkan tersebut merupakan jalan menuju sentra perekonomian dengan total sepanjang 855,589 km.

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas. Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534 / KPTS / M / 2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang.



Aktivitas Perbaikan Jalan Provinsi Jambi

Dalam rangka mewujudkan jalan dalam kondisi mantap, maka penanganan jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2023 difokuskan pada pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan drainase di jalan tersebut. Capaian indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2023 adalah sebesar 78,99%. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 83,23%, maka persentase capaian ini mencapai 94,91% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.



Salah Satu Sudut Kondisi Jalan Provinsi Jambi

Guna mewujudkan capaian di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Program Pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan – kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan.

Terjadinya penurunan jalan provinsi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan infrastruktur. Di awal periode 2023 ini tidak hanya dari segi jalan mantap provinsi saja, tapi juga indikator pendukung lainnya seperti jalan menuju akses sentra produksi yang mendukung program - program prioritas terwujudnya Jambi Mantap 2026.

Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan jalan provinsi dalam kondisi mantap ini yaitu terdiri atas 3 faktor yakni : a) Kemampuan teknis, b) Pengawasan yang baik, c) Matangnya perencanaan.

Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kerusakan jalan yang terjadi tidak serta merta bisa langsung ditangani, namun harus menunggu perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga kondisi jalan yang rusak akan semakin parah.

Selain itu, peningkatan kondisi jalan sedikit mengurangi jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun.

Guna memastikan konektivitas selalu terjaga dengan baik, maka Pemerintah Provinsi Jambi konsisten dengan melakukan berbagai langkah strategis diantaranya :

Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan alat berat sebagai alat tanggap darurat untuk penanganan awal sehingga kerusakan tidak semakin parah menjelang perbaikan dilakukan pada tahun berikutnya.

- a. Meningkatkan kemampuan teknis jalan yang seiring dengan pengawasan yang baik dan perencanaan yang matang.
- b. Selain melakukan perbaikan secara fisik, juga dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan Perkeretaapian
3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4. Program Pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan.

INDIKATOR KINERJA : AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK



Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal

air bersih. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan

Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *universal goals* serta target nasional dan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030.



Dalam rangka mendukung target nasional ini, Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran jangka menengah daerah. Sementara untuk mendukung fokus ketersediaan pangan, salah satu prasarana pendukungnya adalah ketersediaan dan akses terhadap air bersih. Adapun capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih ditunjukkan oleh Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, perkotaan dan perdesaan.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Ilustrasi Ketersediaan Air Minum Layak



Akses air minum layak adalah jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk juga ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang, namun sumber air utama untuk mandi/cuci/dll yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan.

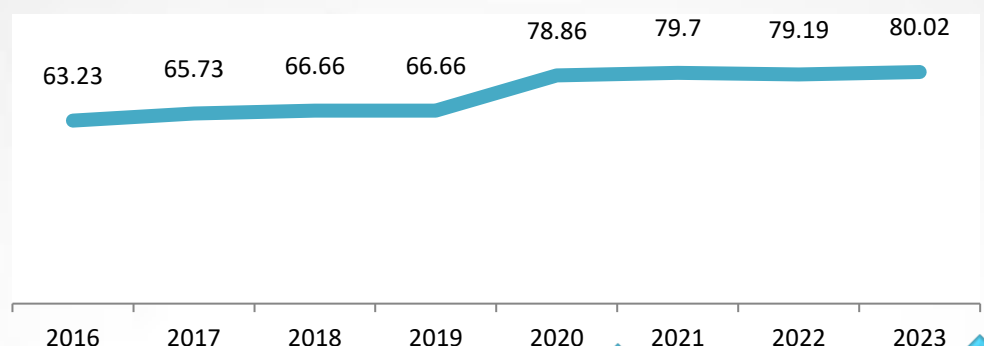
Capaian Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2023 sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :



Pada tahun 2023, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan terealisasi sebesar 80,02 persen. Capaian ini tergolong masih cukup jauh dalam mencapai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 83,92 persen serta terealisasi sebesar 95,35% dengan kriteria sangat tinggi.

Perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah sebesar 80,02%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2022 yakni sebesar 83,92% maka dengan capaian sampai dengan tahun 2022 mencapai 95,35% dan termasuk dalam kategori tinggi.

Grafik 3.3. Perkembangan Capaian Akses Terhadap Air Minum Layak Provinsi Jambi Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi, Dinas PUPR Prov. Jambi 2023, 2024

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

Capaian terhadap akses air minum layak berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.12. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih, Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sumber Air Minum Bersih Clean Drinking Water Source	Akses Air Minum Layak Access to Improved Drinking Water Source
(1)	(2)	(3)
01. Kerinci	67,70	79,25
02. Merangin	49,96	55,90
03. Sarolangun	50,37	71,44
04. Batang Hari	71,05	82,60
05. Muaro Jambi	70,82	73,00
06. Tanjung Jabung Timur	50,91	86,91
07. Tanjung Jabung Barat	46,90	92,04
08. Tebo	71,69	74,76
09. Bungo	73,26	76,02
10. Kota Jambi	90,66	98,41
11. Kota Sungai Penuh	92,00	90,74
Provinsi Jambi	67,47	80,02

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Dinas PUPR Prov. Jambi 2023, 2024

Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Regional, 2023

Provinsi	Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak (Persen)								
	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ACEH	94,34	95,36	95,05	86,03	86,77	86,79	88,79	89,7	89,74
SUMATERA UTARA	96,12	96,1	96,2	84,48	86,99	86,93	90,89	92,13	92,19
SUMATERA BARAT	92,4	93,07	93,75	74,73	77,53	77,41	83,4	85,23	85,59
RIAU	96,21	94,47	95,69	85,45	87,13	86,97	89,76	90,07	90,47
JAMBI	90,08	90,66	91,57	74,84	73,78	74,11	79,7	79,19	80,02
SUMATERA SELATAN	93,26	93,5	93,67	79,89	82,33	83,37	84,7	86,35	87,19
BENGKULU	81,85	83,75	79,33	60,35	67,9	69,84	67,39	73,07	73,08
LAMPUNG	87,5	88,39	91,81	77	78,48	78,29	80,2	81,6	82,78
KEP. BANGKA BELITUNG	77,44	85,62	86,07	68,12	74,82	75,07	73,4	80,96	81,64
KEP. RIAU	92,97	93,12	94,78	64,57	80,88	71,03	90,83	91,82	92,1
DKI JAKARTA	99,86	97,93	99,42	-	-	-	99,86	97,93	99,42
JAWA BARAT	96,1	94,99	96,18	83,94	86,32	85,62	93,24	93,04	93,86

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Dinas PUPR Prov. Jambi 2023, 2024

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi



Permasalahan :

Upaya peningkatan proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menemukan kendala yang berhubungan dengan target cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

Solusi :

Terus melakukan perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten / kota dalam pemenuhan sarana prasarana air bersih sesuai dengan kewenangan masing-masing

INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE DESA / KELURAHAN YANG MEMILIKI AKSES INTERNET



Konektivitas internet saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Konektivitas internet sekarang menjadi hal yang inklusif dibandingkan satu dekade yang lalu.

Pasca pandemi Covid-19 mempercepat penetrasi internet di Indonesia ketika kegiatan perkantoran dan pendidikan banyak dilakukan di rumah, serta masyarakat mengurangi mobilitas di luar rumah. Internet menjadi sarana bagi masyarakat untuk bekerja, berkomunikasi, mendapatkan hiburan, akses pembelajaran, perbankan, kesehatan, bertransaksi dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi internet masih dan akan terus berkembang di luar yang kita bayangkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan populasi yang tinggi dan tersebar.

Program DUMISAKE Gubernur-Wakil Gubernur Jambi Al Haris - Abdullah Sani telah melaksanakan penyediaan akses internet gratis telah dapat dinikmati oleh masyarakat.

Melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tersebut dalam Jambi Cerdas dan Pintar sebagaimana melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi Melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika, Terus Berupaya Menghadirkan Ketersediaan Jaringan Internet Di Seluruh Daerah-daerah Blank Spot. Penyediaan Jaringan Internet Melalui Program Dumisake Untuk Alokasi Tahun 2023 Yang Dimulai Sejak Akhir Bulan Juni Lalu, telah selesai dilaksanakan.



Program Unggulan Jambi Cerdas Dan Pintar Dari Pemerintah ini pada tahun 2023 Berhasil Mengentaskan 80 Desa Di Provinsi Jambi Yang Tidak Memiliki Akses Internet. Penyedia Akses Internet Bagi Masyarakat Itu, Merupakan Lanjutan Penyelesaian Program Pengentasan Blank Spot Yang Tersebar Di 305 Desa Di Provinsi Jambi.

Capaian kinerja Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet dapat dilihat pada gambar berikut :



Dari total 1.562 Desa di Provinsi Jambi, terdapat 305 desa yang dikategorikan un-serve dan secara bertahap telah diberikan layanan internet desa sejak Tahun 2022 lalu sebanyak 125 desa, pada tahun 2023 sebanyak 80 desa, dan pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi akan menuntaskan target kinerja RPJMD dengan

menyambungkan dan memberi layanan pada 100 desa sebagai penutup program internet desa.

Pada Tahun 2022 Kominfo Mencatat, Sudah Berhasil Menyambungkan Jaringan Internet Untuk 125 Desa Blank Spot Yang Tersebar Di Sejumlah Daerah. Sementara Untuk Penyambungan 100 Desa Lainnya, Akan Dilanjutkan Pada Tahun 2024 Sesuai Target Penyelesaian Termasuk Tambahan Pembangunan Jaringan Repeater.

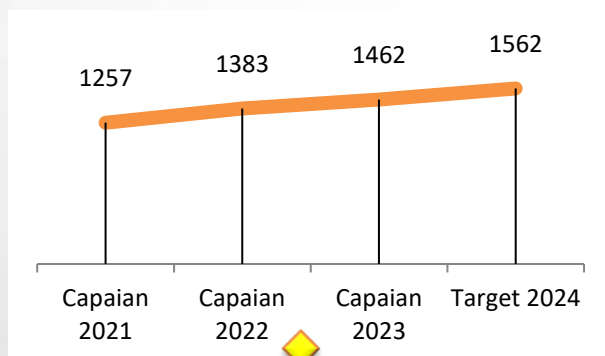
Upaya pengentasan blank spot di wilayah Provinsi Jambi, dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah, melalui kemudahan akses internet.

Awalnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan uji coba di 4 kabupaten dan Desa yang memang prioritas yang siap mendukung program ini dari Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan sebagian lagi dilaksanakan. Selama proses pengerjaan tidak terdapat persoalan yang menjadi kendala, melainkan hanya sedikit memakan waktu, karena jarak tempuh dan rute-rute menuju ke pelosok desa. Rute itu kadang harus nyeberang sungai, tetapi sejauh ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tersedianya akses internet sampai dengan ke pelosok Desa, ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Desa menjadi Desa Mandiri dan cepat mendapatkan informasi informasi terkini sehingga dapat mendorong perekonomian.

Azaz manfaat nya program ini sangat banyak, salah satu nya mendukung Desa itu supaya maju. Karena dengan berdirinya ini Desa akan mandiri tentu akan meningkatkan perekonomian bagi UMKM, nanti masyarakat di desa juga bisa membuat website.

Grafik 3.4. Trend Peningkatan Internet Desa



SASARAN STRATEGIS 4 :

Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar

Indikator Kinerja :

1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
2. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) BERBASIS LAHAN

INDIKATOR KINERJA :

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP



Kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk.

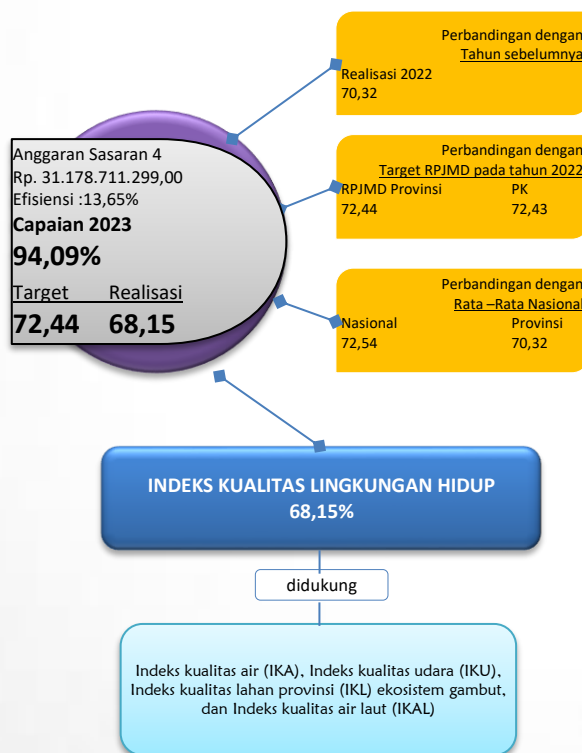
Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut.

Berbagai isu strategis lingkungan hidup di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.

2. Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
3. Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
 - a. Masih besarnya jumlah timbulan sampah
 - b. Meningkatnya limbah medis
 - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal

Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :



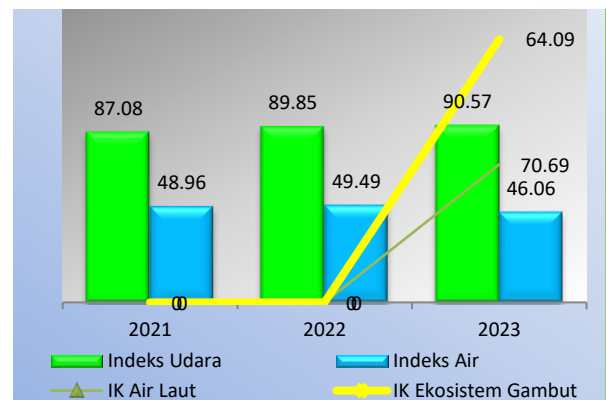
Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa indikator pendukung antara lain : Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas lahan provinsi (IKL)

ekosistem gambut, dan Indeks kualitas air laut (IKAL).



Gambaran capaian kinerja pendukung Indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Diagram 3.5. Capaian Kinerja Pendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



SUMBER : DINAS LINGKUNGAN HIDUP, 2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintroduksi sejak tahun 2009. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Konsep ini merupakan penerapan konsep Environmental Performance Index (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk

menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Sejak dua tahun terakhir, metode dan parameter yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP), selain itu, terdapat penambahan komponen baru yaitu IKEG dan IKAL. Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan TSS. Untuk Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2.5}$. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

INDEKS KUALITAS UDARA

Indeks Kualitas Udara (IKU) menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara adalah gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum, parameter tersebut yakni kadar Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2).

Indeks kualitas udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponengas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Pada tahun 2023, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambient dengan metode Passive Sampler yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman



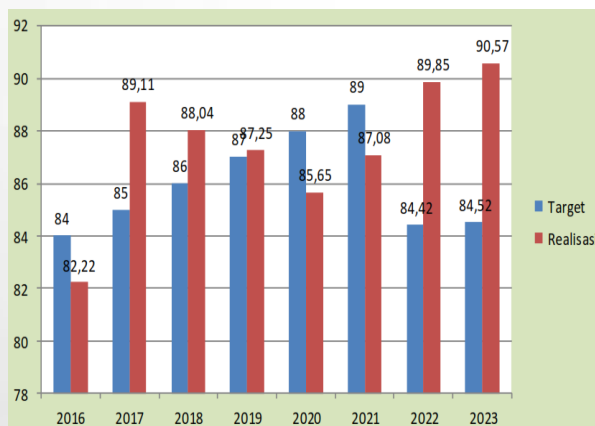
dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter yang diuji dengan metode ini terbatas pada parameter NO₂, SO₂ dan PM_{2.5}.

Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter NO₂, SO₂ dan PM_{2.5} semakin baik.

Hasil pengolahan data dan perhitungan IKU Provinsi Jambi tahun 2023 adalah 90,57 sedangkan target tahun 2022 ditetapkan sebesar 84,52 sehingga capaian kinerjanya mencapai 107,15%. Berdasarkan kategori IKU, bahwa nilai IKU 90,57 mengandung arti kualitas udara Provinsi Jambi berada dalam kategori “sangat baik” ($90 \leq X < 100$). Tren IKU Provinsi mengalami peningkatan sejak tahun 2016-2023. Tahun 2023 nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi karena turunnya konsentrasi NO₂ dan SO₂ di kabupaten/kota. Nilai IKU ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu 89,85.

Tren IKU Provinsi mengalami peningkatan sejak tahun 2016 - 2023. Tahun 2023 nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi karena turunnya konsentrasi NO₂ dan SO₂ di kabupaten/kota.

Diagram 3.6. Indeks Kualitas Udara Provinsi Jambi



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2023, 2024

Hal ini merupakan dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri) dan penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan dan sebagainya.

Berdasarkan grafik terlihat nilai Indeks Kualitas Udara dari tahun 2016 hingga tahun 2023 lebih berfluktuatif. Provinsi Jambi telah melaksanakan amanat undang-undang maupun peraturan perundangan dibawahnya terkait pengendalian pencemaran udara dengan melakukan berbagai program kegiatan sebagai berikut :

1. Tindakan Persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara, diantaranya :
 - a. Pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya;
 - b. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan melalui PROPER;
 - c. Penghargaan Kalpataru bagi pelestari dan penyelamat lingkungan;
 - d. Program Adiwiyata dan Program Kampung Iklim
 - e. Pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan industri seperti PROPER oleh KLHK Kinerja pengelolaan lingkungan industri, termasuk didalamnya aspek Pengendalian Pencemaran Udara meningkat dari tahun ke tahun yang tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi Jambi.
2. Tindakan Represif berupa pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
3. Pemantauan rutin kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain :

- a. Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di 11 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 4 titik yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran;
- b. Melakukan pemantauan kegiatan terhadap industri yang memenuhi baku mutu emisi.

Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metoda Passive Sampler dengan parameter yang diukur SO₂ dan NO₂. Pengukuran dilakukan dalam 2 tahap di 4 titik pemantauan pada 11 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga turut melakukan pemantauan kualitas udara, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri LHK Nomor SE.4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Pemantauan udara dengan menggunakan AQMS, parameter yang dipantau adalah PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, NO₂, O₃, HC, dan CO. Data yang diterima dari stasiun pemantau kualitas udara, diolah menjadi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di ruang kendali AQMS (main center), kemudian dikirim ke display indoor dan outdoor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai IKU ini antara lain :

1. Dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri) ;
2. Dampak dari penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan, pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan dan sebagainya;
3. Faktor meteorologi seperti arah angin, kecepatan angin dan jumlah hari hujan di suatu daerah, serta waktu pengambilan sampel (musim penghujan atau musim kemarau) dan durasi serta frekuensi pengambilan sampel untuk tambahan data dari daerah.

Rekomendasi pengendalian pencemaran udara untuk mempertahankan atau meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU), antara lain :

1. Penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan yang bersumber dari APBD untuk menambah jumlah data dan lokasi pemantauan
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM untuk meningkatkan kemampuan teknis
3. Membuat program kegiatan inovasi

INDEKS KUALITAS AIR

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.



Salah Satu Sudut Tampilan Kondisi Sungai Batang Hari

Sehubungan dengan peranan tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas air adalah gambaran kualitas air di suatu wilayah dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman tersebut menjelaskan penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index – PI).

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks

pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Hasil pemantauan kualitas air Provinsi Jambi Tahun 2023 dari data hasil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan sumber dana APBD diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14. Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Batanghari Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2023

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	9	38%	70	26,25
Ringan	14	58%	50	29,17
Sedang	1	4%	30	1,25
Berat	0	0%	10	0,00
Total	24			
Indeks Kualitas Air				56,67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Tabel 3.15. Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Pengabuan di Provinsi Jambi TA.2023

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	1	17%	70	11,67
Ringan	5	83%	50	41,67
Sedang	0	0%	30	0,00
Berat	0	0%	10	0,00
Total	6			
Indeks Kualitas Air				53,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Hasil perhitungan pemantauan air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhadap 12 titik sungai Batanghari memperoleh indeks kualitas air (IKA) sebesar 56,67, dan 3 titik Sungai Pengabuan memperoleh indeks kualitas air sebesar 53,33.

Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2023 sebesar 46,06, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 (49,49) sebesar 3,43 poin (6, 93%). Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2023 belum mencapai

target apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2023 sebesar 61,29.

Tabel 3.16. Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2023

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	10	33%	70	23,33
Ringan	19	63%	50	31,67
Sedang	1	3%	30	1,00
Berat	0	0%	10	0,00
Total	30			
Indeks Kualitas Air				56,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Hasil perhitungan data indeks kualitas air tahun 2023 untuk 15 titik yang dilakukan sebesar 56,00. Namun, setelah digabung dengan data KLHK, maka indeks kualitas air Provinsi Jambi sebesar 46,06.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKA tahun 2023 belum mencapai target antara lain :

- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga (domestik)
- Deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi
- Tingkat kekeruhan air disebabkan berkurangnya tutupan lahan di sekitar badan sungai dan adanya aktivitas penambangan liar (PETI).



Aktivitas PETI Berdampak pada Kualitas Air Sungai Batang Hari

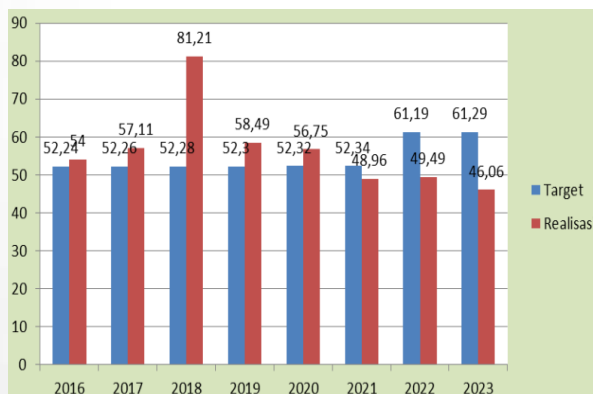


Kerusakan Daerah Aliran Sungai
Akibat PETI

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut.

Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Diagram 3.7. Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Kecenderungan penurunan kualitas air dari tahun 2019 perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air.

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya, yaitu :

1. memantau kualitas air sungai di 15 titik pantau (APBD) dan 16 titik pantau (APBN)
2. memantau usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah.
3. menginisiasi Gerakan Sungai Batanghari Bersih yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten/Kota
4. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sesuai dengan kewenangan sebagai komitmen untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran terhadap Sungai Batanghari.
5. menyusun draft baku mutu kualitas air sebagai salah satu upaya kebijakan yang diambil untuk mengendalikan pencemaran air.

Rekomendasi pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), antara lain :

1. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air
2. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik
5. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air, dan
6. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

INDEKS KUALITAS AIR LAUT

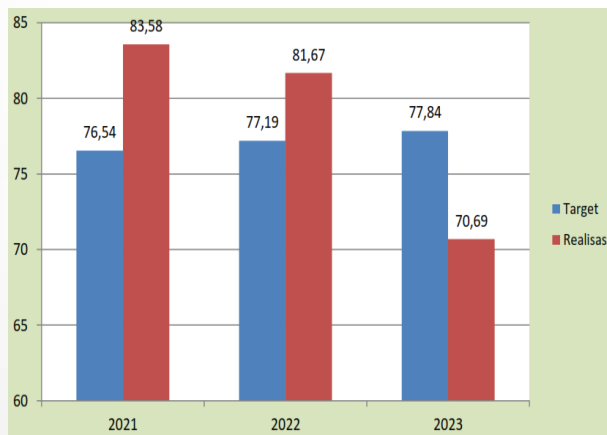
Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah

membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah.

Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu TSS, DO, N-NH3, Po4-P, Minyak dan Lemak. Perhitungan IKAL menggunakan data yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air laut yang mewakili lokasi pemantauan biota air, kawasan pelabuhan dan wisata bahari. Nilai IKAL dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

Diagram 3.8. Perbandingan Target IKAL dengan RPJMD



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2022

Capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar 70,69 poin dan belum mencapai target tahun ini yakni 77,84 poin. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 10,99 poin dari 81,67 pada tahun 2022 menjadi 70,69 pada tahun 2023. Artinya, terjadi penurunan kualitas air laut di

Provinsi Jambi meskipun nilai ini sudah di atas target RPJMD 2021-2026.

Upaya pengendalian pencemaran air laut dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni :

1. melakukan pemantauan sampah laut
2. melakukan pemantauan izin pembuangan air limbah ke laut

INDEKS KUALITAS EKOSISTEM GAMBUT

Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia. Gambut memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Gambut mampu menampung hingga 30 persen jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar.

Kriteria kerusakan ekosistem gambut dalam PP nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu :

1. Fungsi Lindung :
 - a. Terdapat drainase buatan
 - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
 - c. Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
2. Fungsi Budidaya :
 - a. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter dibawah permukaan gambut pada titik penaatan
 - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
 - c. Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
3. Fungsi Budidaya :
 - a. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penaatan

- b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

Tabel 3.17. Capaian Kinerja 2021-2023 (IKEG)

Tahun	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	
	Target	Realisasi
2021	73,39	71,10
2022	73,89	71,10
2023	74,39	64,09

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi



Monev Pemantauan Kebakaran Hutan/Lahan

Pembobotan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) , yaitu :

1. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (60%)
2. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (40%)

Cara Perhitungan Nilai IKEG yakni :

$$\text{IKEG} = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$$

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang di dalamnya terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) yang mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan. Khusus untuk ekosistem gambut, dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

Penurunan kualitas ekosistem gambut terjadi antara lain terdapat penambahan kanal artifisial di luar areal dan luasan tutupan lahan. Perbaikan kualitas ekosistem gambut terjadi karena

penggunaan hasil inventarisasi skala 1:50.000 sehingga terdapat perubahan status dari Fungsi Lindung menjadi Fungsi Budidaya, dan penambahan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) baru yang berkontribusi terhadap luasan perbaikan. Perhitungan IKEG belum memasukan komponen intervensi pemulihan yang telah dilakukan, baik melalui perbaikan tata kelola air dan rehabilitasi revegetasi, baik di lokasi konsesi maupun di APL, yang selanjutnya akan dievaluasi melalui Indeks Respons Kinerja Daerah (IRKD).

Upaya peningkatan nilai IKEG yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi meliputi :

1. Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) sesuai dengan Permen LHK No. P.60 / MENLHK/ SETJEN / KUM.1 / 10 / 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terdiri dari :
 - a. Rencana Pemanfaatan
 - b. Rencana Pengendalian (Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan)
 - c. Rencana Pemeliharaan (Pencadangan dan Pelestarian)
2. Desa Mandiri Peduli Gambut, proyek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.

Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, pada tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,12 poin dibanding tahun sebelumnya.

Nilai IKLH Indonesia sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 terus meningkat. Berturut-turut nilainya 70,27; 71,45; 72,42 dan tahun ini sebesar 72,54 poin. Jika dilihat per media lingkungan, kenaikan nilai IKLH Indonesia pada tahun ini disebabkan kenaikan nilai Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air, meskipun Indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Kualitas Lahan Gambut berfluktuasi dengan tahun lalu, tidak terlalu berpengaruh terhadap agregat nilai IKLH.

Perhitungan nilai IKLH Indonesia Tahun 2023 diperoleh dari 7.331 lokasi pemantauan kualitas air, 3.076 lokasi pemantauan kualitas udara, dan 970 lokasi pemantauan kualitas air laut di seluruh Indonesia. Sementara itu, 514 data pemantauan kualitas tutupan lahan diperoleh dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam kerangka DPSIR (driving force (faktor pendorong), pressure (tekanan), state (keadaan), impact (dampaknya) dan response), variabel state sudah diukur melalui IKLH. Variabel lainnya yang tak kalah penting adalah respon yang menggambarkan kapasitas daerah untuk memitigasi faktor pendorong, tekanan, dan dampaknya.

Sejak tahun 2021 sudah dikembangkan Indeks Respon Kinerja Daerah yang memotret kapasitas daerah dalam menyusun kebijakan dan peraturan, struktur dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, alokasi anggaran, implementasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, penyebaran informasi, serta inovasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dicapai melalui program berikut ini :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan

INDIKATOR KINERJA : PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) BERBASIS LAHAN



Hutan adalah sumberdaya alam yang multifungsi. Dalam kaitannya dengan efek pemanasan global hutan mengurangi kadar CO₂ di udara dan memperangkapnya dalam bentuk biomassa hutan. Hutan klimaks ada dalam keseimbangan dinamik yang tidak lagi berfungsi mengurangi kadar CO₂. Jika dilakukan penebangan dengan cara yang benar, misalnya dengan tebang pilih yang mengikuti aturan, kerusakan yang terjadi adalah minimum. Pohon ditempat yang ditebang itu dipicu untuk tumbuh. Nisbah fotosintesis dan respirasi (P/R) naik sampai tercapai lagi keseimbangan. Oleh karena itu, jika penebangan dilakukan dengan baik akan menguntungkan dalam usaha penangkalan pemanasan global.

Reboisasi dan penghijauan dengan membuat hutan tanaman dengan jenis yang tumbuh cepat, penyerapan CO₂ akan berjalan cepat. Karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan tanaman akan lebih besar daripada biomassa dalam hutan yang rusak. Apabila hutan yang rusak itu telah menjadi padang rumput. Dengan demikian hutan tanaman itu akan membantu dalam penurunan kadar CO₂ di udara. Akan tetapi pada umumnya biomassa hutan tanaman itu lebih rendah jumlah karbon yang tersimpan dalam hutan alam primer yang semula ada di tempat tersebut. Dengan demikian hutan tanaman sulit untuk dapat sepenuhnya mengembalikan kadar CO₂ udara pada tingkat seperti hutan klimaks, walaupun diproduksi bahan awet dari hutan tanaman. Apabila hutan tanaman dapat mengalihkan para peladang menjadi non-peladang, hutan yang

rusak yang semula dipakai untuk perladangan akan dapat pulih secara alamiah.

Berdasarkan perhitungan dan analisis Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) 2010 terhadap pertumbuhan emisi dan mitigasi bahwa dalam skenario bisnis seperti biasa/business As Usual, Provinsi Jambi akan menjadi kontributor emisi gas rumah kaca yang signifikan di Indonesia sampai tahun 2030. Selanjutnya diterangkan Emisi bersih GRK tahunan Jambi pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 57 MtCO₂e¹— setara dengan sekitar 3 persen dari total emisi Indonesia. Gambut dan Land Use and Land Use Change Forest (LULUCF) sejauh ini adalah kontributor emisi terbesar terhadap emisi Provinsi Jambi, mewakili 85 persen dari total emisi provinsi. Apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor beremisi tinggi, emisi netto Jambi diperkirakan akan meningkat hingga 30 persen antara tahun 2005 dan 2030 dari 57 Mt CO₂e menjadi 74 MtCO₂e.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Cq. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim) bekerja sama dengan World Bank dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sedang mengembangkan kegiatan REDD+ dengan skema Result Based Payment melalui kegiatan *Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape* (BioCF ISFL) – Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP). Kegiatan ini didukung pendanaan multilateral, yang dikelola oleh World Bank sebagai *trustee*.

Program ini bertujuan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan dan praktek penggunaan lahan yang lebih baik melalui kegiatan REDD+. Kegiatan BioCF ISFL terdiri dari tiga fase yaitu fase persiapan (tahun 2019 – 2021), *Fase pre investment* 2021 – 2025) dan *Fase Result Based Payment* (2021 - 2025).

Saat ini proyek dimaksud dalam masa pre Investment untuk mendukung dan memperkuat kelembagaan, menyusun kebijakan dan intervensi penerapan pengelolaan lahan berkelanjutan untuk menurunkan emisi termasuk prioritas manfaat non karbon, perlindungan keanekaragaman hayati dan kegiatan ekosistem lainnya, meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat, mengurangi

konflik tenurial dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pengembangan kerangka kerja penurunan emisi termasuk pembagian manfaat di Provinsi Jambi.



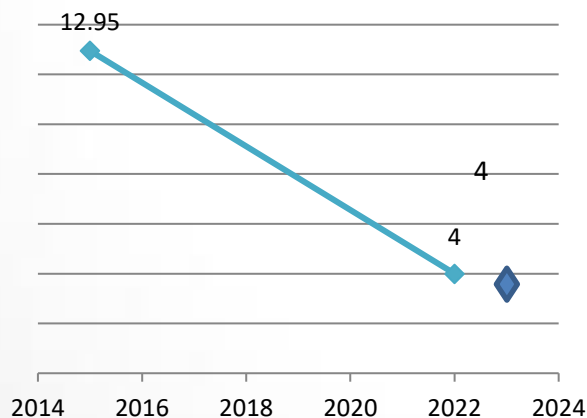
Salah satu dokumen menjadi syarat negosiasi *Emission Reduction Payment Agreement* (ERPA) adalah dokumen *Emission Reduction Program Document* (ERPD) yang saat ini sedang dalam tahap validasi oleh World Bank. Dalam rangka memenuhi kelengkapan ERPD diperlukan penyiapan dokumen dan merupakan syarat implementasi REDD+ yaitu pelaksanaan mekanisme perlindungan atau pengamanan (safeguard) untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul dalam implementasi program.

Konsep perlindungan atau pengamanan ini mencakup berbagai isu diantaranya adalah transparansi struktur pengelolaan hutan nasional, partisipasi berbagai pihak, penghormatan terhadap pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, konservasi keaneka- ragaman hayati dan hutan alam, perpindahan emisi dan resiko balik dari penurunan emisi. Oleh karenanya, di tahap ini BioCF-ISFL saat ini, salah satu kegiatan utama yang akan dilakukan adalah memfinalkan dokumen safeguards yang diperlukan untuk mengelola semua dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh implementasi proyek BioCF-ISFL di Provinsi Jambi. Safeguard documents

yang dimaksud terdiri dari Strategic Environmental and Social Assessment (SESA), Environmental and Social Management Framework (ESMF) termasuk dokumen Indigenous People Planning Framework (IPPF), Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), dan Resettlement Planning Framework and Process Framework (RPF-PF) serta dokumen *Feedback and Grievance Redress Mechanism* (FGRM) dan Stakeholder Engagement Plan (SEP).

Dokumen ini dipergunakan untuk memastikan bahwa program yang dituangkan dalam dokumen dimaksud tidak memberikan resiko yang tinggi terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sehubungan hal tersebut Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bermaksud untuk mempublikasikan dokumen-dokumen Safeguard dimana dokumen dimaksud telah mendapatkan masukan dan input dari stakeholder melalui Konsultasi Publik di Provinsi Jambi pada 5 Desember 2019 dan berbagai konsultasi dengan para stakeholder di Provinsi Jambi selama kegiatan tahun 2019 – 2023.

Grafik 3.5. Trend Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2023

Dalam rangka penurunan emisi GRK, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan langkah-langkah strategis dengan memonitor dan optimalisasi capaian sasaran-sasaran jangka menengah pendukungnya antara lain:

Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya dengan

indikator kinerjanya yakni persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya.

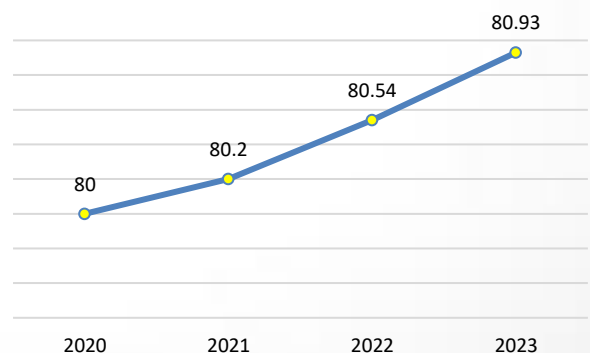
Sasaran ini dicapai melalui program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On Internasional Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi.⁸⁰



Grafik 3.6. Peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya



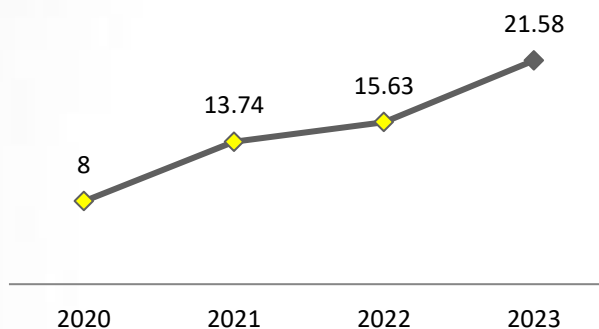
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2023, 2024

Selain pemulihan dan perlindungan SDA hayati beserta ekosistemnya, turut pula diintervensi upaya Peningkatan Pemanfaatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal. Sasaran ini dicapai

melalui program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Pada tahun 2023, peningkatan pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal mencapai angka 21,58%. Capaian luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.7. Luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola Masyarakat secara Optimal



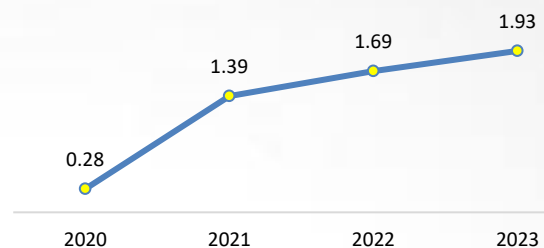
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2023

Upaya strategis turut pula dilakukan guna menekan angka emisi *carbon*. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan perluasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII

Capaian luasan tutupan lahan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.8. Persentase Luas Tanam Lahan kritis 2017 - 2023



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2023

Tingginya capaian pada sasaran meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi dikarenakan capaian penanaman pada tahun sebelumnya melebihi target yang didukung oleh kegiatan kompensasi pinjam pakai Kawasan yang pembinaan dan monitoringnya didanai dari APBD Provinsi.

Capaian penurunan lahan kritis terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 sebesar 1,93% dari target yang ditetapkan karena terjadi peningkatan luas penanaman lahan kritis dengan biaya yang ditanggung oleh pemegang IUPKH sebagai kompensasi pinjam pakai kawasan hutan.



Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- Minimnya anggaran yang disediakan
- Kurangnya Jumlah personil pengamanan (polhut) dan brigade kebakaran
- Kurangnya sarana dan prasarana

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan kerusakan kawasan hutan serta illegal pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan melibatkan instansi atau pihak lain diluar Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Kepolisian, Kejaksaan, Manggala Agni dan Instansi-Instansi vertikal lainnya).
2. Komitmen pemegang izin dalam memenuhi kewajibannya terhadap PNPB PSDH dan Dana Reboisasi.

Upaya peningkatan karbon terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi, pada tahun 2023 Gubernur Jambi ditunjuk menjadi pembicara pada kegiatan The Twenty Eight Conference of Parties The United Nation Framework Convention on Climate Change di Dubai, Uni Emirates Arab (COP28 UEA) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI)

Penunjukkan tersebut dalam rangka implementasi Surat Keputusan KLHK Nomor SK: 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Inonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU)

Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Dalam pemaparannya “Strengtening of Sub National Policies as the Real Action for Reducing Emission Greenhouse Gas in FOLU Sectors”, Gubernur Jambi menyampaikan strategi Pemerintah Provinsi Jambi yang terus fokus pada upaya dan intervensi penurunan emisi gas rumah kaca.

Jambi mempunyai ekosistem hutan dan lahan yang paling lengkap di Pulau Sumatera. Pemerintah Provinsi Jambi beserta Kabupaten/Kota mempunyai komitmen yang kuat dan mempunyai kelembagaan REDD+, serta konsistensi pada kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, konflik, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Kelembagaan.

Provinsi Jambi memiliki prioritas REDD+ yang mempunyai progres dalam penyiapan perangkat, inisiatif dan kolaborasi intervensi perencanaan lintas sektor, sehingga Jambi menjadi salah satu provinsi yang berkomitmen untuk mengurangi tingkat deforestasi tinggi, degradasi hutan dan lahan.

Provinsi Jambi memiliki 3 pilar strategi pertumbuhan ekonomi hijau. Pertama, penggunaan tata guna lahan berkelanjutan,



Gubernur Jambi menjadi Pembicara pada kegiatan The Twenty Eight Conference of Parties The United Nation Framework Convention on Climate Change di Dubai, Uni Emirates Arab (COP28 UEA) 2023

pemulihan dan peningkatan produktivitas. Kedua, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses modal pembangunan dan mata pencaharian serta pemanfaatan jasa lingkungan. Terakhir, konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan.

Sehingga, target yang ingin dicapai dari strategi tersebut yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; pertumbuhan yang inklusif dan adil; ketahanan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; ekosistem yang sehat dan produktif sebagai penyedia jasa lingkungan; dan penurunan efek gas rumah kaca.

Selain itu masyarakat lebih sejahtera dengan lingkungan yang baik, pendapatan masyarakat lebih tinggi, pertanian yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta hutan yang lestari berdampak pada implementasi perhutanan sosial dan masyarakat hukum adat yang lebih baik dan sejahtera.

Kemudian dalam rangka mendukung pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yaitu target penurunan emisi gas rumah kaca, Provinsi Jambi melalui Program/aksi Nyata Penurunan Emisi salah satunya Program J-SLMP BioCF-ISFL, telah disinergikan ke dalam Perencanaan Jangka Panjang (RPJP dan RTRW),

Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026).

Provinsi Jambi tetap konsisten dengan program dan kegiatan yang diimplementasikan melalui Perangkat daerah, Mitra Kerja Daerah, Private Sector dan Kelompok Masyarakat dalam upaya pemenuhan target Penurunan Emisi GRK Provinsi Jambi dan tujuan akhirnya berkontribusi pada penurunan emisi GRK Indonesia serta memberikan dampak kesejahteraan masyarakat," tambah Al Haris.

Untuk itu, diperlukan dukungan strategis pencapaian target optimal penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Jambi yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut : pertama meningkatkan supporting pembiayaan dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Provinsi Jambi; kedua kolaborasi program dan kegiatan dalam mendukung perlindungan ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati melalui peran multi pihak.

Provinsi Jambi telah mempersiapkan Dokumen Grand Growth Planning (GGP) sebagai pedoman intervensi kegiatan dalam mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan



peningkatan perekonomian di tingkat tapak; mendorong program-program yang berkaitan dengan pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Jambi; meningkatkan peran kelembagaan perubahan iklim lintas sektor yang didukung oleh Lembaga-Lembaga Donor Internasional; terakhir mendukung kebijakan Provinsi Jambi dalam membangun Kebijakan Satu Peta.

Provinsi Jambi secara geografis terdiri dari dataran tinggi, menengah dan rendah yang terbentang dari barat ke timur, secara ekologis memiliki empat taman nasional dengan luas kawasan hutan seluas lebih dari 2.098.535 hektar atau sekitar 45 persen. Dengan cukup luas dan kompleksnya kawasan hutan di Provinsi Jambi tersebut serta tingginya deforestasi yang terjadi, maka Provinsi Jambi berkomitmen dan fokus untuk melakukan intervensi perubahan iklim, salah satunya dengan adanya kelembagaan REDD+, dan melakukan kebijakan pencegahan upaya kebakaran hutan dan lahan, penanganan konflik serta Pola Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.

Dalam melakukan intervensi penurunan emisi daerah Gas Rumah Kaca (GRK), Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan penyusunan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang diintegrasikan dengan pembangunan rendah karbon yang merupakan salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga, Provinsi Jambi dengan dukungan lembaga non pemerintah telah menyusun Masterplan (Rencana Induk) Peta Jalan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi Tahun 2021-2045, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan) Provinsi Jambi.

Dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional, hal ini menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengimplementasikan Program BioCF-ISFL dan kontribusi para pihak dalam pembiayaan program penurunan emisi GRK, dimana Program BioCF ISFL Provinsi Jambi Tahun 2022-2025

merupakan dana hibah dari World Bank (Bank Dunia).

Saat ini, program BioCF-ISFL kita telah memasuki tahapan Pra-Investasi dengan menggunakan metode On Granting dalam menghasilkan manfaat Penurunan Emisi dengan manfaat yang diperoleh tidak hanya berkontribusi bagi lingkungan tetapi juga bagi masyarakat, sehingga nantinya target pertumbuhan ekonomi Hijau Provinsi Jambi dapat tercapai dan terwujud.

SASARAN STRATEGIS 5 :

Menurunnya Tingkat Pengangguran
Indikator Kinerja :

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

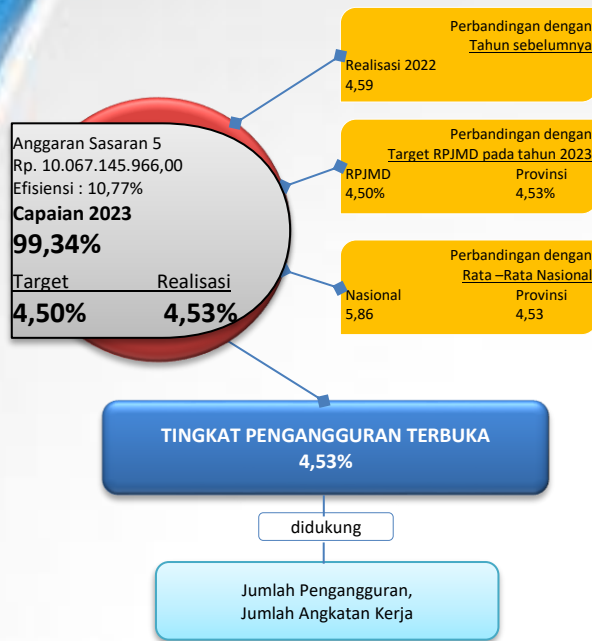
INDIKATOR KINERJA :

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.

Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran terbuka, capaian pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Jumlah angkatan kerja di Jambi Agustus 2023 sebanyak 1,89 juta orang, bertambah 3,6 ribu orang dibanding Agustus 2022 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,75 persen atau naik 0,9 poin.

Penduduk bekerja sebanyak 1,8 juta orang, meningkat sebanyak 4,4 ribu orang dari Agustus 2022. Jika dibandingkan dengan Agustus 2022, sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah pertanian (turun 2,77 persen poin), sedangkan sektor yang mengalami kenaikan terbesar adalah administrasi pemerintahan (naik 1,25 persen poin).

Sebanyak 1,08 juta orang (60 persen) penduduk bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal turun sebesar 0,25 persen poin dibanding Agustus 2022.

Dalam setahun terakhir persentase pekerja setengah pengangguran naik sebesar 1,8 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu naik 0,72 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,53 persen turun 0,06 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

PENDUDUK USIA KERJA DAN ANGKATAN KERJA

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 2,75 juta

orang, turun sebanyak 31,8 ribu jika dibanding Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1,89 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 858 ribu orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 1,8 juta orang penduduk yang bekerja dan 85,58 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 3,56 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 4,4 ribu sementara pengangguran turun sebanyak 0,88 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 68,75 persen, naik 0,9 persen poin dibanding Agustus 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tabel 3.18. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021—Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
	juta orang	juta orang	juta orang
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	2,74	2,78	2,75
Angkatan Kerja	1,84	1,88	1,89
- Bekerja	1,75	1,80	1,80
- Pengangguran	0,09	0,09	0,09
Bukan Angkatan Kerja	0,90	0,89	0,86
	persen	persen	persen
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,17	67,84	68,75
- Laki-Laki	83,91	86,17	85,27
- Perempuan	49,89	48,97	51,68

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023 TPAK laki-laki sebesar 85,27 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 51,68 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,9 persen poin, sedangkan TPAK perempuan naik sebesar 2,71 persen poin.

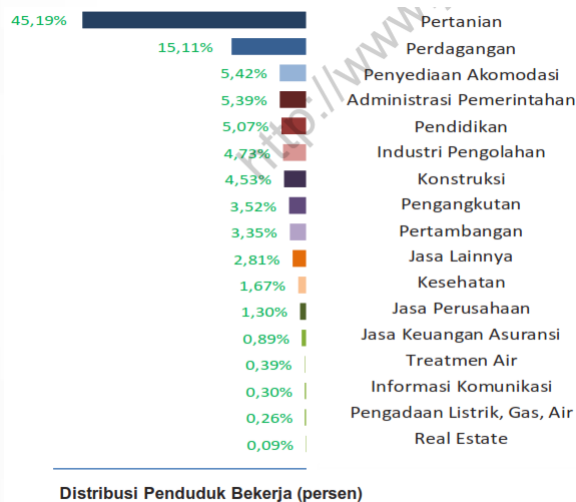
KARAKTERISTIK PENDUDUK YANG BEKERJA

Karakteristik Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Diagram 3.9. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2023



Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 45,19 persen, Perdagangan besar dan eceran sebesar 15,11 persen dan Penyediaan akomodasi makan minum sebesar 5,42 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini hampir sama dengan Agustus 2022.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan

struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 45,19 persen, Perdagangan besar dan eceran sebesar 15,11 persen dan Penyediaan akomodasi makan minum sebesar 5,42 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini hampir sama dengan Agustus 2022.

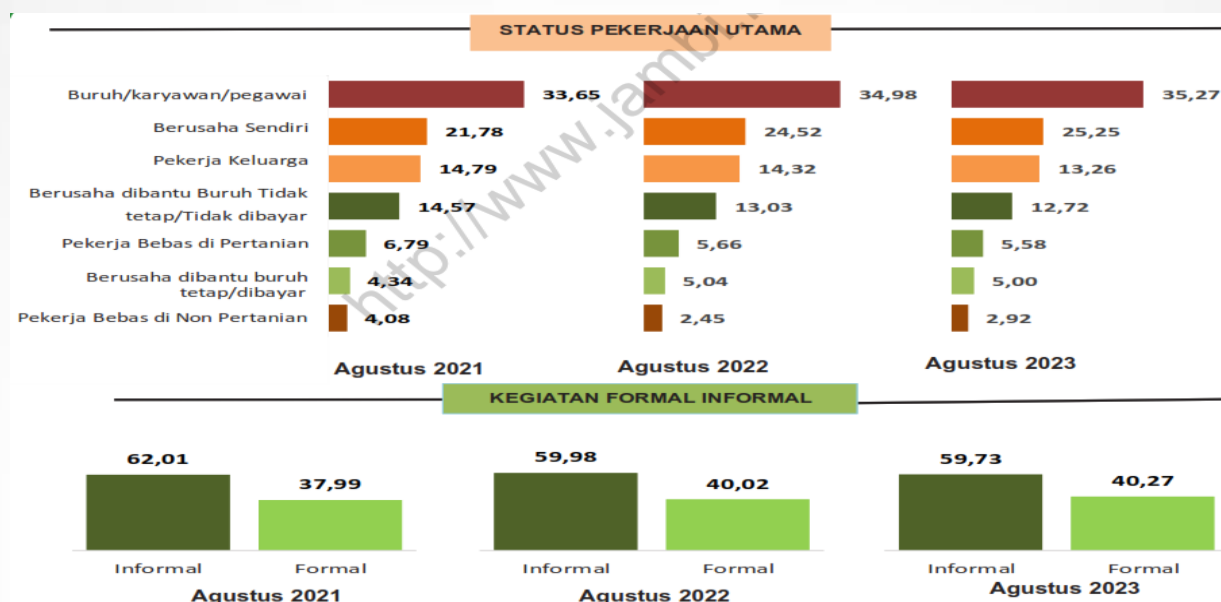
Dibandingkan Agustus 2022, hampir semua lapangan pekerjaan mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada lapangan pekerjaan Administrasi pemerintahan (22,7 ribu orang), perdagangan besar (11,79 ribu orang), Penyediaan akomodasi dan makan minum (6,8 ribu orang). Sementara lapangan pekerjaan Pertanian turun sebesar 47,9 ribu orang, industri pengolahan turun dibandingkan Agustus 2022, hampir semua lapangan pekerjaan mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada lapangan pekerjaan Administrasi pemerintahan (22,7 ribu orang), Perdagangan besar (11,79 ribu orang), Penyediaan akomodasi dan makan minum (6,8 ribu orang). Sementara lapangan pekerjaan Pertanian turun sebesar 47,9 ribu orang, industri pengolahan turun sebesar 9,2 ribu orang dan konstruksi turun sebesar 3,7 ribu orang.

Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pada Agustus 2023 penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/ karyawan/ pegawai yaitu sebesar 35,27 persen, sementara yang paling kecil adalah pekerja bebas di non pertanian sebesar 2,92 persen. Dibandingkan Agustus 2022, status berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai serta pekerja bebas non pertanian mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,74 persen poin, 0,29 persen poin dan 0,47 persen poin. Status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase yang terbesar adalah pekerja keluarga/tidak dibayar yaitu sebesar 1,06 persen poin.

Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,08 juta orang (60 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 725,79 ribu orang (40 persen). Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen poin.

Diagram 3.10. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2021–Agustus 2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

KARAKTERISTIK PENGANGGURAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 adalah sebesar 4,53 persen. Hal ini berarti dari 1000 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 45 orang penganggur. Pada Agustus 2023 ini, nilai TPT mengalami penurunan yaitu sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

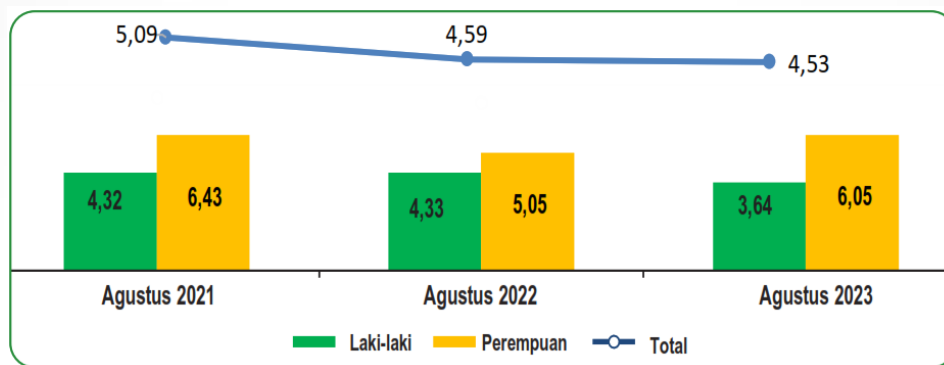
Tabel 3.19. Karakteristik Pengangguran, Agustus 2020-Agustus 2023

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Perubahan Ags 2021-Ags 2022 (persen poin)	Perubahan Ags 2022-Ags 2023 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,09	4,59	4,53	-0,50	-0,06
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	4,32	4,33	3,64	0,01	-0,69
- Perempuan	6,43	5,05	6,05	-1,38	1,00
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	7,32	7,21	6,53	-0,11	-0,68
- Perdesaan	4,04	3,33	3,47	-0,71	0,14

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Pada Agustus 2023, angka TPT laki-laki sebesar 3,64 persen lebih rendah dibandingkan TPT perempuan yang mencapai 6,05 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,69 persen poin, sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,0 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,53 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (3,47 persen). TPT perkotaan menunjukkan penurunan 0,69 persen poin, sedangkan TPT perdesaan naik 0,14 persen poin jika dibandingkan Agustus 2022.

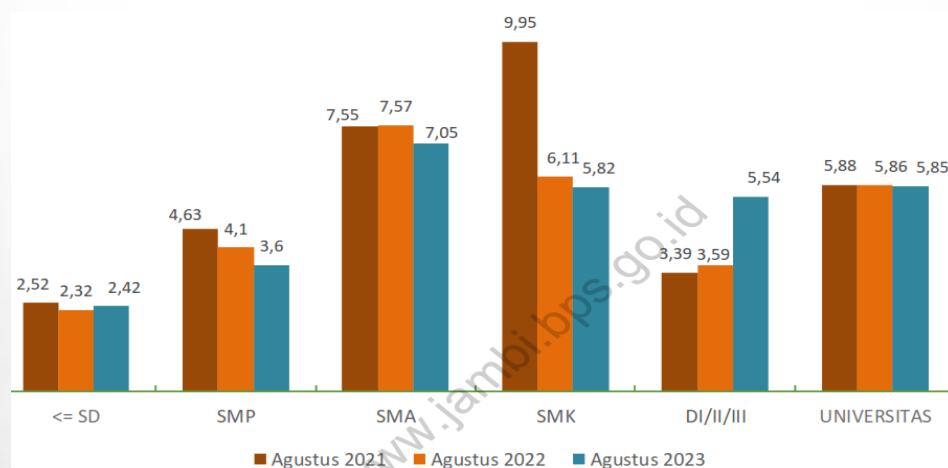
Grafik 3.9. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2021–Agustus 2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2023 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2021. Pada Agustus 2023 TPT dari tamatan sekolah menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,05 persen, sedangkan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 5,82 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 2,42 persen. Dibandingkan dengan Agustus 2022, angka penurunan TPT terbesar ada pada kategori pendidikan SMA yaitu sebesar 0,52 persen poin.

Diagram 3.11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2021–Agustus 2023

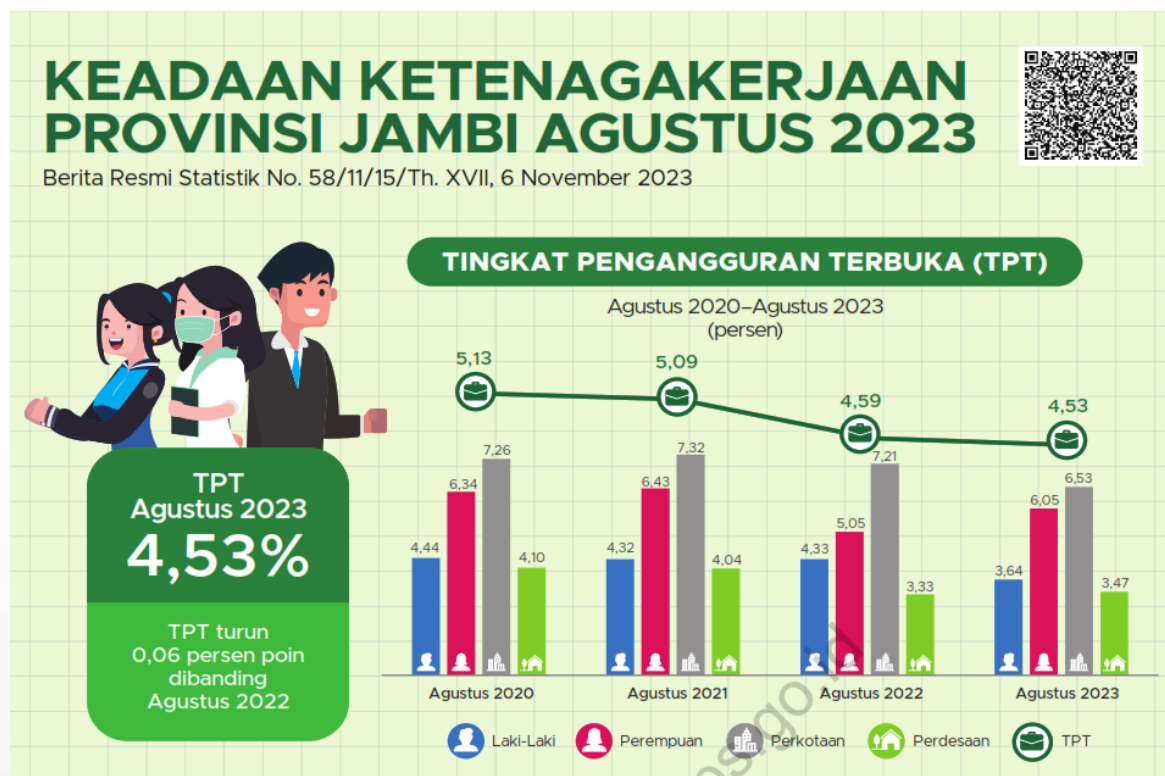


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023, 2024

Tabel 3.20. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2021 - Agustus 2023

Kabupaten/Kota	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Perubahan Ags 2021-Ags 2022 (persen poin)	Perubahan Ags 2022-Ags 2023 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	2,32	2,63	2,48	0,31	-0,15
Merangin	4,83	4,69	4,35	-0,14	-0,34
Sarolangun	5,52	5,22	5,09	-0,30	-0,13
Batanghari	4,26	3,53	3,85	-0,74	0,32
Muaro Jambi	5,59	5,35	5,40	-0,23	0,05
Tanjab Timur	1,56	1,32	1,67	-0,24	0,35
Tanjab Barat	2,53	2,88	2,95	0,34	0,08
Tebo	2,83	1,38	1,71	-1,45	0,34
Bungo	5,86	5,50	5,23	-0,36	-0,27
Kota Jambi	10,66	8,95	8,27	-1,71	-0,68
Kota Sungai Penuh	3,00	2,49	3,80	-0,51	1,31
PROVINSI JAMBI	5,09	4,59	4,53	-0,51	-0,06

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023, 2024

Capaian kinerja Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan di Provinsi Jambi sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukan kinerja yang Sangat tinggi pada Tahun 2023. Capaian ini menyumbang sebanyak 30,50% dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada RPJMD 2023 sebesar 30,20 % dan Capaian pada 2022 sebesar 100,9%, kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2023 ini cukup baik, seiring berakhirnya covid -19, dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 1.930 orang dari tenaga Kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi sebanyak 6.327 orang, untuk tahun 2023 terjadinya peningkatan penempatan tenaga kerja dan tenaga kerja yang mendaftarkan.

Penempatan tenaga kerja seiring dengan peningkatan kualitas tenaga kerja di Provinsi Jambi. Capaian kinerja Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi di Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang sangat tinggi pada Tahun 2023. Capaian ini menyumbang sebanyak 6,92% dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada RPJMD 2023 sebesar 5,20% dan Capaian pada 2023 sebesar 133%, dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi sebanyak 2.944 orang dari Jumlah Pengangguran Terbuka Tahun 2023 Provinsi Jambi dengan jumlah 42.500 orang. Untuk Capaian Kinerja Peningkatan Produktivitas sebesar 5,1% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 2,5%.

Selain itu, capaian kinerja diatas tidak terlepas dari kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan yang diimplementasikan. Capaian kinerja Kepatuhan terhadap norma-norma Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang sangat tinggi pada Tahun 2023. Capaian ini menyumbang sebanyak 126,8% dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada RPJMD 2023 sebesar 77% dan Capaian pada 2023 sebesar 126,8%, dengan jumlah Perusahaan yang telah menerapkan Norma Ketenagakerjaan sebanyak 15.158 Perusahaan di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dari Jumlah Perusahaan yang terdaftar dalam Wajib Laport Perusahaan sebanyak 15.522 Perusahaan. Capaian persentase Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan sebesar 15,13% , atau 155,9% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD 9,7 %, dengan jumlah perusahaan yang telah terbentuk bipartit sebanyak 154 perusahaan dari jumlah perusahaan yang memenuhi Kriteria sebanyak 1.018 Perusahaan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi dengan upaya mencapai pembangunan Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Meningkatkan kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
5. Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
6. Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
7. Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
8. Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
10. Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
11. Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Meningkatkan ketenagakerjaan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
5. Program Penempatan Tenaga Kerja
6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

SASARAN STRATEGIS 6 :

Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan
Indikator Kinerja :

INDEKS KETAHANAN PANGAN

INDIKATOR KINERJA :
INDEKS KETAHANAN PANGAN

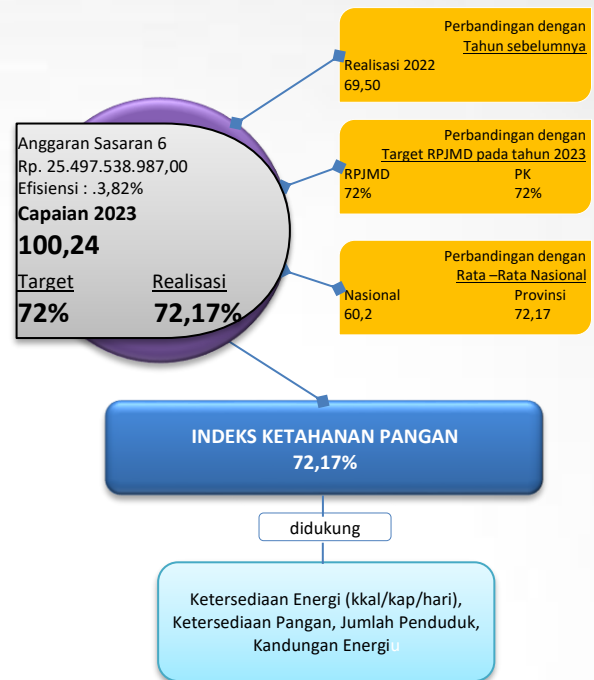
Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia mengingat pengaruhnya terhadap pembentukan iklim makroekonomi yang kondusif. Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Upaya pengendalian kerawanan pangan di Provinsi Jambi terus dilakukan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui kegiatan bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan berhasil meningkatkan indeks ketahanan pangan dari 69,50 di tahun 2022 menjadi 72,17 di tahun 2023 yang ditandai dengan penurunan jumlah kecamatan rentan rawan pangan dari awalnya 7 kecamatan menjadi 4 kecamatan.



Untuk Indonesia, ketahanan Pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam Undang-Undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah Indeks

Ketahanan, dengan capaian pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Indeks Ketahanan Pangan dihitung berdasarkan kondisi Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari), Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun), Jumlah Penduduk (jiwa), serta kandungan energi.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 12 Tahun 2013.

Kemandirian pangan dalam konteks daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan

memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Dampak dari upaya perwujudan kemandirian pangan ini dapat dilihat dari ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah dilaksanakan dari Tahun 2013 hingga Tahun 2023. Untuk total pengadaan beras selama tahun 2013 – 2023 adalah sebanyak 346.182 kg dan telah dikeluarkan / disalurkan sebanyak 121.577 kg untuk membantu masyarakat yang terkena bencana atau mengalami kerawanan pangan.

Adapun rincian Kondisi Cadangan Pangan Pokok Daerah (CPPD) dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023

Tahun	Stock Awal (Kg)	Pengadaan (Kg)	Total Penyaluran (Kg)	Sisa (Kg)
2013	0	70.000	0	70.000
2014	70.000	20.000	3.449	86.551
2015	86.551	0	9.348,50	77.202,50
2016	77.203	0	22.837,50	54.365
2017	54.365	7.000	6.102	55.263
2018	55.263	12.000	5.400	61.863
2019	61.863	3.805	24.396	41.272
2020	41.272	948	0	42.220
2021	42.220	103.500	37.560	108.160
2021	108.160	9.285	-	117.445
2022	117.445	4.423	11.746	110.122
2022	110.122	115.221	-	225.343
2023	225.343	0	738	224.605
Jumlah		346.182	121.577	224.605

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 2,870 Kkal/Kap/Hari, hal ini mencapai kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari. Ketersediaan Energi sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang. Tidak tercapainya ketersediaan energi sebagaimana yang telah

ditargetkan, dikarenakan terjadinya penurunan produksi gabah/ beras, dari produksi lokal.

Perkembangan ketersediaan energi (kkal/kap/hari) guna Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal dilihat berdasarkan skor PPH ketersediaan, Ketersediaan Energi kkal/kap/hr dan Ketersediaan Protein sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini :

Diagram 3.12. Skor PPH Tahun 2023

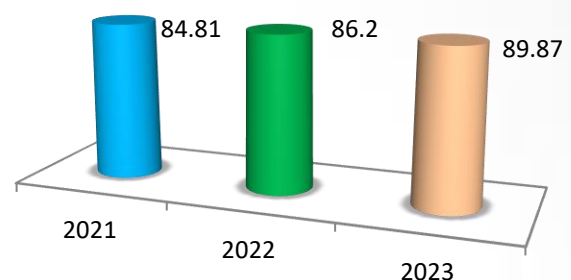
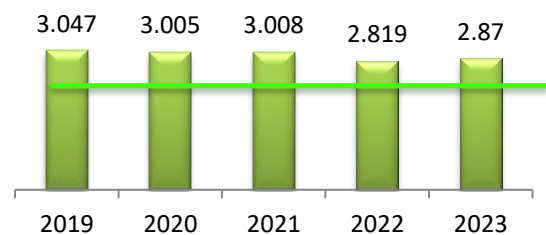
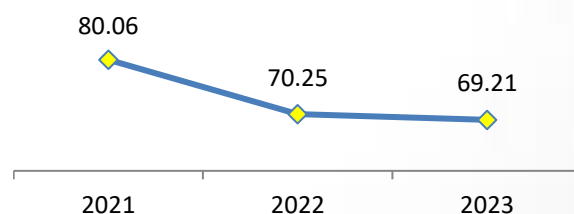


Diagram 3.13. Ketersediaan Energi Kkal/kap/hr



Grafik 3.10. Ketersediaan Protein



Dari gambar diatas bahwa pada upaya capaian kinerja memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian pangan, dengan target skor PPH ketersediaan sebesar 88,5 telah melebihi target, Ketersediaan Energi yakni sebesar 2,870 kkal/kap/hr dan Ketersediaan Protein sebesar 69,21 gr/kap/hr.

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum

terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan atau disingkat dengan PPH.

Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).



Provinsi Jambi yang memiliki keragaman geografis yang tinggi memiliki berbagai macam potensial disektor pertanian, perkebunan hingga perikanan. Jika kita melihat data PDRB selama beberapa 5 tahun terakhir, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selalu menjadi penopang dari sisi produksi dengan rata-rata kontribusi sebesar 29,34% dari PDRB. Melihat peran yang sangat penting tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi selalu berupaya membuat berbagai program agar sektor ini terus maju dan berkembang sehingga mampu memajukan perekonomian Provinsi Jambi secara umum.

IK : Konsumsi Beras (kg/kap/tahun)

Target penurunan tingkat konsumsi beras (1 kg/kap/tahun) Provinsi Jambi Tahun 2023 yakni 85 kg/kap/thn, sedangkan realisasi sebesar 87 kg/kap/thn, dengan capaian kinerja baik sebesar 97,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tentang perlunya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), upaya untuk penurunan konsumsi

beras pada Tahun 2023 belum tercapai dan untuk kecukupan konsumsi energi diganti dengan konsumsi pangan lokal non beras belum terpenuhi secara maksimal. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi sesuai data SUSENAS Tahun 2023, maka diperoleh jumlah konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar 87 kg/kap/tahun.

Hasil capaian ini telah melebihi target menurunkan konsumsi beras penduduk, dan pada tahun 2023 ditargetkan konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi sebesar 85 kg/kap/tahun terealisasinya sebesar 87 kg/kap/tahun. Ini berarti realisasi penurunan konsumsi beras telah mencapai 97,70%, masih kurang dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan adanya pergeseran pola konsumsi pangan penduduk kearah mengkonsumsi selain beras, seperti bergeser ke konsumsi gandum, tepung-tepungan selain beras.

IK : Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)

Target konsumsi energi penduduk Provinsi Jambi untuk tahun 2023 yakni sebesar 2.195 kkal/kap/hari. Berdasarkan data hasil kajian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan menggunakan data SUSENAS dari BPS diketahui bahwa realisasi konsumsi energi Tahun 2023 yakni sebesar 2.043 kkal/kap/hari, dengan capaian kinerja sebesar 93,08% dengan kriteria penilaian sangat baik, hal ini memenuhi target capaian yang diinginkan.

IK : Konsumsi Protein (gram/kap/hari)

Berdasarkan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Protein ideal yakni sebesar 61 gram/kap/hari. Terkait hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2023 telah merealisasikan angka Ketersediaan Protein Tahun 2023 sebesar 69,21 gram/kap/hari. Capaian ini telah melebihi dari pola pangan harapan ketersediaan protein yang ideal, namun masih jauh dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan,

Sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan tentunya tidak terlepas dari upaya pengentasan kerawanan pangan Provinsi Jambi.

Persentase Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan

Salah satu indikator bahwa suatu wilayah dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik adalah diukur dengan melihat seberapa banyak jumlah penduduk yang rawan pangan atau yang tahan pangan.

Kerawanan Pangan dapat diartikan apabila rumah tangga (anggota rumah tangga) mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak cukupnya ketersediaan pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup, dan apabila konsumsi makanannya berada dibawah kalori minimum yang dibutuhkan.

Kondisi kerawanan pangan yang akut akan menyebabkan kelaparan: yaitu kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi 70% kebutuhan pangan dan gizinya berturut-turut selama dua bulan, dan diikuti dengan penurunan berat badan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, diperoleh gambaran bahwa Jumlah Penduduk Berisiko Rawan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebesar 12,83% dari target 6,5 %. Artinya untuk indikator Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan selama Tahun 2023 tidak terjadi penurunan, melainkan sebaliknya terjadi kenaikan persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan sebesar 6,33% dari yang ditargetkan. Persentase Capaian Kinerja terkait % Penduduk Berisiko Rawan Pangan baru mencapai 50,66% dan termasuk kategori rendah.

Terjadinya kenaikan penduduk berisiko rawan pangan sebesar 6,33% diduga karena dampak dari kasus Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat di Provinsi Jambi. Disamping itu ada kemungkinan terjadinya pergeseran sebaran penduduk di masing-masing kabupaten/kota atau ada keterkaitannya dengan indikator FSVA yang mempengaruhi kondisi penduduk berisiko rawan pangan.

Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Indikator penurunan Persentase (%) Daerah Rentan Rawan Pangan, berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023, diperoleh gambaran bahwa jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan (Kecamatan Rentan

Pangan : Prioritas 1-3) terdapat 4 (empat) kecamatan yang masuk kedalam kategori prioritas 1-3 (Rawan Pangan) atau sebesar 2,80% dari sebanyak 143 kecamatan di Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan secara Daerah/Kecamatan telah terjadi penurunan jumlah Daerah/Kecamatan yang Rentan Rawan Pangan dibanding tahun sebelumnya (7 kecamatan prioritas 1-3). Bila kita melihat pada target penurunan Persentase (%) Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2023, terlihat bahwa dari yang ditargetkan sebesar 6,5% diperoleh hasil bahwa Daerah Berisiko Rawan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebesar 2,80%.

Ini menunjukkan bahwa selama Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil menurunkan persentase Daerah Berisiko Rawan Pangan sebesar 3,7% (6,5% – 2,8%) dari yang ditargetkan. Sedangkan rasio capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 232,14%. Ini menunjukkan capaian kinerja dengan nilai Sangat Baik (diatas 100%). Sebagai gambaran capaian kinerja penurunan persentase daerah rentan rawan pangan tahun 2023 berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, sesuai dengan prioritas penanganan kerentanan dan ketahanan pangan secara komposit.

Desa Mandiri Pangan

Untuk mencegah atau menurunkan kerawanan pangan ini maka Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penyediaan Protein Hewani dan Kegiatan Pemberian Bantuan terhadap daerah-daerah yang mengalami bencana alam berupa bantuan bahan pangan pokok yang diambilkan dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Salah satu kegiatan nasional untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani, dan untuk bidang ketahanan pangan salah satunya yaitu kegiatan Pertanian Keluarga (*Family Farming*). Pertanian keluarga atau *family farming* merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga.

Kegiatan lain yang juga merupakan salah satu upaya pemantapan ketahanan pangan keluarga yaitu Peningkatan Produktivitas dan produksi tanaman pangan (padi dan jagung), Peningkatan Produktivitas dan produksi tanaman hortikultura, serta produksi tanaman pangan.

Upaya Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Indikator persentase peningkatan produksi padi dengan target 2% terealisasi sebesar -1,61 %, persentase peningkatan produksi jagung dengan target 1% terealisasi sebesar -32,2 %, persentase peningkatan produksi cabe merah dengan target 20% terealisasi sebesar 52,44 %, dan persentase peningkatan produksi bawang merah dengan target 10% terealisasi sebesar 18,74%.

Dari 4 indikator tersebut untuk indikator peningkatan produksi padi dan jagung tidak tercapai sedangkan untuk produksi cabe merah dan bawang merah telah melampaui target. Penyebab dari tidak tercapainya target pada komoditi padi dan jagung disebabkan karena dampak dari fenomena elnino yang terjadi dipertengahan tahun 2023 (Juli – Oktober) yang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah menyebabkan pertumbuhan padi kurang optimal. Selain itu, perbedaan metode pencatatan dan perhitungan menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area) yang di rilis BPS dirasa masih kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena masih ada selisih data yang lumayan besar apabila dihitung dengan menggunakan SIPDPS yang digunakan oleh Kementerian Pertanian yang berdampak pada penurunan angka luas panen di Provinsi Jambi. Metodologi KSA merupakan metode baru yang dipakai BPS sejak Tahun 2019 yang dipandang masih perlu penyempurnaan, utamanya dalam penentuan setiap segmen pengamatan di Kabupaten/Kota.

Sedangkan capaian Produksi jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai 20.754 ton, mengalami penurunan sebesar 9.856 ton atau sekitar 32,20% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 30.610 ton. Sementara untuk produktivitas jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2023 sekitar 66,08 kwintal ha-1 , atau mengalami peningkatan sekitar 3,12 kwintal ha -1 (4,96

persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 62,96 kwintal ha-1. Penurunan angka produksi jagung terjadi karena petani banyak yang memanen muda tanaman jagungnya dengan alasan lebih menguntungkan. Selain itu juga, mayoritas petani di Provinsi Jambi masih sangat bergantung akan bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah sedangkan dari pihak pemerintah sendiri tidak bisa memberikan jaminan untuk terus memberikan bantuan kepada petani mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.

Selain dari itu terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke penggunaan lain seperti peti dan perkebunan hal ini dapat di lihat dari menurunnya minat petani untuk bercocok tanam padi dan jagung. Sebagian petani lebih tertarik ke sektor perkebunan dan penambangan emas ilegal yang berdampak pada penurunan luas panen jagung dari 4.862 Ha menjadi 3.141 Ha, untuk luas panen padi terjadi kenaikan yang semula 60.540 Ha menjadi 61.135 Ha namun tetap tidak dapat menaikkan angka produksi dikarenakan perubahan iklim elnino yang mana fenomena tersebut berdampak pada produksi padi.

Produktivitas komoditas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh profil budidaya yang dijalankan oleh petani, seperti jenis lahan, teknik penanaman, penggunaan sarana dan prasarana produksi, serta faktor lain, seperti program bantuan pemerintah, keanggotaan kelompok tani (institusi petani) dan dampak perubahan iklim. Hasil Survei Ubinan memungkinkan analisis untuk menelaah bagaimana faktor-faktor tersebut berdampak terhadap tingkat produktivitas. Sedangkan Penyebab penurunan produksi adalah karena hama atau penyakit, kekeringan, hingga banjir. Hal ini disebabkan juga karena pada tahun 2023 terjadi Refocusing anggaran pada anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.



Untuk komoditas cabe merah dan bawang merah mengalami kenaikan produksi jika dibandingkan dengan tahun lalu yang semula 981.585 kwintal menjadi 1.496.317 kwintal untuk komoditi cabe merah, dan untuk komoditi bawang merah yang semula 160.502 kwintal menjadi 190.576 kwintal. Ini dikarenakan adanya dukungan dari program penunjang urusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian untuk daerah, serta Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk pusat dalam bentuk bantuan benih/bibit dan sarana produksi. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi dampak dari inflasi yang mana dipengaruhi oleh tingginya harga cabe merah dan bawang merah, dikarenakan hal tersebut minat petani untuk membudidayakan komoditas hortikultura menjadi tinggi.

Dapat dilihat dari luas panen untuk komoditi cabe merah walaupun dengan luas panen 6.215 Ha (angka sementara) dapat menghasilkan produktivitas 240,77 kwintal ha-1 jika dibandingkan dengan tahun lalu luas panen 6.410 Ha hanya menghasilkan produktivitas 1533,14 kwintal/ha. Pada komoditi bawang merah terjadi peningkatan luas panen dari 2.125 Ha menghasilkan produktivitas 75,52 kwintal ha-1 menjadi 2.277 Ha menghasilkan 83,68 kwintal ha-1.

Sementara upaya strategis peningkatan Populasi Ternak terjadi penurunan capaian pada indikator persentase peningkatan populasi ternak sapi sebesar 1,4 % dari target 1,5 % dilihat dari populasi tahun 2022 sebesar 161.308 ekor dan tahun 2023 sebesar 163.495 ekor (angka sementara). Hal ini terdampak dari terjadinya penyebaran Penyakit Menular Hewan Strategis (PHMS) diantaranya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Penyakit SE dan Jembrana yang menyebabkan kematian ternak sapi. Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dan tradisional dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan dan masih terjadinya pemotongan sapi betina produktif.

Analisis atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Pendukung Kinerja

a. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumber Daya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sector perkebunan (sawit) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang illegal (Illegal Mining).

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau.

b. Terjadinya Perubahan Iklim

Pada tahun 2023, terjadinya kekeringan dan banjir yang cukup tinggi dan diperparah dengan dampak kebakaran hutan di Provinsi Jambi. Suhu yang terlalu panas dan berkurangnya ketersediaan air akan menghambat produktivitas pertanian.

Perubahan iklim juga akan menyebabkan perubahan masa tanam dan panen ataupun menyebabkan munculnya hama dan wabah penyakit pada tanaman yang sebelumnya tidak ada. Ancaman banjir yang semakin sering terjadi pada lahan sawah juga merupakan salah satu dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Hal ini menyebabkan berkurangnya luas areal panen dan produksi padi. Dampak pergeseran musim tanam mengakibatkan jadwal tanam akan terganggu yang mengakibatkan menurunnya angka produksi dan bahkan kegagalan panen.

c. Masih beragamnya produksi tanaman pangan yang dihasilkan petani

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran.

Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Terbatasnya modal petani untuk pembelian saprodi sehingga teknologi yang diaplikasikan pada pertanaman petani belum maksimal.
2. Masih relatif rendahnya penggunaan teknologi sesuai rekomendasi. Hal ini karena petani masih ada yang belum meyakini teknologi yang dianjurkan.
3. Masih adanya petani yang mempergunakan benih kurang bermutu, yang telah mengalami degradasi. Biasanya ini terjadi karena penggunaan benih hasil panen sendiri yang terus menerus tanpa disertifikasi ulang. Disamping itu dalam memproduksi benih terkendala oleh :
 - Sarana dan prasarana prosesing pada penangkar belum memadai sehingga dalam musim penghujan kadar air benih hasil penangkaran tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
 - Minat penangkar dalam memproduksi benih buah-buahan masih rendah.
 - Mitra kerja antara penangkar dengan pihak swasta belum optimal.
 - Peralatan Laboratorium ada yang rusak dan belum diperbaiki dan kelengkapan peralatan khususnya untuk uji kesehatan benih yang belum lengkap.
 - Pada pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar memiliki kendala dalam penyediaan benih dari pusat, sehingga jadwal pelaksanaan di lapangan mengalami penundaan.
 - Masih kurangnya pemahaman produsen / pedagang benih untuk menerapkan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 dan PP No. 44 1995.
4. Masih terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi di bidang perlindungan tanaman untuk meningkatkan kualitas dan pengamanan produksi tanaman Pangan.
5. Masih Rendahnya kemampuan/daya beli petani khususnya tanaman pangan untuk membeli benih Unggul bermutu dan bersertifikat secara tunai.

d. Masih berfluktuatifnya Produktivitas dan produksi tanaman hortikultura yang dihasilkan

Tanaman hortikultura, khususnya buah - buahan produktivitas dan produksinya relatif tidak stabil setiap tahun. Begitu juga sayur- sayuran, pada saat-saat tertentu melimpah dipasaran dan diwaktu yang lain terjadi kekurangan, yang menyebabkan harga berfluktuatif pula. Disamping itu kualitas yang dihasilkan juga masih ada yang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya.

- ❖ Penerapan GAP dan SOP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani komoditas buah-buahan dan sayur – sayuran sehingga tidak dapat memenuhi standar ekspor.
- ❖ Produksi sayuran organik belum dapat berjalan secara efektif dan optimal yang mengakibatkan masih sulitnya pemasaran walaupun telah ditetapkan dengan kategori sayuran prima 3.
- ❖ Permintaan benih bermutu khususnya komoditi kentang terus meningkat, namun demikian belum dapat dipenuhi oleh industri perbenihan dan penangkar benih secara optimal.

e. Relatif masih terbatasnya Managerial Usaha Tani dan Kualitas Sumber daya yang relatif masih rendah.

Pengelolaan usaha tani petani saat ini masih dilakukan secara tradisional, dengan skala usaha kecil – kecil dan merupakan usaha konvensional, kegiatannya cenderung pada upaya produksi dan belum berdasarkan perhitungan untung rugi dan daya serap serta jangkauan pemasaran yang mengakibatkan efisiensi dan efektivitas produksi masih rendah. Kondisi demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal sesuai dengan yang diharapkan.



Relatif masih terbatasnya managerial Usaha tani dan Kualitas Sumberdaya yang relatif masih rendah, didukung oleh antara lain :

- Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan internasional.
- Selain itu, turut pula dengan kondisi masih relatif Kurangnya jumlah tenaga pengawas benih dibandingkan dengan cakupan luas penangkaran benih yang ada di Kabupaten / Kota.

f. Persaingan produk import

Daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura dari provinsi Jambi umumnya masih relatif rendah sehingga senantiasa dihadapkan persaingan dipasaran regional dan nasional serta internasional. Rendahnya daya saing tersebut antara lain disebabkan oleh :

1. Kualitas dan Mutu produksi tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan umumnya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi memenuhi standar kualitas ekspor
2. Tingkat efesiensi usaha tani saat ini masih perlu diupayakan secara terus menerus agar harga satuan produk yang dihasilkan dapat dapat bersaing dipasaran.
3. Masih Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan internasional.
4. Produksi buah-buahan dan sayur – sayuran sering melimpah pada waktu panen raya sehingga sangat sulit untuk dipasarkan dengan harga yang wajar, baik pada pasar regional maupun ekspor.

f. Rendahnya Nilai tambah produk.

Petani di Jambi umumnya hanya melakukan kegiatan usahatani secara parsial dan terbatas hanya sampai panen dan masih relative jarang yang melakukan pengolahan lanjutan dari hasil usahatani tersebut, sehingga nilai tambah dari kegiatan usaha tani masih kecil. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi rumah tangga pertanian dalam mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan di daerah belum berkembang dengan baik.

Beberapa hal lain yang menyebabkan rendahnya nilai tambah produk tersebut adalah :

1. Masih kurangnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pedesaan berbasis bahan olahan.
2. Keterbatasan informasi dan penerapan teknologi pasca panen.

g. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan belum Tepat Sasaran.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembanganteknologi yang sudah ada (innovation) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : Penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdanei, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya sehingga mubajir dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (Good Handling Procedure) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi.

Disamping itu, masih ditemui keterlambatan penyaluran benih ke lapangan sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut karena petani telah terlanjur tanam menggunakan benih yang ada pada petani.



h. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha Permodalan.

Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani. Usaha pertanian dihadapkan kepada keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan

masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh : (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan pada usaha komersial lain (di luar agribisnis).

Kurangnya kemampuan modal yang dimiliki petani dan pelaku agribisnis, menyebabkan petani minim dalam penggunaan sarana produksi pendukung seperti pupuk dan pestisida, sehingga dampak peningkatannya produktivitasnya tidak signifikan.

i. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh :

1. Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyedia benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih, karena :
 - ✓ Saat ini Sumber air yang ada sangat terbatas, mengakibatkan kebutuhan air pada saat tanam tidak dapat dipenuhi secara optimal.
 - ✓ Peralatan kerja dari pengolahan sampai pasca panen dan peralatan penunjang lainnya sebagian besar sudah mengalami kerusakan.
 - ✓ Prasarana gudang, jalan usaha tani dan saluran irigasi kondisinya sudah kurang memadai
 - ✓ Produktivitas lahan mengalami penurunan sebagai akibat penggunaan lahan yang terus-menerus dan belum diimbangi dengan perbaikan lahan.
 - ✓ Masih sulitnya mendapatkan benih sumber BS dan BD.

2. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kriteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
3. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
4. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
5. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

j. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui pertambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT. Disamping itu kelembagaan UPJA maupun KUPJA belum berkembang sesuai yang diharapkan,

- 1) Semakin menurunnya tingkat keaktifan dan jumlah UPJA yang ada.
- 2) Umumnya penempatan alsin yang ada baik dari pengadaan pusat, provinsi, kabupaten ataupun dari instansi terkait tidak pada kelembagaan UPJA sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya hanya ditingkat kelompok tani dan menjadi milik kelompok. Dengan demikian bantuan alsin yang ada tidak efisien dan tidak berkembang.
- 3) Masih banyak petani/kelompok tani/UPJA yang keberatan dengan sistim Bantuan Uang Muka Alsin (BUMA) yang disediakan dari dana APBN karena sudah terbiasa dengan menerima bantuan alsin secara gratis.

k. Masih Kurangnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan

Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan agribisnis karena menyangkut kelanjutan usaha agribisnis tersebut. Beberapa metode usaha tani yang diterapkan ada yang belum memenuhi aspek kelestarian lingkungan antara lain :

- 1) Masih ditemui adanya residu pestisida pada produk tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pada tanaman sayuran sebagai dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan.
- 2) Penggunaan pestisida yang berlebihan (di atas ambang batas). Sehingga menyebabkan matinya musuh – musuh alami, disamping residu pestisida yang masih tinggi pada hasil produksi hortikultura.
- 3) Metode konservasi belum diterapkan terutama pada pertanaman hortikultura (kentang).
- 4) Pola – pola usaha tani secara terpadu antara pertanian pangan / hortikultura dan peternakan belum diterapkan secara baik.

l. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti : ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen.

Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi

pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.



Berdasarkan problematika tersebut di atas, maka upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, diantaranya :

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan

Indikator dari sasaran mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan produksi dan ketahanan pangan dapat dilihat dari produksi tanaman pangan, hortikultura pada tahun 2023. Untuk mencapai peningkatan produksi ini pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan berupa : Gerakan Pemberdayaan Petani mendukung UPSUS, perbanyak benih sumber, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, kegiatan pembinaan perlindungan OPT, program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).

2. Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dan Menurunnya Ketergantungan pada Pangan Pokok Beras melalui Pengalihan Konsumsi Beras ke Non Beras.

Sasaran meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras melalui pengalihan konsumsi beras ke non beras. Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja.

Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber pangan lokal, dan mengajak masyarakat agar mengubah pola pikir, bahwa beras/nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat, karena masih banyak sumber pangan lokal seperti umbian, sukun, jagung, sagu dan lainnya yang nilai gizinya setara dengan beras.

3. Berkembangnya Usaha Agribisnis

Sasaran berkembangnya usaha agribisnis dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah dan jenis petani yang bergerak dibidang usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi pada tahun 2023.

Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan berupa pembinaan kualitas mutu dan gabah dalam rangka peningkatan rendemen beras di Provinsi Jambi, perbanyak bibit buah-buahan (duku, durian dan jeruk), ekspose hasil pertanian, pelestarian plasma nutfah, pengembangan varietas unggul nenas Tangkit, pembinaan dan pengembangan buah unggulan, pembinaan dan pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, pengembangan hortikultura pada daerah agrowisata, pengembangan KAHS, analisa usahatani tanaman pangan dan hortikultura, pemantauan usaha pengolahan dan pasca panen, pemantauan harga gabah, usaha perbaikan pasca panen tanaman pangan, penyediaan benih untuk rawa lebak melalui penumbuhan penangkaran benih.

4. Tersedianya Benih/Bibit yang Bermutu dari Varietas Unggul dengan Harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan



Indikator keberhasilan dari tersedianya benih yang bermutu dari varietas unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan adalah produksi benih yang dihasilkan oleh penangkar-penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa Pengembangan jaringan sistem perbenihan Padi dan Pengembangan Usaha dan kelembagaan Perbenihan Hortikultura serta perbanyakan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura serta pengadaan sarana dan prasarana balai benih kentang di Kabupaten Kerinci (BBH Kayu Aro).

5. Meningkatnya Penggunaan / Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator pelaksanaan forum perbenihan baik untuk komoditas pangan maupun untuk komoditas hortikultura. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jambi berupaya meningkatkan penggunaan / penanaman benih bermutu varietas unggul dilaksanakan forum perbenihan tanaman pangan sebanyak 2 kali yang dihadiri oleh penangkar benih, pengusaha benih dan penangkar benih.

Sedangkan untuk forum perbenihan hortikultura dilaksanakan sebanyak 1 kali. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini juga

dilakukan kegiatan – kegiatan berupa penangkaran benih di tingkat petani, rapat koordinasi dalam rangka penyediaan/perbanyakan benih varietas unggul bermutu, rapat koordinasi dalam rangka pengembangan sistem produksi dan distribusi benih, perbanyakan benih sumber padi varietas unggul lokal.

6. Tumbuh kembangnya Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih

Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu. Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator jumlah dan jenis Balai Benih serta penangkar yang dapat menghasilkan benih dimana benih tersebut dapat dipergunakan oleh para petani dalam melaksanakan usaha lainnya.

Dalam pencapaian sasaran ini dilakukan kegiatan berupa Operasional BBI Hortikultura, Operasional BBI Palawija, Operasional BBI Padi, perbanyakan benih pokok dan benih sebar, perbanyakan benih palawija, Operasional Bbi Alai Ilir, Perbanyakan benih palawija BS – FS dan FS – SS, Perbanyakan benih palawija BS – FS dan FS – SS, jagung kedele dan kacang tanah, Perbanyakan benih palawija, Pengembangan taman anggrek ria loka, Operasional kegiatan taman anggrek dan Pengembangan kultur jaringan.

7. Mengembangkan dan Menerapkan Teknologi Maju Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator demplot, pengujian dan demonstrasi yang dilaksanakan untuk memotivasi petani dalam melakukan usaha tani dengan teknologi maju untuk tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa Bimbingan percontohan perbaikan usahatani Padi, Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan kering.

Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan bera/tidur, produktivitas padi dilahan

bera/tidur, Bimbingan percontohan perbaikan pola tanam padi di daerah rawa lebak.

8. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan secara selektif

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, perluasan areal pertanian dengan mencetak sawah yang didanai oleh Pemerintah maupun swadana petani, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani. Pencegahan alih fungsi lahan di Jambi dilakukan dengan penerbitan PERGUB No 14 tahun 2009, sedangkan di tingkat nasional telah dilakukan pula melalui UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Daerah juga merevitalisasi fungsi lahan pasang surut yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh petani tanaman pangan dengan kegiatan renovasi lahan sulfat masam dan memanfaatkan potensi Lahan Rawa lebak yang ada.

Peningkatan kesuburan Lahan terus dilakukan melalui pemanfaatan Pupuk jerami dan dijadikan Trichokompos. Khusus untuk lahan – lahan Balai Benih Induk disamping penggunaan trichokompos, juga diberikan Pupuk kandang dan Pengapuran.

Untuk mencukupi ketersediaan air, di kabupaten dilakukan rehab – rehab Jaringan Irigasi Teknis dan rehab Jaringan Irigasi Non Teknis yang dananya berasal dari APBN. Sedangkan untuk Balai benih Induk dibuatkan Pompa air.

9. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru (terutama penggunaan benih Unggul)

Produktivitas tanaman pangan saat ini dimasing masing lokasi berbeda – beda, sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan sumber air yang tersedia. cenderung stagnan. Hal ini karena selama ini produktivitas yang dihasilkan masih

rendah jika dibandingkan dengan potensi produktivitas benih yang dipergunakan.

Dari segi potensi Provinsi Jambi, Produktivitas masih berpeluang besar untuk ditingkatkan lagi. Potensi tersebut tercermin dari senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian. Untuk mendorong peningkatan produktivitas telah dilakukan penggunaan benih unggul varietas baru, meskipun belum semua petani mempergunakannya. Untuk daerah-daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi, khususnya mempergunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat.

10. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru.

Daya saing produk sangat ditentukan oleh kualitas dan mutu produk yang bersangkutan serta efisiensi untuk menghasilkan produk tersebut. Kualitas yang baik, mutu yang terjamin dan harga yang relatif murah dalam memproduksinya akan mudah dipasarkan dan akan muda bersaing dipasaran.

Peningkatan mutu produk ditujukan untuk peningkatan daya saing, nilai tambah dan pendapatan pelaku usaha. Mutu produk tergantung pada berbagai faktor, antara lain : penggunaan benih bermutu, penerapan teknologi budidaya, penanganan panen dan pasca panen serta penerapan teknik distribusi produk yang benar. Upaya yang ditempuh diantaranya :

- a) Meningkatkan Kualitas dan mutu produk, serta packing produk melalui inovasi teknologi baru.
- b) Meningkatkan efisiensi produksi dengan menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas dan mutu produk. Meningkatkan wawasan dan pemahaman petugas tentang standar mutu pasar suatu produk, baik di lokal maupun regional / internasional.

- c) Pengaturan produksi sayur-sayuran dan menerapkan teknologi "off season" untuk Komoditi bernilai tinggi.

11. Mendorong Peningkatan Nilai tambah Produk dan Diversifikasi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Nilai tambah suatu produk akan bernilai tinggi apabila kegiatan usaha tani dilanjutkan dengan pengembangan lanjutan terhadap produk yang dihasilkan. Kegiatan tersebut tidak hanya terbatas pada dihasilkannya sampai panen dan pasca panen, namun ditambah lagi dengan kegiatan olahan lanjutan. Disamping itu kegiatan lain adalah melalui diversifikasi produk, sehingga komoditas yang dihasilkan bisa beragam.

Potensi fisik dan peluang pasar komoditas tanaman pangan saat ini masih belum dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan mendorong pendapatan petani diperlukan upaya – upaya untuk mendorong diversifikasi produksi tanaman pangan sesuai kapasitas sumberdaya dan prospek pasar. Pengembangan komoditas hortikultura diprioritaskan melalui penumbuhan wilayah pengembangan sentra produksi di lahan baru yang memiliki kecocokan agro ekosistem dengan mempertimbangkan daya serap dan permintaan pasar, nilai ekonomi, penguasaan teknologi dan lainnya.

Untuk meningkatkan nilai tambah produk, beberapa upaya tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen dan olahan lanjutan bagi ibu – ibu di pedesaan.
- b) Mensosialisasikan sistim pengemasan/ packing yang baik dan benar guna meningkatkan nilai jual produk.

12. Mempercepat Transfer Teknologi Dan Tepat Sasaran Mempercepat transfer teknologi pertanian ke petani melalui berbagai kegiatan, diantaranya :

- a) Bantuan benih varietas unggul baru yang diikuti dengan sistem Sekolah lapang , baik dalam pengelolaan pertanaman maupun dalam penanganan pasca panen. Sekolah lapang, artinya sekolah bagi petani yang dilaksanakan dilapangan dan materinya disesuaikan dengan umur pertanaman di lokasi laboratorium lapangan. Peserta adalah utusan kelompok yang mdah menerima teknologi dan mempunyai kemampuan untuk menularkan ke anggota kelompok taninya.

- b) Untuk varietas yang belum beradaptasi dilaksanakan uji varietas di beberapa lokasi, sehingga benih yang disebarkan kepetani adalah yang sudah mengalami uji adaptasi dan cocok dikembangkan di daerah Jambi.

- c) Pengelolaan pertanaman dilaksanakan oleh petani dengan bimbingan petugas, sehingga petani langsung menerapkan apa yang diperoleh dan mengatasi segala permasalahan yang muncul selama proses pertanaman berlangsung.

13. Mendorong Pola Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder

Kewenangan pemerintah Provinsi dibandingkan pemerintah Kabupaten semakin terbatas sebagaimana halnya kewenangan Pusat yang hanya meliputi perumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur. Oleh karena itu pembangunan pertanian perlu dirancang untuk lebih memfasilitasi berkembangnya inisiatif masyarakat dan seluruh stakeholder. Dengan adanya UU No.22 Tahun 1999 yang telah diperbaiki melalui UU No.32 Tahun 2004, dan diganti dengan UU No.23 tahun 2014 Provinsi dan Kabupaten perlu untuk meningkatkan kapasitas dan potensinya untuk membangun pertanian didaerahnya.

Petani yang telah pernah mendapat bantuan dan berhasil dalam usahatani didorong untuk mengembalikan modal yang diterimanya kelompok dan dijadikan sebagai modal kelompok. Khusus untuk penangkar benih difasilitasi menjalin kerjasama dengan

stakeholder (PT. SHS dan PT Pertani), sehingga benih yang dihasilkan dapat dipasarkan dan terjual dengan harga yang layak.

14. Meningkatkan Efisiensi Usahatani, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, baik segar maupun olahan hasil pertanian adalah mutu produk yang baik dan efisien dalam proses produksi maupun pada tahap pemasarannya. Mutu produk yang efisien akan berpengaruh langsung terhadap harga dari setiap produk. Namun demikian upaya untuk mengurangi kehilangan hasil yang cukup tinggi pada saat penanganan pasca panen tanaman pangan, melalui penggunaan Power Thresher pada saat perontokan dan penggunaan terpal plastik pada saat penjemuran (apabila lantai jemur belum tersedia) khususnya padi, jagung dan Kedelai. Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci.

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, Skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin pada 2022. Berdasarkan laporan Economist Impact, skor GFSI milik Indonesia mengalami peningkatan 1,7% dibandingkan pada 2021 yang sebesar 59,2 poin. Skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin pada 2022 (2023).

Skor GFSI milik Indonesia mengalami peningkatan 1,7% dibandingkan pada 2021 (2022) yang sebesar 59,2 poin. Skor indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia pada 2022 (2023) dalam kategori moderat (skor 55-69,9 poin). Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara, diapit oleh Tunisia dan Kolombia yang masing-masing memiliki skor 60,3 poin dan 60,1 poin. Secara umum, keterjangkauan harga pangan Indonesia dinilai cukup baik dengan skor 81,5 poin. Namun, beberapa indikator lain, seperti ketersediaan pasokan, kualitas dan keamanan, serta keberlanjutan dan adaptasi pangan masih

lemah. Secara rinci, indikator ketersediaan pasokan Indonesia memiliki skor sebesar 50,9 poin. Skor indikator kualitas dan keamanan pangan Indonesia sebesar 56,2 poin. Lalu, indikator keberlanjutan dan adaptasi pangan sebesar 46,3 poin.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
8. Program Perizinan Usaha Pertanian
9. Program Penyuluhan Pertanian

SASARAN STRATEGIS 7 :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender

Indikator Kinerja :
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

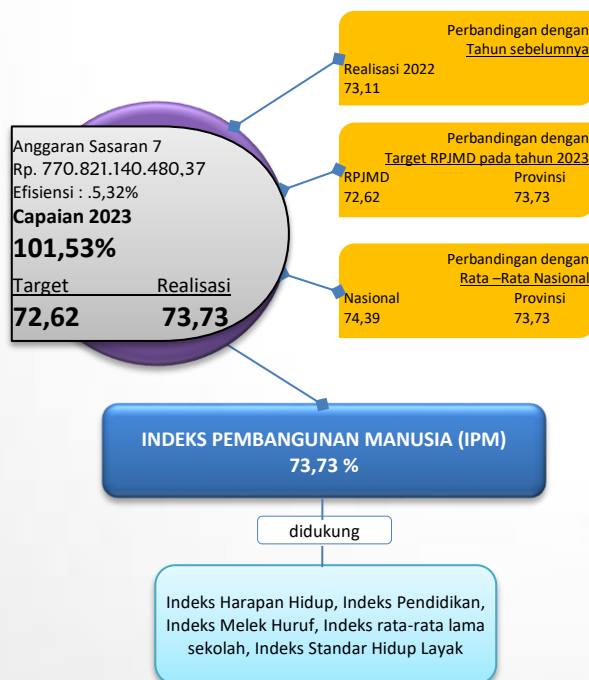
INDIKATOR KINERJA : INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM juga dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah/Negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena digunakan sebagai

ukuran kinerja pemerintah dan menjadi salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi 2023 menyajikan angka IPM Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta dilengkapi dengan penjelasan dari komponen pembentuk IPM tahun 2023, yaitu : umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun. Capaian pembangunan manusia di Jambi selama kurun waktu 2020 s.d. 2023 menunjukkan peningkatan dalam setiap tahun. Status IPM Jambi dari tahun 2020 s.d. 2023 meningkat dari status sedang menjadi status tinggi.

Peningkatan IPM Provinsi Jambi tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak lebih cepat dari tahun sebelumnya.



Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,84 tahun, meningkat 0,23 tahun (0,31 persen) dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,08 tahun (0,61 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,05 menjadi 13,13 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,13 tahun (1,50 persen), dari 8,68 tahun menjadi 8,81 tahun pada tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi Tahun 2023 Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 289 ribu rupiah (2,66 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

1. Perkembangan IPM Provinsi Jambi Tahun 2020–2023

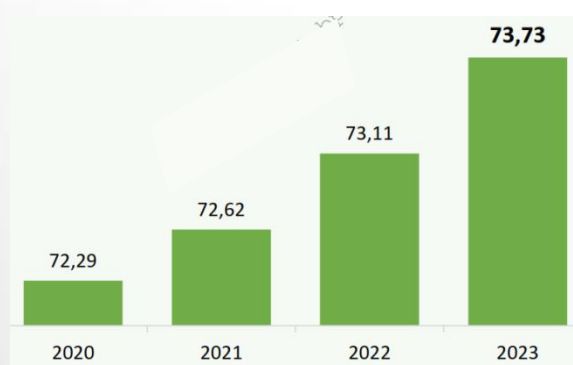
Pembangunan manusia di Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018, status pembangunan manusia Provinsi Jambi sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Provinsi Jambi rata-rata meningkat sebesar 0,66 persen per tahun, dari 72,29 pada tahun 2020 menjadi 73,73 pada tahun 2023.

2. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Jambi Tahun 2013–2023



Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan pada 2023, yaitu HLS sebesar 0,61 persen dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 0,08 persen dan RLS sebesar 1,50 persen dibanding tahun 2022 yang hanya 0,93 persen. Sementara Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya dalam dua tahun terakhir sebesar 0,31 persen. Sebaliknya Pengeluaran Riil per Kapita pertumbuhannya sedikit melambat dari 2,67 persen pada 2022 menjadi 2,66 persen pada 2023. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada Grafik berikut :

Diagram 3.14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi, 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Tabel 3.22. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2023

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,33	73,38	73,61	73,84
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,98	13,04	13,05	13,13
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,55	8,60	8,68	8,81
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp Juta	10,392	10,588	10,871	11,160
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		72,29	72,62	73,11	73,73

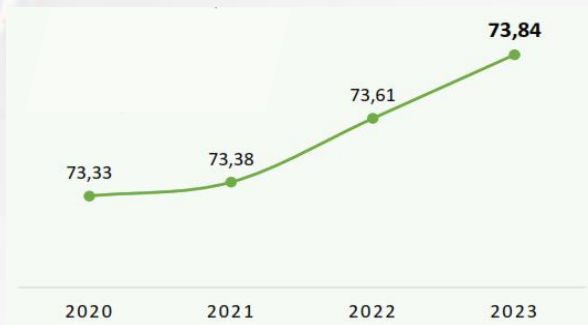
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

UHH saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,51 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Provinsi Jambi adalah 73,33 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 73,84 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,23 tahun (0,31 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,19 persen per tahun).



Grafik 3.11. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Jambi (tahun), 2020–2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu HLS penduduk usia 7 tahun ke atas dan RLS penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Provinsi Jambi rata-rata meningkat 0,38 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,00 persen per tahun. HLS tahun 2023 meningkat 0,08 tahun (0,61 persen) dibandingkan tahun 2022, sedangkan RLS meningkat 0,13 tahun (1,50 persen)

Grafik 3.12. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi (tahun) 2020–2023

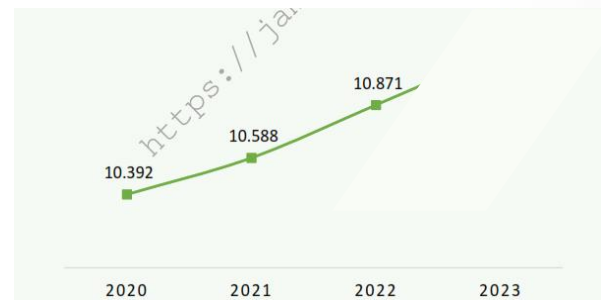


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Jambi mencapai Rp11,160 juta. Capaian ini meningkat 289 ribu rupiah (2,66 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2022 yang sebesar 2,28 persen per tahun.

Grafik 3.13. Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah), 2020–2023

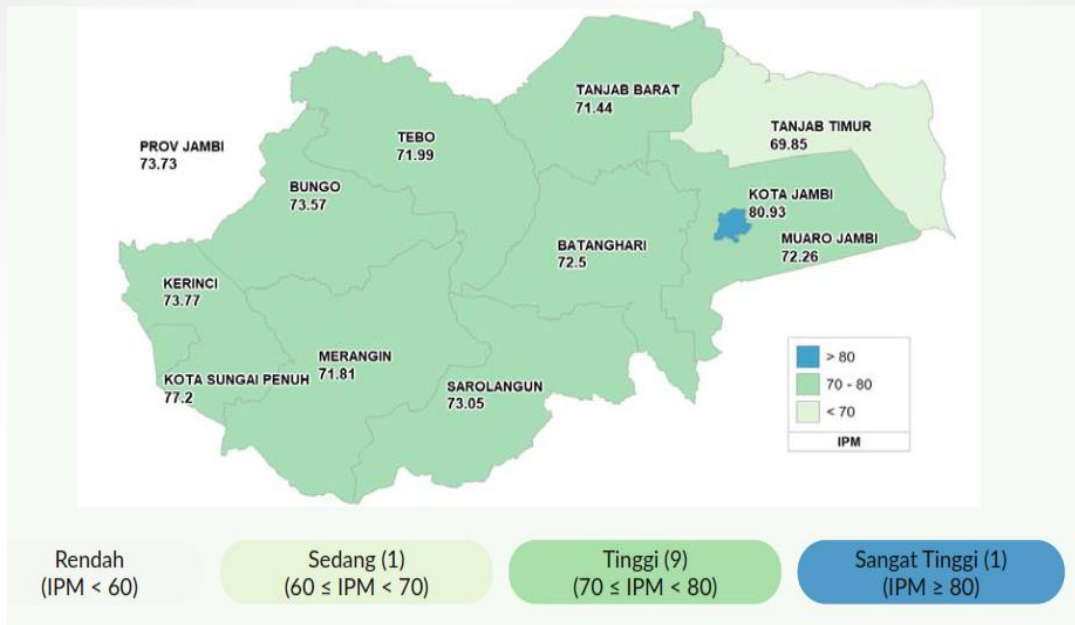


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021, status pembangunan manusia di Tanjung Jabung Barat meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM 70,26. Sementara itu, sejak tahun 2022 Kota Jambi mengalami peningkatan status dari “tinggi” ke “sangat tinggi”. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$) menjadi sebanyak 1 kabupaten/kota, dengan status “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) sebanyak 9 kabupaten/kota, dan dengan status “sedang” ($60 \leq IPM < 70$) sebanyak 1 kabupaten/kota (Tanjung Jabung Timur).

Gambar 3.4. IPM Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2023

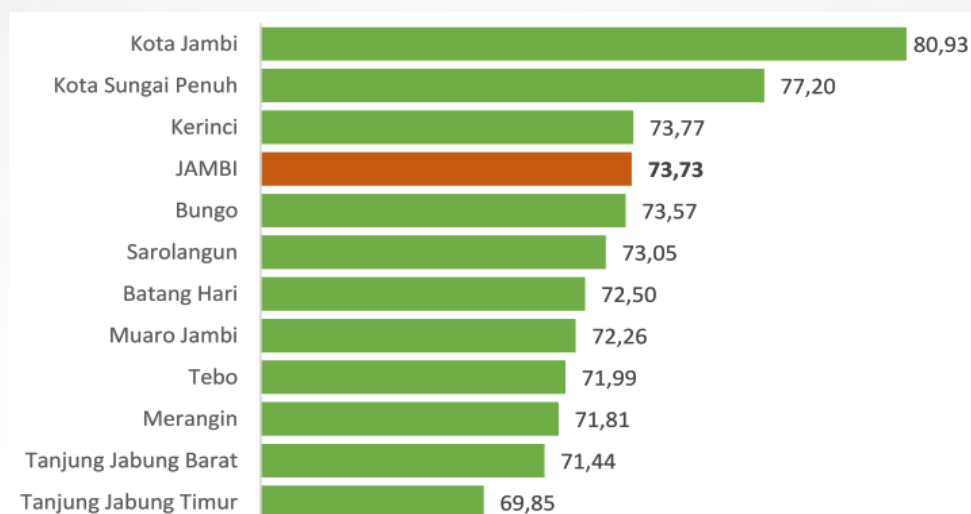


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Pada tahun 2023, IPM sembilan kabupaten/kota sudah berstatus “tinggi” sementara Tanjung Jabung Timur masih berstatus “sedang”. Besarnya angka IPM setiap kabupaten/kota berkisar antara 69,85 sampai dengan 80,93. IPM tertinggi dicapai oleh Kota Jambi dengan IPM sebesar 80,93 dan yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 69,85. Bila dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Jambi yang mencapai 73,73, hanya wilayah Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci yang mempunyai IPM lebih tinggi dari IPM provinsi. Sementara nilai IPM dari delapan kabupaten yang lain masih lebih rendah dari IPM Provinsi Jambi.

Kedua wilayah kota di Provinsi Jambi adalah peraih IPM terbesar dari sebelas kabupaten/kota yang ada. Setelah Kota Jambi (dengan IPM 80,93), peraih IPM terbesar kedua adalah Kota Sungai Penuh dengan IPM sebesar 77,20 dan posisi ketiga dicapai oleh Kabupaten Kerinci dengan IPM 73,77. Urutan keempat dan kelima ditempati oleh Kabupaten Bungo dan Sarolangun, dengan IPM masing-masing sebesar 73,57 dan 73,05. Selanjutnya pada posisi keenam dan ketujuh adalah Kabupaten Batang Hari dengan IPM sebesar 72,50 dan Kabupaten Muaro Jambi dengan IPM sebesar 72,26. Rangking kedelapan adalah Kabupaten Tebo dengan IPM sebesar 71,99, sedangkan yang kesembilan adalah Kabupaten Merangin dengan IPM sebesar 71,81. Posisi kedua terakhir ditempati oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai IPM 71,44 dan Tanjung Jabung Timur dengan nilai IPM 69,85.

Diagram 3.15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Tabel 3.23. IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020-2023

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita		IPM	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(10)	(11)	(14)	(15)	(18)	(19)
Provinsi Jambi	73,33	73,38	12,98	13,04	8,55	8,60	10.392	10.588	72,29	72,62
Kerinci	72,64	72,70	13,87	13,88	8,55	8,56	9.995	10.184	72,47	72,72
Merangin	73,55	73,58	11,99	12,04	7,76	7,90	10.279	10.380	70,20	70,55
Sarolangun	73,00	73,04	12,27	12,28	7,87	8,04	11.616	11.792	71,63	72,02
Batang Hari	73,90	73,97	12,92	12,93	8,11	8,12	9.825	10.032	71,34	71,61
Muaro Jambi	74,06	74,11	12,83	12,84	8,57	8,58	8.556	8.825	70,41	70,79
Tanjung Jabung Timur	73,37	73,48	12,16	12,17	6,70	6,92	9.026	9.163	67,58	68,09
Tanjung Jabung Barat	72,71	72,76	12,62	12,63	7,71	8,00	9.480	9.699	69,62	70,26
Tebo	73,02	73,05	12,60	12,64	7,58	7,59	10.389	10.546	70,51	70,73
Bungo	73,13	73,22	12,62	12,63	8,27	8,28	11.471	11.670	72,46	72,70
Kota Jambi	74,32	74,37	15,10	15,37	10,92	11,20	12.056	12.240	79,19	79,94
Kota Sungai Penuh	73,37	73,46	14,79	14,80	10,32	10,33	10.248	10.454	76,02	76,30
Indonesia	73,37	73,46	12,98	13,08	8,48	8,54	11.013	11.156	72,81	73,16

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Lanjutan : Tabel IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020-2023

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita		IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(4)	(5)	(8)	(9)	(12)	(13)	(16)	(17)	(20)	(21)
Provinsi Jambi	73,61	73,84	13,05	13,13	8,68	8,81	10.871	11.160	73,11	73,73
Kerinci	72,94	73,18	13,89	13,91	8,57	8,59	10.570	10.965	73,24	73,77
Merangin	73,78	73,97	12,05	12,25	7,91	8,13	10.714	10.969	70,98	71,81
Sarolangun	73,26	73,46	12,47	12,48	8,12	8,14	12.069	12.392	72,66	73,05
Batang Hari	74,22	74,48	12,94	12,96	8,21	8,22	10.173	10.528	71,99	72,50
Muaro Jambi	74,33	74,55	12,99	13,15	8,59	8,69	9.118	9.525	71,41	72,26
Tanjung Jabung Timur	73,78	74,09	12,18	12,20	7,19	7,43	9.503	9.898	68,96	69,85
Tanjung Jabung Barat	72,99	73,21	12,64	12,67	8,18	8,31	9.968	10.229	70,88	71,44
Tebo	73,25	73,45	12,65	12,92	7,70	7,94	10.725	10.894	71,14	71,99
Bungo	73,49	73,76	12,64	12,66	8,29	8,39	11.956	12.224	73,08	73,57
Kota Jambi	74,61	74,85	15,38	15,54	11,21	11,32	12.597	12.783	80,38	80,93
Kota Sungai Penuh	73,73	74,01	14,81	14,83	10,34	10,36	10.745	11.027	76,75	77,20
Indonesia	73,70	73,93	13,10	13,15	8,69	8,77	11.479	11.899	73,77	74,39

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Keterangan :

UHH : Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Dimensi Kesehatan Kabupaten/Kota

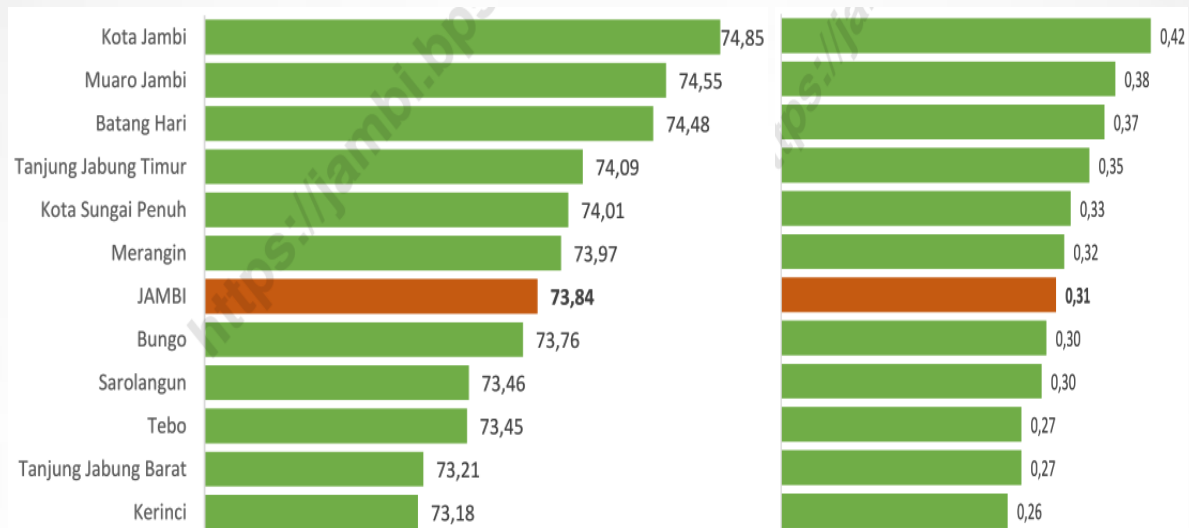
Dari seluruh kabupaten/kota se-Jambi di tahun 2023, penduduk Kota Jambi memiliki umur harapan hidup tertinggi yaitu 74,85 tahun, disusul Kabupaten Muaro Jambi dengan UHH 74,55 tahun, dan pada urutan ketiga ditempati oleh Kabupaten Batang Hari yang mencatat UHH sebesar 74,48 tahun. Dari kedua kota di Provinsi Jambi, yang lebih tinggi pertumbuhan umur harapan hidupnya adalah Kota Sungai Penuh sebesar 0,38 persen, sedangkan Kota Jambi mencatat peningkatan sebesar 0,32 persen dari tahun 2022.

Apabila dibandingkan antara UHH di wilayah kota dengan umur harapan hidup di wilayah kabupaten, maka umur harapan hidup wilayah kota lebih tinggi dibandingkan dengan umur harapan hidup wilayah kabupaten. Hal ini antara lain karena fasilitas layanan kesehatan dan tenaga medis yang tersedia di wilayah kota lebih banyak dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakatnya. Keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pemulihan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit. Ketersediaan fasilitas juga dipengaruhi faktor lokasi apakah di pedesaan atau perkotaan.

Pada tahun 2023, Kabupaten Kerinci tercatat sebagai kabupaten dengan UHH terendah di Provinsi Jambi yaitu sebesar 73,18 tahun. Walaupun demikian Kabupaten Kerinci meraih laju pertumbuhan UHH di atas laju Provinsi Jambi. Pertumbuhan UHH tertinggi ditempati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

sebesar 0,42 persen. Pada tempat kedua dan ketiga ada Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo dengan pertumbuhan UHH dari tahun 2022 sebesar 0,38 dan 0,37 persen. Sedangkan untuk Kabupaten Tebo, Sarolangun, dan Merangin, pertumbuhan UHH penduduknya di bawah 0,30 persen.

Diagram 3.16. Capaian dan Pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Persen), 2023



Dimensi Pendidikan Kabupaten/Kota

Pada level kabupaten/kota kondisi dimensi pendidikan beragam, ada yang berada di atas Provinsi Jambi dan ada yang berada dibawahnya. Selama kurun waktu 2020-2023 seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan capaian rata-rata lama sekolah (RLS) dengan angka yang bervariasi antar kabupaten/kota. Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dapat diamati bahwa penduduk Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh merupakan kota dengan capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas tertinggi.

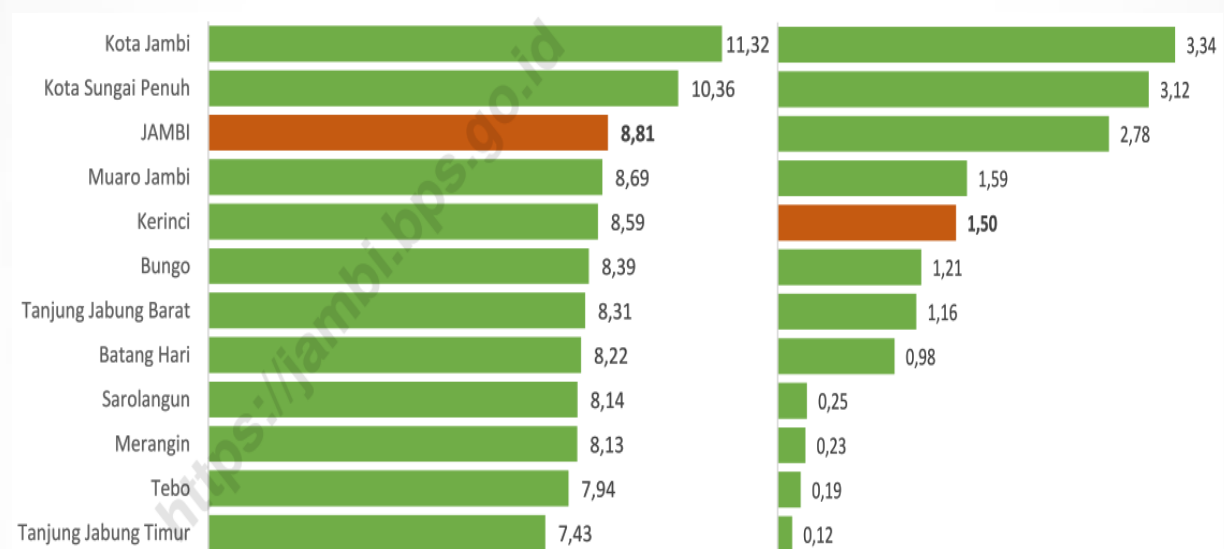
Pada tahun 2020 RLS Kota Jambi hanya mencapai 10,92 tahun, meningkat menjadi 11,20 pada tahun berikutnya hingga tahun 2023 mencapai 11,32 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Jambi mencapai 11,32 tahun atau setara dengan kelas XI (kelas II SMA). Sedangkan RLS Kota Sungai Penuh pada tahun 2020 masih berada pada angka 10,32 tahun. Setiap tahun RLS Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 10,36 tahun, artinya penduduk 25 tahun ke atas di Kota Sungai Penuh mampu bersekolah hingga 10,36 tahun atau setara dengan kelas X (kelas I SMA).

Sementara capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada wilayah kabupaten di Provinsi Jambi belum sampai pada angka 9 tahun (Lampiran 3). Dari Sembilan kabupaten yang ada, RLS tertinggi pada tahun 2023 dicapai Kabupaten Muaro Jambi dengan angka sebesar 8,69 tahun atau setara dengan kelas IX (kelas III SMP). Kemudian pada posisi berikutnya adalah Kabupaten Kerinci dengan capaian RLS sebesar 8,59 tahun, disusul Kabupaten Bungo sebesar 8,39 tahun. Posisi selanjutnya yaitu

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Batang Hari dengan RLS masing-masing sebesar 8,31 tahun dan 8,22 tahun.

Sedangkan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, capaian RLS sudah di atas 7 tahun, yaitu 7,43 tahun. Akses yang sulit dan sedikitnya pilihan sekolah di Tanjung Jabung Timur ditengarai menjadi penyebab rendahnya rata-rata lama sekolah disana. Dengan demikian dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas tertinggi dicapai oleh Kota Jambi dan yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pertumbuhan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas kabupaten/kota seluruh Provinsi Jambi juga terlihat beragam.

Diagram 3.17. Capaian dan Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Persen), 2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Tahun 2023 pertumbuhan RLS tertinggi diraih oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 3,34 persen. Peningkatan RLS tertinggi kedua diraih oleh Kabupaten Tebo dengan pertumbuhan sebesar 3,12 persen dari tahun 2022. Pada posisi ketiga dan keempat ada Kabupaten Merangin dan Tanjung Jabung Barat yang RLS penduduknya meningkat sebesar 2,78 persen dan 1,59 persen. Kabupaten Bungo dan Muaro Jambi menempati posisi kelima dan keenam dengan pertumbuhan RLS sebesar 1,21 persen dan 1,16 persen. Sementara untuk kabupaten/kota yang lain, pertumbuhan RLS pada tahun 2023 berada di bawah 1 persen.

Dimensi Standar Hidup Layak

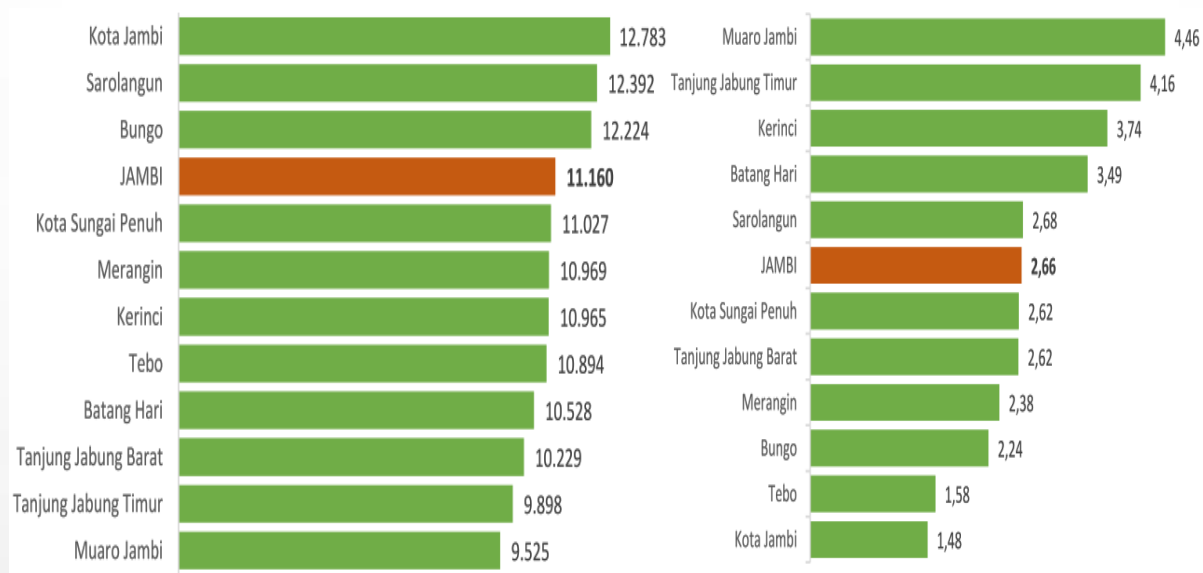
Dari sebelas kabupaten/kota se-Jambi, Kota Jambi tercatat sebagai kota dengan pengeluaran per kapita tertinggi sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kota Jambi tercatat sekitar 12,06 juta rupiah dan pada tahun 2023 bertambah sekitar 727 ribu rupiah menjadi 12,78 juta rupiah. Pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kota Jambi pada tahun 2020 sekitar 1,00 juta rupiah, meningkat menjadi 1,07 juta rupiah di tahun 2023.

Sementara itu, pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Muaro Jambi hanya sebesar 9,53 juta rupiah pada tahun 2023 atau sekitar 794 ribu rupiah per kapita per bulan.

Pengeluaran per kapita terbesar kedua pada tahun 2023 diraih Kabupaten Sarolangun dengan pengeluaran per kapita sebesar 12,39 juta rupiah per tahun atau sekitar 1,03 rupiah per bulan. Selanjutnya pada posisi ketiga ditempati Kabupaten Bungo dengan pengeluaran per kapita per tahun sebesar 12,22 juta rupiah atau sekitar 1,02 ribu rupiah per bulan. Untuk delapan kabupaten/kota yang lain, terlihat pengeluaran per kapita per tahun penduduknya berkisar antara 9,53 sampai dengan 11,03 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan pengeluaran per kapita per tahun penduduk Jambi secara umum, ada 3 kabupaten/kota yang pengeluaran per kapita per tahunnya lebih tinggi dari pengeluaran per kapita Provinsi Jambi pada Tahun 2023. Kabupaten/kota yang dimaksud adalah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Bungo.

Laju pertumbuhan pengeluaran per kapita per tahun penduduk kabupaten/kota tahun 2023 rata-rata mengalami pertumbuhan di atas 2 persen. Pertumbuhan terendah terdapat di Kabupaten Tebo dan Kota Jambi sebesar 1,58 dan 1,48 persen. Sementara yang paling tinggi pertumbuhannya adalah Kabupaten Muaro Jambi (4,46 persen). Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kerinci, dan Batang Hari juga tumbuh di atas 3 persen. Sedangkan laju pertumbuhan pengeluaran per kapita pada 5 kabupaten lainnya berkisar antara 2,24 sampai 2,68 persen.

Diagram 3.18. Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Persen), 2023



Gambar 3. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi Tahun 2023



Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
9. Program Pengelolaan Pendidikan
10. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
11. Program Pengembangan Kurikulum
12. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
13. Program Pengembangan Daya Saing Olahraga
14. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
15. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
16. Program Pembinaan Perpustakaan
17. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
18. Program Pembinaan Sejarah
19. Program Pengelolaan Permuseuman
20. Program Pengembangan Kebudayaan
21. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
22. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan
23. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
24. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan
25. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan konflik Sosial

26. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Sertabudaya Politik

27. Program Peningkatan Ketenteramandan Ketertiban Umum

Permasalahan :

1. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan indikator Indonesia Sehat telah memenuhi standar minimal namun belum tersebar merata sesuai kebutuhan pada masing-masing kabupaten/ kota se- Provinsi Jambi.
2. Pola pengasuhan (perawatan, pemberian makanan dan lain-lain) anak balita yang berkembang di masyarakat masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan turun- temurun yang kadangkala belum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan.
3. Kesenjangan kemampuan siswa yang cukup tinggi di seluruh Kabupaten/ kota se- Provinsi Jambi serta kepercayaan diri siswa untuk bersaing dengan siswa lainnya secara nasional masih harus terus didorong.
4. Kesenjangan kualitas sekolah menengah masih cukup tinggi.

Solusi :

1. Standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi
2. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
3. Pemberdayaan posyandu dan puskesmas serta tenaga kesehatan untuk terus mengintensifkan penyuluhan kepada para orang tua agar menerapkan cara hidup sehat khusus balita seperti pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala, menjaga kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, perawatan anak saat sakit, menjauhkan anak dari bahaya, menstimulasi perkembangan anak, imunisasi dan upaya pencegahan penyakit, pemberian vitamin A dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.

4. Bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan pada puskesmas dan jaringannya sehingga integrasi program gizi dan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan terlaporkan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kapasitas guru sekolah menengah, uji coba kompetisi tingkat nasional dan internasional serta pemberian motivasi kepada siswa-siswa SMA dan SMK harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
6. Pemberian beasiswa di seluruh jenjang pendidikan.

SASARAN STRATEGIS 8 :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender

Indikator Kinerja :
INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER



INDIKATOR KINERJA : INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

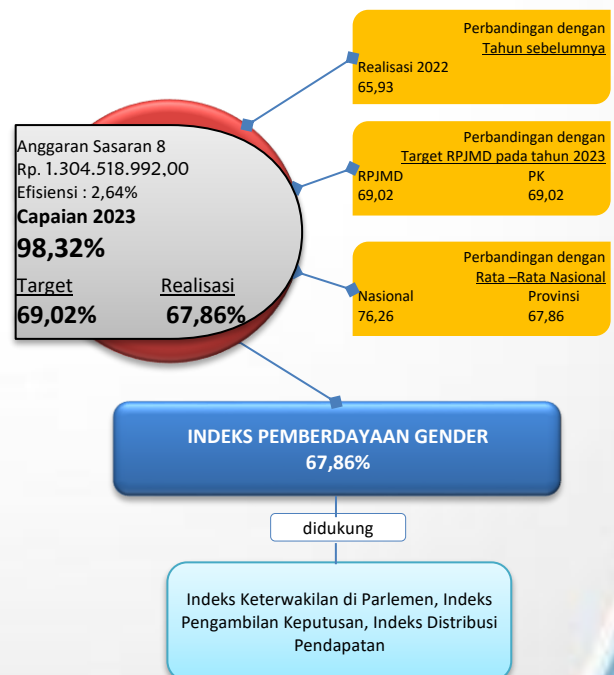
Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga, kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat

kemajuan perempuan yang juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera secara umum.

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Gender berbeda dengan jenis kelamin, jika jenis kelamin diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin secara biologis, maka gender diartikan sebagai konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Isu kesetaraan gender merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam salah satu tujuan SDGs mengungkapkan mengenai diskriminasi dan aspek pemberdayaan perempuan.

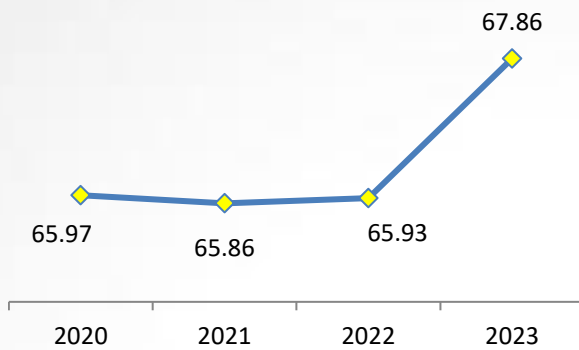
IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada tiga indikator penyusunnya yaitu persentase keterwakilan perempuan di parlemen, persentase keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional, administrasi dan teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender yang dikeluarkan pada tahun 2023 merupakan angka IDG tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :



Perkembangan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.14. Perkembangan IDG



Sumber : DP3AP2 Provinsi Jambi

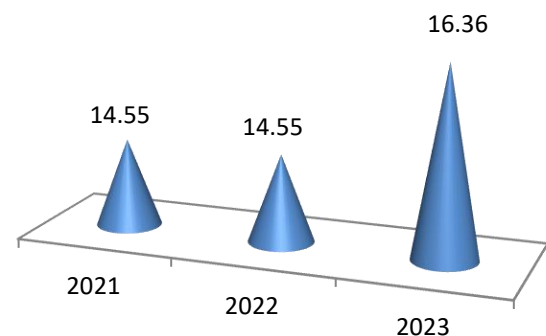
Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Potret keterlibatan perempuan dalam Politik di Indonesia merupakan wujud dari terciptanya sebuah negara demokrasi dimana partisipasi dan representasi yang seimbang menjadi sebuah persyaratan penting (Rahmatunnisa, Mudyati. 2018). Adapun Pemikiran mendasar dari demokrasi itu ialah mengenai konsep partisipasi politik yang juga mengacu pada aspek keterlibatan perempuan. Sehingga kegiatan-kegiatan politik yang melibatkan partisipasi masyarakat (pemilu, bergabung dalam partai politik, menjadi anggota legislatif, dan sebagainya) harus memperhatikan aspek keterwakilan perempuan.

Dewasa ini, pentingnya partisipasi perempuan dalam politik didasarkan atas beberapa pertimbangan yakni adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik, serta tuntutan terhadap adanya pembuatan kebijakan publik yang lebih feminis dalam lembaga legislatif. Pada pemilu legislatif tahun 2019, caleg perempuan yang terpilih dan mendapat kursi di Lembaga DPRD Provinsi Jambi mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 14,54% dari jumlah keseluruhan anggota dewan yang berjumlah 55 (lima puluh lima) orang.

Kegiatan pemilihan umum anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal selalu dihadapkan dengan permasalahan tentang partisipasi politik kaum perempuan dalam kegiatan pemilu legislatif dan minimnya jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai dampak lanjutnya. Permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penyelenggaraan pemilu legislatif. Pada pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan di Provinsi Jambi tahun 2019 didapati bahwa jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD 2019-2024 belum mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan, dan mengalami peningkatan sebesar 1,81% dari periode pemilu legislatif sebelumnya.

Diagram 3.19. Trend Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Jambi 2019-2024

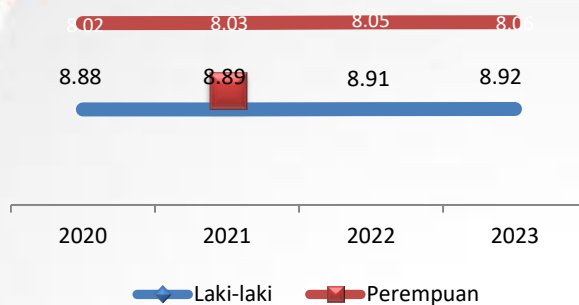


Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, 2023

Keterwakilan Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional berhubungan erat dengan akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan Jambi Dalam Angka tahun 2023, akses perempuan dalam hal pendidikan di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah perempuan yang terus meningkat, walaupun masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki.

Grafik 3.19. Perkembangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan



Sumber : BPS Provinsi Jambi, data diolah 2023, 2024

Gender dan Partisipasi Perempuan Dalam Perekonomian

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Gender berbeda dengan jenis kelamin, jika jenis kelamin diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin secara biologis, maka gender diartikan sebagai konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Isu kesetaraan gender merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam salah satu tujuan SDGs mengungkapkan mengenai diskriminasi dan aspek pemberdayaan perempuan.

Terkait dengan ekonomi, analisis gender dapat dikaitkan kedalam berbagai aspek, antara lain pasar kerja, lapangan usaha, sampai kepada layanan keuangan. Dengan menganalisis partisipasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek ini, maka dapat dilihat juga seberapa jauh akses dan peran perempuan didalam perekonomian sebagai salah satu indikator pengukuran keberhasilan target SDGs.

Sejumlah studi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan ketimpangan gender. Kesetaraan gender memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana hubungan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah pendidikan dan ketenagakerjaan. Keterkaitan antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi salah satu prosesnya melalui aspek ketenagakerjaan. Untuk

aspek ketenagakerjaan ini salah satu analisisnya adalah dengan melihat aspek pasar tenaga kerja, status pekerjaan, juga upah pekerja perempuan dibandingkan dengan upah buruh laki-laki.

Di satu sisi pembangunan ekonomi dapat memperbaiki kondisi perempuan dan menurunkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Disisi lain, keterlibatan perempuan dalam ekonomi merupakan salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi. Ketika lebih banyak perempuan yang bekerja, ekonomi akan tumbuh. Kenaikan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja akan mengantar pada penurunan kesenjangan antara partisipasi perempuan dan laki-laki dalam angkatan kerja. Hal ini pada gilirannya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Selain itu, perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dapat melakukan kegiatan ekonomi yang bernilai lebih tinggi. Kesetaraan gender membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Membaiknya kesetaraan gender dapat membuat pasar tenaga kerja menjadi lebih kompetitif.

Ketimpangan gender dalam ekonomi memiliki banyak dimensi. Beberapa dimensi ketimpangan gender dalam ekonomi antara lain mencakup akses terhadap sumber daya ekonomi, akses terhadap pasar tenaga kerja, kondisi pasar tenaga kerja, dan rekonsiliasi antara mengurus keluarga dan bekerja. Kemajuan pencapaian kesetaraan gender dalam ekonomi diukur dengan kemajuan sejumlah indikator yang mencerminkan berbagai dimensi tersebut.

Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur akses terhadap sumber daya ekonomi antara lain : persentase penduduk yang mengakses komputer, persentase penduduk yang mengakses internet, persentase penduduk yang mendapatkan pelatihan kerja dan persentase penduduk yang mengakses kredit.

Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi

Akses terhadap pasar tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dalam analisis

ketimpangan gender dalam ekonomi. Indikator akses terhadap pasar tenaga kerja merefleksikan sejauh mana sebuah negara memberikan peluang pekerjaan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Termasuk dalam indikator akses terhadap pasar tenaga kerja, antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengukur peluang penduduk untuk mengakses pasar tenaga kerja yang ada. Indikator lain adalah persentase penduduk yang bekerja dan rasio penduduk bekerja terhadap total penduduk. Kedua indikator ini memberikan informasi tentang efisiensi ekonomi untuk menyediakan pekerjaan dan juga mengindikasikan berapa banyak penduduk suatu negara berkontribusi pada produksi barang dan jasa.

Selain itu, kedua indikator tersebut juga mengukur tenaga kerja potensial yang belum dimanfaatkan. Indikator persentase penduduk yang bekerja juga perlu disajikan berdasarkan aktivitas kegiatan ekonomi untuk melihat di sektor mana penduduk yang bekerja terkonsentrasi, serta berdasarkan kelompok umur dan pendidikan untuk melihat lebih jauh karakteristik penduduk yang bekerja. Hal ini penting karena dapat digunakan untuk melihat lebih dalam permasalahan ketimpangan gender dalam ekonomi.

Termasuk indikator akses terhadap pasar tenaga kerja adalah angka pengangguran dan tingkat setengah pengangguran. Tingkat pengangguran dapat menjadi indikator ketidakpaduan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu negara. Tingkat pengangguran paruh waktu (*part time employment rate*), di satu sisi memberikan fleksibilitas, tetapi di sisi lain hal ini mengindikasikan upah yang rendah, kurangnya keterjaminan pekerjaan dan keterbatasan akan kesempatan terhadap pelatihan profesional dan promosi karir dibandingkan pekerjaan penuh waktu (*fulltime employment*). Jika kedua indikator dan indikator lain terkait akses terhadap pasar tenaga kerja didisagregasi menurut jenis kelamin akan memberikan gambaran perbedaan yang sistematis terkait ketimpangan gender dalam ekonomi khususnya terkait dengan akses terhadap pasar tenaga kerja.

Selain akses terhadap pasar tenaga kerja, situasi pasar tenaga kerja juga merupakan dimensi penting karena dapat mengukur sejauh mana ketimpangan gender terjadi dalam dunia kerja khususnya terkait dengan masalah upah dan pekerjaan layak. Untuk menentukan status ekonomi laki-laki dan perempuan, tidak cukup hanya mempertimbangkan status bekerjanya seseorang, melainkan juga perlu melihat kondisi pekerjaan dan tingkat upah/pendapatannya. Selain lapangan usaha, kondisi pasar tenaga kerja akan lebih tergambar lagi pada tingkat upah pekerja karena bagi sebagian besar pekerja, upah merepresentasikan bagian utama dari pendapatan mereka. Dengan demikian rata-rata upah menurut jenis pekerjaan memberikan indikasi standar hidup dan kondisi kerja dari kelompok pekerja yang berbeda.

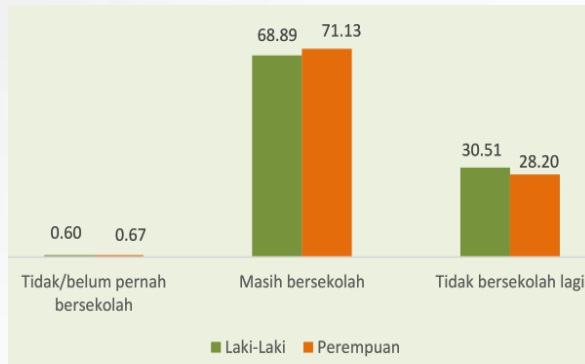
Peluang Meningkatkan Akses Terhadap Sumber Daya Melalui Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam pemberdayaan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pendidikan akan meningkatkan peluang dalam penguasaan teknologi, sehingga pada akhirnya mampu memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan. Seiring dengan meningkatnya kapabilitas melalui pendidikan, *human capital* juga meningkat dan pada gilirannya akan berperan besar dalam pembangunan. *Human capital* dapat diartikan kemampuan dan efisiensi manusia dalam mengubah bahan mentah dan modal menjadi barang dan jasa, secara konsensus kemampuan tersebut diperoleh melalui sebuah sistem pendidikan. Sistem pendidikan tersebut sudah seharusnya tidak diskriminatif dan menjamin kesetaraan kesempatan dan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap pendidikan.

Upaya pemerintah baik pusat maupun di Provinsi Jambi untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam sistem pendidikan; telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Sekalipun mungkin masih kita temui permasalahan dalam implementasinya akibat faktor sosial dan norma di dalam masyarakat tertentu. Kondisi ini dapat memicu munculnya berbagai bentuk ketidakadilan

dan kesenjangan baik akses maupun kesempatan antara laki-laki dan perempuan.

Diagram 3.20. Persentase Penduduk 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2022 (2023)



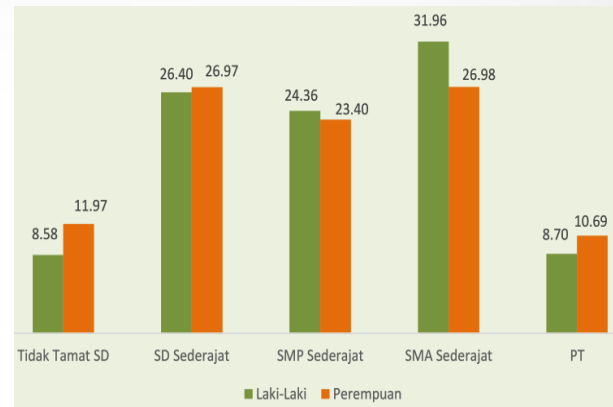
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023, 2024

Capaian bidang pendidikan pada tahun 2022 (2023) di Provinsi Jambi dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah, angka harapan sekolah, dan lain-lain. Capaian dasar terkait partisipasi sekolah penduduk usia 7-24 tahun antara anak/remaja laki-laki dan perempuan terlihat terjadi sedikit ketimpangan. Anak/remaja perempuan yang masih bersekolah hingga usia 24 tahun telah mencapai 71,13 persen; lebih tinggi dibanding anak/remaja laki-laki (68,89%). Namun ketimpangan tidak terlihat untuk kategori yang tidak/belum pernah sekolah; dimana nilainya sangat rendah berada sekitar 0,6 persen.

Partisipasi sekolah yang dapat dituntaskan oleh seseorang dapat dilihat dari pendidikan terakhir yang berhasil ditamatkan. Capaian indikator ini masih menunjukkan indikasi adanya ketimpangan gender, utamanya pada jenjang SMA sederajat. Persentase penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah terakhir SMA sederajat adalah 31,96 persen; lebih tinggi dibanding penduduk perempuan yang persentasenya sebesar 26,98 persen. Namun hal sebaliknya terjadi untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi; di mana justru capaian penduduk perempuan lebih tinggi (10,69% dibanding 8,70%). Hal ini dapat dikaitkan dengan partisipasi penduduk laki-laki yang lebih cepat dibanding perempuan dalam pasar tenaga kerja; sehingga

memaksa laki-laki untuk menyudahi partisipasi sekolahnya di tingkat SMA/ sederajat.

Diagram 3.21. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, Provinsi Jambi, 2022 (2023)



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023, 2024

Ulasan di atas menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih terjadi, walaupun sudah banyak perempuan di Provinsi Jambi yang berpikiran maju untuk meraih pendidikan tinggi namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak penduduk yang beranggapan pendidikan tinggi tidak untuk kaum perempuan. Hal ini terbukti dari capaian rata-rata lama sekolah perempuan yang sedikit lebih rendah dari laki-laki (8,39 dibanding 8,96). Namun peluang dan harapan untuk lebih lama bersekolah tetap ditunjukkan perempuan dengan capaian 13,27; lebih tinggi dari laki-laki (12,96). Sayangnya capaian pembangunan manusia untuk kelompok penduduk perempuan masih cukup nyata bedanya dengan laki-laki. Pada Tabel 2.1 terlihat IPG perempuan hanya 68,09; cukup jauh di bawah capaian laki-laki (76,55).

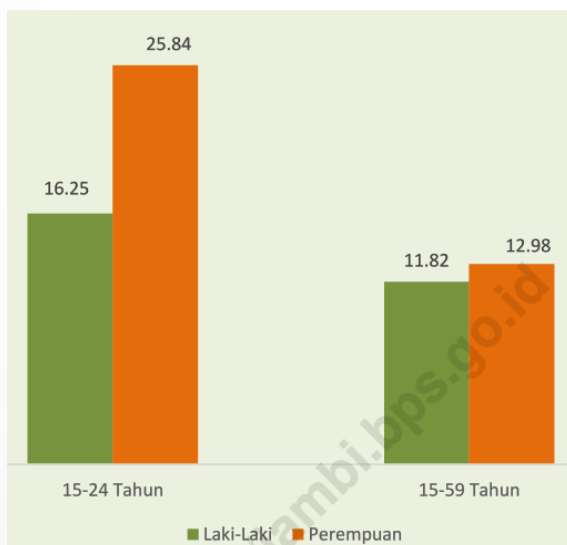
Ketimpangan Gender dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi sebagai salah satu sumber daya seharusnya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh setiap masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam hal ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) begitu pesat dan telah masuk dalam setiap bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan TIK telah mengubah cara masyarakat untuk berkomunikasi dan melakukan pekerjaan.



Contoh lain misalnya banyak perempuan yang lebih memilih bekerja di rumah karena dengan bekerja di rumah selain memiliki fleksibilitas jam kerja, mereka juga masih dapat mengerjakan pekerjaan rumah dan tetap membantu menambah income keluarga.

Diagram 3.22. Persentase Penduduk yang Mengakses Komputer Menurut Jenis kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2022 (2023)



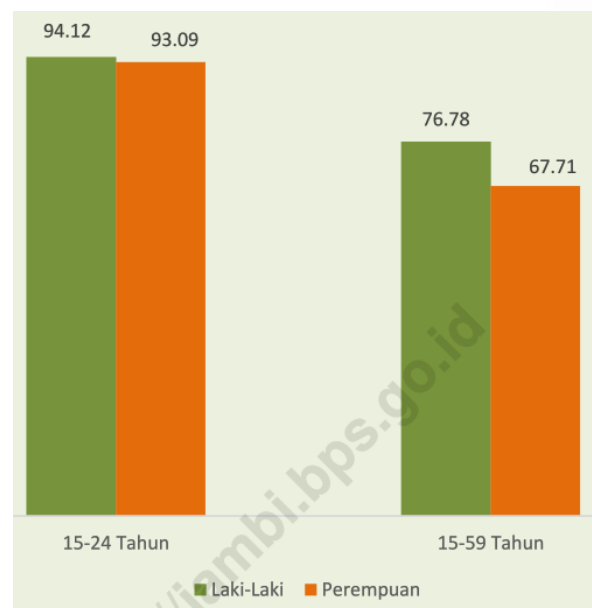
Sumber : BPS Provinsi Jambi Susenas 2023 (2024)

Akses terhadap TIK dalam analisis ini dilihat dari akses terhadap komputer dan internet. Gambar diatas menunjukkan perbedaan yang nyata terkait akses perempuan terhadap komputer untuk kelompok umur 15-24 tahun dan 15-59 tahun. Pada kelompok umur yang relatif muda dan usia sekolah (15-24 tahun), justru akses perempuan lebih banyak (25,84%). Namun sangat berbeda untuk kelompok umur menjelang lansia (15-59 tahun); persentasenya relatif sama antara laki-laki dan perempuan, sekitar 12-13

persen. Ini mungkin berkaitan dengan partisipasi perempuan di dunia pendidikan yang sudah relatif setara dengan laki-laki.

Untuk akses internet, capaiannya dapat dikatakan sangat luar biasa; apalagi untuk kelompok umur 15-24 tahun. Pemanfaatan internet bukan hanya sebagai media komunikasi tapi telah berkembang menjadi sarana untuk belajar, berwiraswasta, mencari kerja, dan berbagai manfaat lainnya. Lebih dari 90 persen penduduk laki-laki usia 15-24 tahun di Provinsi Jambi memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-harinya; lebih tinggi dari perempuan (93,09%). Hal yang sama terjadi pada kelompok umur 15-59 tahun; di mana perempuan pada usia produktif hingga lansia yang mengakses internet persentasenya lebih rendah dari laki-laki.

Diagram 3.23. Persentase Penduduk yang mengakses Internet Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2022 (2023)



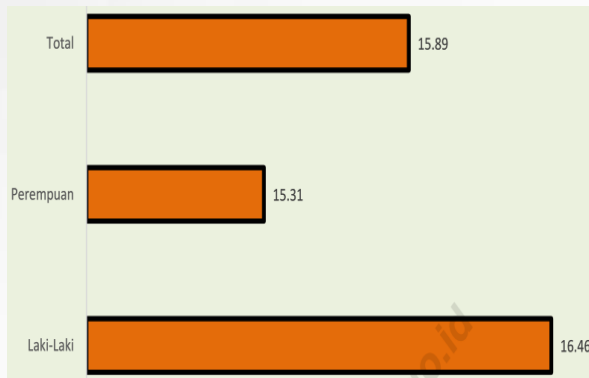
Sumber : BPS Provinsi Jambi Susenas 2023 (2024)

Akses Perempuan Terhadap Pelatihan Kerja

Salah satu upaya pemberdayaan perempuan adalah dengan meningkatkan peranan dan keterlibatan perempuan khususnya di bidang ekonomi. Misalnya dengan mengadakan pelatihan kerja bagi perempuan dan memberikan kredit usaha bagi perempuan. Gambar dibawah menunjukkan persentase penduduk 15 tahun ke

atas yang mendapatkan pelatihan kerja tahun 2022.

Diagram 3.24. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Provinsi Jambi, 2022 (2023)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Pada gambar diatas terlihat bahwa persentase perempuan dan laki-laki yang mendapatkan pelatihan kerja hampir sama, namun jumlah perempuan lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki. Dengan bekal keterampilan yang didapatkan pada pelatihan kerja ini, akan dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan perempuan untuk memperluas pilihan dan peluang kerja serta dapat berpartisipasi secara setara dengan laki-laki di pasar tenaga kerja. Pada akhirnya, dengan semakin terbukanya pilihan dan peluang tersebut akan menaikkan taraf hidup perempuan menjadi lebih sejahtera.



Stagnasi Partisipasi Angkatan Kerja dalam Kesenjangan



Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Jambi tahun 2022 sebesar 67,84 yang berarti terdapat sekitar 67-68 orang di antara 100 penduduk usia kerja yang berpartisipasi aktif di pasar kerja. Ditinjau dari jenis kelamin, secara signifikan partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan TPAK perempuan sebesar 48,97 sementara TPAK laki-laki sebesar 86,17.

Diagram 3.25. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2022 (2023)

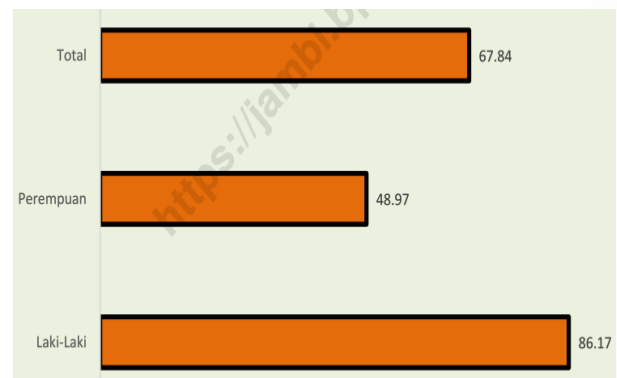
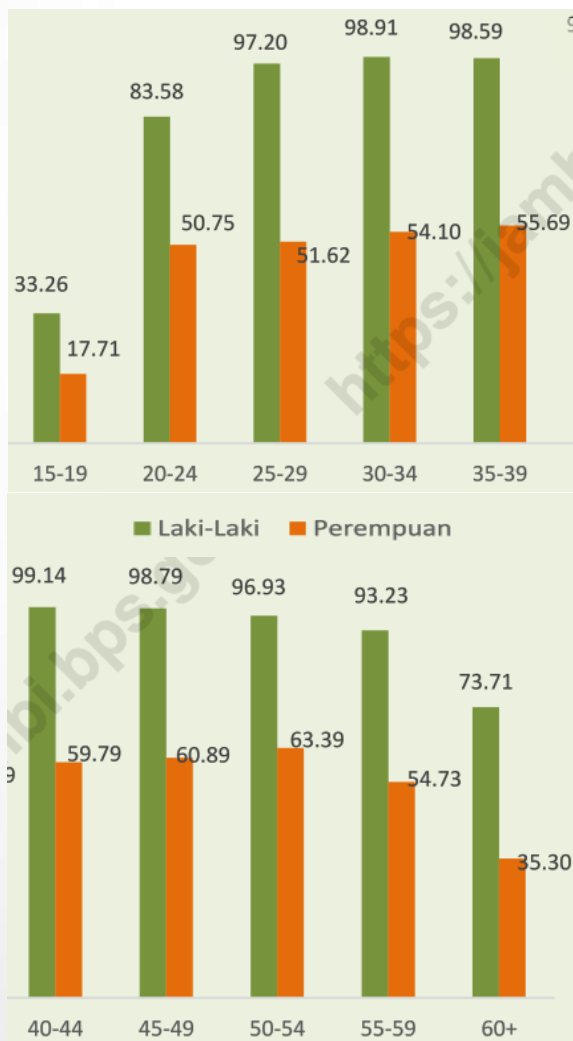


Diagram diatas menunjukkan, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki hampir dua kali lipat dibandingkan perempuan. Meskipun peningkatan taraf pendidikan saat ini hampir dapat diperoleh secara merata, pada kenyataannya belum dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya suatu program atau kebijakan sosial yang lebih aktif mendorong peran perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja dan terlibat dalam pekerjaan di luar rumah.

Partisipasi angkatan kerja perempuan yang tergolong rendah ini mengindikasikan bahwa masih banyak perempuan yang sepenuhnya terlibat dalam kegiatan mengurus rumah tangga. Dengan

demikian, beberapa penyebab rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja antara lain: 1) persepsi terkait peran domestik perempuan; 2) berkaitan dengan persepsi tersebut adalah perangkat pengukuran, penentuan, atau pendefinisian pekerjaan perempuan; 3) sifat musiman, paruh waktu, dan informal dari kebanyakan pekerjaan perempuan. Dari data Sakernas 2022, diperoleh informasi bahwa penggunaan waktu terbanyak bagi perempuan adalah untuk mengurus rumah tangga yang merupakan nomor dua terbanyak (40,14%) dari kegiatan yang dilakukan seminggu yang lalu.

Diagram 3.26. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Provinsi Jambi, 2022 (2023)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022 (2023)

Secara umum TPAK menurut kelompok umur, mengalami peningkatan signifikan pada

kelompok umur 15-19 tahun menuju 20-24 tahun. Pada kelompok umur 25-29 tahun masih terjadi peningkatan TPAK, sementara itu pada kelompok umur 30 -34 tahun hingga 50-54 tahun terlihat TPAK yang relatif tidak berubah signifikan. Penurunan TPAK terjadi pada kelompok umur 55-59 tahun dan signifikan pada usia lansia. Lebih dalam dapat kita lihat adanya sedikit perbedaan pola TPAK laki-laki dan perempuan. Pada penduduk laki-laki, TPAK terus meningkat dan cenderung stabil hingga kelompok umur 50-54 tahun. Pola ini dapat dimaklumi karena pandangan umum masyarakat dimana laki-laki sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja menghidupi keluarganya.

Namun untuk perempuan terdapat pola yang berbeda, yakni berawal dengan TPAK yang sangat rendah di kelompok umur 15-19 tahun (17,71%) dan terus meningkat sampai kelompok umur 20-24 tahun (50,75). Hal ini dikarenakan pada kelompok umur 15-19 tahun wanita masih banyak yang belum memasuki pasar kerja, kemudian pada umur 20 tahunan atau setelah lulus sekolah mereka mulai memasuki pasar kerja. Pada kelompok umur 25-29 tahun, banyak wanita yang mulai menikah dan memiliki anak di kelompok umur tersebut menyebabkan partisipasi kerja perempuan hanya sebesar 51,62 persen pada kelompok umur 25-29 tahun; berbeda jauh dari capaian laki-laki (97,20%).



Selanjutnya TPAK perempuan terus mengalami peningkatan, hingga tertinggi di kelompok umur 50-54 tahun yang mencapai 63,39 persen. TPAK yang cenderung masih rendah pada

rentang umur 25-34 tahun kemungkinan berkaitan dengan rumah tangga dan keharusan mengurus anak, sehingga menjadi pertimbangan beberapa perempuan untuk berhenti bekerja sementara waktu. Sedangkan setelah usia 34 tahun, beban mengurus anak sudah mulai berkurang dan kebutuhan untuk membantu kehidupan keluarga dapat menjadi alasan TPAK perempuan meningkat hingga kisaran 60-64 persen. Memasuki usia 60 tahun, perempuan masih berkontribusi dalam pasar kerja, sekalipun persentasenya hanya sekitar 35 persen. Ketenagakerjaan merupakan salah satu tantangan pembangunan gender, dimana pemerintah terus berupaya bagaimana meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Jumlah penduduk perempuan yang hampir sama dengan jumlah penduduk laki-laki seharusnya dapat memberikan kontribusi nyata dengan berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Penduduk perempuan produktif yang tidak aktif secara ekonomi akan menjadi beban tanggungan bagi rumah tangganya, atau dengan kata lain meningkatkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*). Ketersediaan pasar tenaga kerja bagi perempuan menjadi faktor penting untuk memfasilitasi perempuan dalam pembangunan gender.

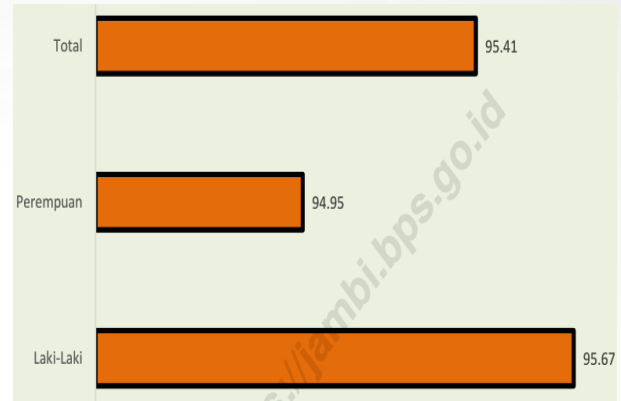
Kesenjangan Gender dalam Partisipasi Bekerja

Seiring jumlah penduduk yang semakin besar, kebutuhan akan kesempatan kerja juga semakin bertambah. Tingkat kesempatan kerja mengukur sejauh mana penduduk yang termasuk angkatan kerja memperoleh kesempatan untuk bekerja. Gambar berikut ini menunjukkan kesempatan kerja baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan tidak jauh berbeda. Pada tahun 2022, selisih kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang atau mengerucut yaitu tidak sampai 2 persen. Ini artinya, ketika perempuan telah memasuki pasar tenaga kerja, kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan relatif sama dengan laki-laki.

Namun kita juga harus melihat jenis dan bidang pekerjaannya, karena keberhasilan perempuan dalam pasar tenaga kerja tidak selalu mencerminkan kapasitas diri perempuan terkait

pendidikan dan keterampilannya. Hal ini akan diulas pada bab lain dari publikasi ini.

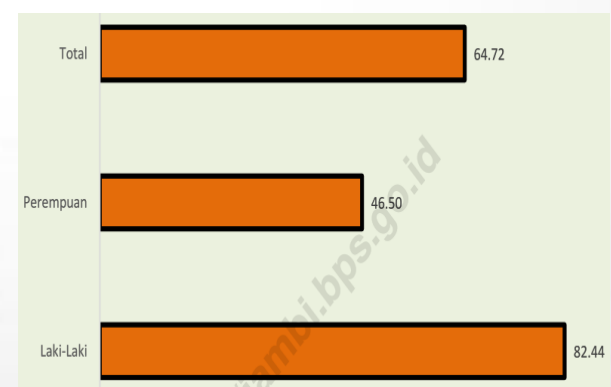
Diagram 3.27. Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2022 (2023)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Selain TKK, ada indikator lain yang tidak kalah penting yang dapat menjelaskan fenomena perempuan dalam pasar tenaga kerja. *Employment to Population Ratio (EPR)* mengukur rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Diagram diatas menunjukkan ketimpangan EPR yang masih cukup nyata antara laki-laki dan perempuan, di mana penduduk laki-laki yang bekerja jauh lebih tinggi (82,44%) dibandingkan penduduk perempuan (46,50%). Ketimpangan nilai TKK dan EPR antara laki-laki dan perempuan secara implisit mengungkap adanya hal-hal non ekonomi yang berkaitan dengan sulitnya perempuan masuk ke dalam pasar tenaga kerja atau sebagai kelompok penduduk angkatan kerja.

Diagram 3.28. Rasio Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas (EPR/*Employment to Population Ratio*) Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Pada Diagram tersebut TKK perempuan tidak jauh berbeda dengan TKK laki-laki, namun menunjukkan EPR perempuan jauh lebih rendah dibandingkan EPR laki-laki. Gambaran ini mencerminkan bahwa masih banyak perempuan usia kerja yang sebenarnya berpotensi secara ekonomi, namun belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Mereka tidak masuk menjadi angkatan kerja bisa disebabkan karena masih mengenyam bangku sekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lain.

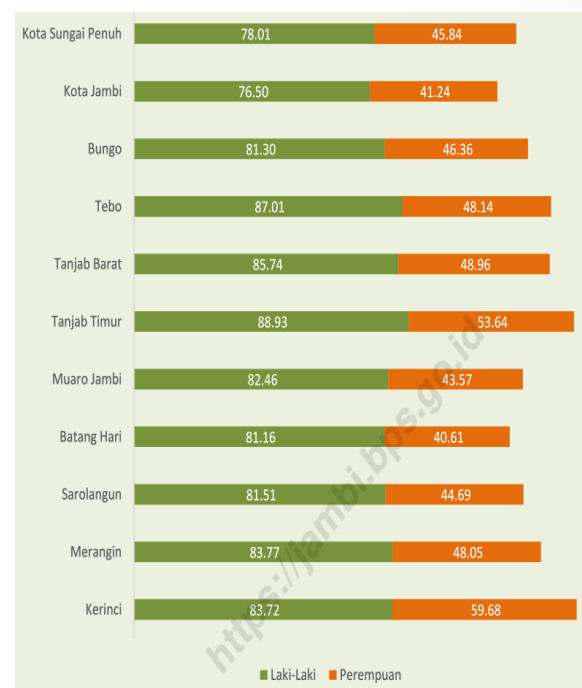
Stereotip budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat mengenai peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama tampaknya masih menjadi faktor dominan yang membatasi perempuan untuk bekerja. Kemajuan pendidikan perempuan seharusnya dapat membantu peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Perempuan diharapkan mampu berperan di semua sektor namun tetap tidak melupakan perannya dalam rumah tangga. Seorang pekerja perempuan atau wanita karir memiliki dua peran utama yang harus berjalan seimbang, yaitu bekerja dan mengurus rumah tangga. Tantangan ini seharusnya dapat dijawab tidak hanya oleh perempuan masa kini, tetapi juga oleh kaum laki-laki. Sehingga persepsi yang merendahkan posisi perempuan dapat terus tergerus.



Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Batang Hari merupakan kabupaten dengan persentase ketimpangan EPR laki-laki dan perempuan tertinggi (81,16% berbanding 40,61%) dibandingkan kabupaten/kota lainnya, sementara Kerinci menjadi wilayah

dengan ketimpangan EPR terendah (83,72% berbanding 59,68%). EPR laki-laki di setiap kabupaten/kota hampir merata berkisar antara 76 sampai 88 persen, sedangkan EPR perempuan persentasenya cenderung berbeda antar wilayah berkisar antara 40-59 persen. Hal ini menunjukkan akses pasar tenaga kerja terutama untuk penduduk perempuan belum tersebar secara merata di seluruh daerah di Provinsi Jambi.

Diagram 3.29. Rasio Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas (EPR) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2022 (2023)



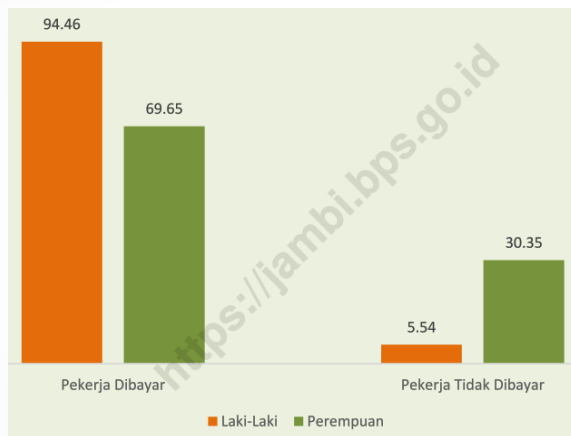
Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022 (2023)

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Batang Hari merupakan kabupaten dengan persentase ketimpangan EPR laki-laki dan perempuan tertinggi (81,16% berbanding 40,61%) dibandingkan kabupaten/kota lainnya, sementara Kerinci menjadi wilayah dengan ketimpangan EPR terendah (83,72% berbanding 59,68%). EPR laki-laki di setiap kabupaten/kota hampir merata berkisar antara 76 sampai 88 persen, sedangkan EPR perempuan persentasenya cenderung berbeda antar wilayah berkisar antara 40-59 persen. Hal ini menunjukkan akses pasar tenaga kerja terutama untuk penduduk perempuan belum tersebar secara merata di seluruh daerah di Provinsi Jambi.

Peran Perempuan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa peran ganda para perempuan pekerja adalah sebagai ibu rumah tangga (melahirkan, mengasuh anak, dan mengurus pekerjaan rumah tangga) sekaligus sebagai pekerja. Di satu sisi, wanita pekerja harus menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, tetapi di sisi lain, juga dituntut untuk terlibat bekerja untuk dapat membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu, peran perempuan sangat diperlukan sebagai salah satu kontributor dalam ekonomi rumah tangga.

Diagram 3.30. Persentase Pekerja Berstatus Kawin Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2022 (2023)

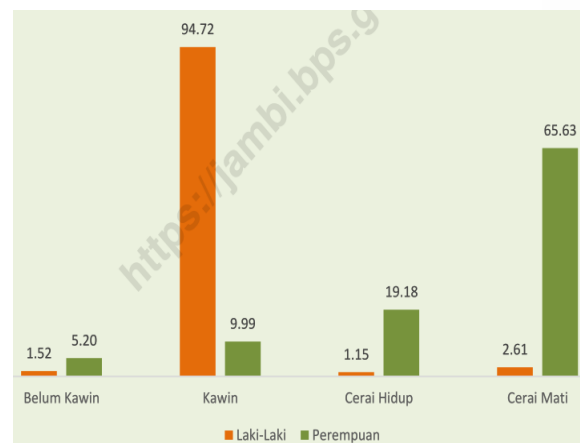


Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022 (2023)

Partisipasi perempuan yang bekerja salah satunya dilatarbelakangi karena sosial ekonomi yang rendah. Bagi perempuan yang berstatus kawin, tuntutan bekerja hanya sebatas membantu pendapatan suami yang belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Ada beberapa di antara mereka, tujuan bekerja bukan untuk mendapatkan upah/gaji/barang, melainkan hanya sekadar membantu suami atau orang lain dalam kegiatan usahanya, yang biasa disebut sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Menurut data Sakernas tahun 2022 (2023), masih cukup banyak (30,35%) perempuan berstatus kawin yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Hal ini mengindikasikan semakin banyak perempuan bersuami yang ingin berkontribusi secara finansial dalam perannya membantu

perekonomian keluarga, bukan hanya membantu secara fisik dan pikiran usaha pasangan tanpa balas jasa berupa uang atau barang. Sementara itu perempuan yang berstatus sebagai single parent atau single mother dalam memenuhi kebutuhan keluarga seluruhnya ditanggung sendiri tanpa mengandalkan bantuan dari suami. Keberadaan perempuan single mother sebagai kepala rumah tangga dikarenakan ketidakhadiran peran ayah sebagai kepala rumah tangga. Kondisi ini dapat terjadi akibat ditinggal cerai oleh suami (cerai hidup) atau ditinggal suami karena meninggal (cerai mati). Perempuan dengan status cerai mati memberikan dampak yang jauh lebih besar karena tidak adanya pasangan akibat kematian pasangan, sedangkan bagi perempuan yang cerai hidup akan merasakan efek traumatik dan tekanan emosional.

Diagram 3.31. Persentase Pekerja Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, Provinsi Jambi, 2022 (2023)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022 (2023)

Wanita berstatus single parent yang menjadi kepala rumah tangga akan lebih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga karena faktor ekonomi. Sebagai orang tua tunggal sekaligus kepala rumah tangga, mereka akan menanggung beban lebih berat. Di satu sisi harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga, di lain pihak harus memberi perhatian dan pendidikan bagi anaknya. Tugas-tugas yang dulu dikerjakan berdua dengan suaminya, sekarang harus dilakukan sendiri.

Pada diagram diatas terlihat bahwa perempuan pekerja yang juga berstatus sebagai kepala rumah tangga sebagian besar adalah yang berstatus cerai sebanyak 84,81 persen baik cerai

mati maupun cerai hidup. Sedangkan yang berstatus belum kawin dan kawin hanya sebagian kecil saja. Hal ini berarti mereka yang berstatus single parent, harus menanggung sendiri kebutuhan dirinya dan keluarganya karena berperan juga sebagai kepala rumah tangga. Pendapatan wanita single parent dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga terbatas akan umur. Umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang, khususnya dalam mengambil keputusan. Pada umumnya seseorang yang berada pada umur produktif dapat memperoleh pendapatan yang lebih jika dibandingkan dengan umur non produktif.



Dari beberapa aspek permasalahan yang dialami wanita single parent di atas, faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi permasalahan di dalam keluarga mereka. Permasalahan ekonomi tersebut adalah pekerjaan dan pendapatan yang dimiliki, sehingga single parent harus dapat bekerja dan memiliki penghasilan agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup keluarga beserta anak-anaknya. Tidak mudah bagi single parent untuk mendapatkan pekerjaan karena berbagai alasan, di antaranya karena sedikitnya lapangan kerja, persyaratan umur, waktu, dan persyaratan kerja lain seperti pendidikan tinggi dan fisik. Pilihan lain bagi single parent untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah berwirausaha. Peluang yang ada pun cukup besar jika ada keinginan dan motivasi yang kuat. Terlebih lagi jika single parent dapat menggunakan

kesempatan yang ia miliki dengan baik dan banyaknya relasi dengan laki-laki dalam bidang wirausaha agar tidak mengalami diskriminasi gender dalam berwirausaha.

Sebagai upaya untuk meningkatkan IDG ini maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender, Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan dan Pembinaan organisasi Perempuan. Program ini secara parsial didukung pula oleh beberapa program lain seperti program perwujudan demokrasi makin kokoh dan lain-lain.

Keadilan ekonomi bagi perempuan telah menjadi bagian program unggulan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menghilangkan ketimpangan gender. Perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dan berkontribusi di bidang ekonomi. Namun tidak mudah bagi perempuan untuk terjun dalam kegiatan ekonomi. Budaya dan pola pikir yang telah mengakar di kehidupan bermasyarakat terkait kedudukan perempuan membuat kaum perempuan harus menghadapi berbagai macam kendala untuk berkarya. Kendala terkait diskriminasi tersebut harus dihadapi perempuan setiap saat, mulai dari perannya dalam ekonomi keluarga hingga perannya dalam pasar tenaga kerja dan dunia usaha.

Dari sisi akses perempuan terhadap sumber daya, diskriminasi antar gender dapat terlihat dari akses pendidikan sebagai prasyarat dalam mengakses sumber daya ekonomi, akses teknologi informasi, dan akses terhadap pelatihan. Dalam akses pendidikan, kesetaraan sudah mulai terlihat; bahkan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi partisipasi perempuan sudah menyamai laki-laki. Sementara itu, dalam mengakses teknologi informasi persentase perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. Investasi modal

manusia juga dapat diperoleh dari pelatihan kerja, meskipun persentase perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki, namun perbedaan yang ada jumlahnya relatif kecil.



Hal ini menandakan perempuan di Provinsi Jambi sudah berupaya untuk terus mengejar ketinggalannya dalam berbagai akses yang ada, dan juga berarti Pemerintah Provinsi Jambi beserta institusi terkait lain sudah berupaya untuk meminimalkan kesenjangan gender yang dapat terjadi. Diskriminasi antar gender lebih terlihat jelas pada akses perempuan ke dalam pasar tenaga kerja.



Perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan cukup jauh. Keadaan tersebut menunjukkan banyaknya penghambat bagi kaum perempuan untuk masuk ke pasar kerja. Kesempatan kerja kaum perempuanpun tidak seluas kesempatan kerja kaum laki-laki. Banyak kualifikasi dan prasyarat tertentu seperti fisik dan

status berkeluarga yang tidak mudah untuk dipenuhi. Tidak hanya itu, jumlah pekerja perempuan yang banyak pada sektor pertanian dan perdagangan sangat rentan sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Perempuan masih dianggap dengan fisik yang lemah dan tanpa keahlian.



Meskipun adanya budaya patriaki yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan pemikiran stereotip bahwa perempuan sebagai sumber sekunder ekonomi keluarga, tidak serta merta menjadikan perempuan untuk tidak bisa mencurahkan dirinya dalam kegiatan ekonomi; walaupun masih dalam waktu yang terbatas. Perbedaan yang masih terlihat cukup nyata antara pekerja tidak penuh perempuan dibandingkan laki-laki, mengindikasikan bahwa jam kerja antara perempuan dan laki-laki relatif berbeda, yang juga menandakan bahwa peran perempuan belum seimbang dalam dunia kerja. Hal ini masih perlu dicermati secara detail mengenai status pekerjaan dan lapangan usahanya.

Kondisi perempuan dalam pasar tenaga kerja ternyata memperlihatkan bahwa pekerja perempuan lebih cenderung menjadi pekerja rentan. Padahal pekerja rentan ini identic dengan upah rendah dan tidak mendapatkan perlindungan sosial. Upah rendah yang diterima perempuan tersebut yang melahirkan kesenjangan upah antar gender. Selain itu, pekerja perempuan dianggap sebagai pekerja lajang, sehingga banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung tetapi tidak mendapatkan tunjangan untuk keluarganya. Antara berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan mengurus keluarga/rumah tangga merupakan suatu

dilema bagi kaum perempuan. Ketika perempuan bekerja dapat mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, hal ini akan menguntungkan banyak pihak. Hal tersebut yang menyebabkan banyak perempuan berstatus kawin dan cerai hidup memutuskan untuk bekerja.

Disatu sisi mereka tetap harus mengurus keluarganya, sementara di sisi lain mereka tetap harus bekerja untuk memenuhi sehari-hari. Bagaimanapun, perawatan keluarga tersebut terlihat dari jumlah jam kerja pekerja perempuan yang cenderung lebih kecil dari jam kerja pekerja laki-laki. Keputusan perempuan untuk bekerja juga dipengaruhi oleh jumlah tanggungan mereka. Semakin banyak jumlah tanggungan mereka, kecenderungan mereka untuk bekerja semakin besar.



Meskipun telah banyak kebijakan dan peraturan, diskriminasi antar gender masih terjadi di pasar tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan implementasinya yang belum optimal. Penghapusan diskriminasi gender dalam ekonomi tidak hanya dengan peran pemerintah tetapi juga membutuhkan peran pihak terkait seperti pengusaha, lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Kebijakan mengenai diskriminasi antar gender dapat dimulai dari aturan tentang cuti bersalin, pengasuhan anak, pengaturan jam kerja, dan kebijakan lain perlu diperhatikan guna meningkatkan kualifikasi dan akses perempuan. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan, jabatan, promosi, dan pelatihan.

Untuk masalah kewirausahaan, akses pelatihan dan permodalan yang kurang bagi perempuan ini memerlukan peraturan atau kebijakan yang memberikan perhatian khusus bagi pengusaha perempuan. Sifat atau kodrat perempuan yang biasanya lebih bersifat pasif memerlukan perhatian lebih dari pemangku kebijakan dalam pengembangan usahanya. Dengan demikian, produktivitas dan kinerja pekerja atau pengusaha perempuan akan meningkat dan mencapai kesetaraan gender, yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi kaum perempuan.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
3. Program Pengarusutamaan Gender Dan pemberdayaan Perempuan
4. Program Perlindungan Khusus Anak
5. Program Perlindungan Perempuan

Permasalahan :

Capaian IDG Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional akibat :

1. Terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Jambi sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen.
2. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan.
3. Blum optimalnya kerjasama dengan lembaga uang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.
4. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian kinerja.

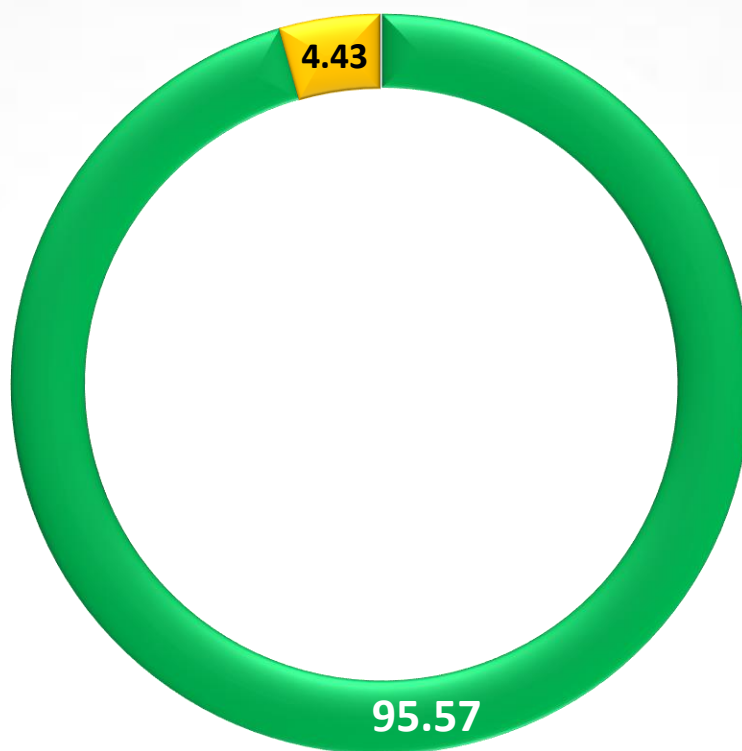
Solusi :

1. Perluasan akses pendidikan bagi perempuan
2. Perluasan akses bagi perempuan sebagaimana halnya laki-laki dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama antar keduanya.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.24. Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Efisiensi
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Rp. 338.106.078.349,32	92,70%	100%	7,30%
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 60.248.442.282,42	98,72%	100,13%	5,78%
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rp. 551.390.221.501,56	99,67%	96,78%	0,69%
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Rp. 31.178.711.299,00	86,45%	106,78%	13,65%
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Rp. 10.067.145.966,00	89,52%	99,34%	10,77%
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Rp.25.497.538.987,00	96,18%	100,24%	3,82%
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Rp. 770.821.140.480,37	94,71%	101,53%	5,32%
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Rp. 1.304.518.992,00	97,36	98,32%	2,64%
		Rp. 1.787.513.026.746,70	95,57%	100,30%	4,43%

REALISASI ANGGARAN

■ REALISASI ANGGARAN ■ EFISIENSI

Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi selama Tahun 2023 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 1.787.513.026.746,70 Pada akhir Tahun 2023, anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 1.713.292.990.086,17,- atau sebesar 95,85%. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 3, yaitu Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar sebesar 99,67%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 4, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan sebesar 86,45%%.

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 8 sasaran, terdapat 5 sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi capaian 100%. Berikut diinformasikan 8 capaian sasaran dan tingkat efisiensi dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas” tercapai melalui kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” dengan persentase sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 7,30%.
2. Sasaran “Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” tercapai melalui kinerja “Pertumbuhan PDRB Hijau” dan Indikator “Tingkat Kemiskinan” mencapai kinerja dengan persentase sebesar 100,13% dengan efisiensi anggaran sebesar 5,78%.
3. Sasaran “Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar” tercapai melalui kinerja “Rasio Konektivitas”, “Akses Terhadap Air Minum Layak”, dan “Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet” meraih tingkat capaian kinerja sebesar 96,78% dan efisiensi anggaran sebesar 0,69%.
4. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan” tercapai melalui kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” dan “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,78% dan efisiensi anggaran sebesar 13,65%.
5. Sasaran “Menurunnya Angka Pengangguran” tercapai melalui kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” dengan tingkat capaian sebesar 99,34% dan efisiensi anggaran sebesar 10,77%.
6. Sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses terhadap Pangan” dengan kinerja “Indeks Ketahanan Pangan” memperoleh capaian sebesar 100,24% dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 3,82%.
7. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, Berbudaya, Agamis dan Berkesetaraan Gender” tercapai melalui kinerja “Indeks Pembangunan Manusia” dengan tingkat capaian sebesar 101,53% dan memperoleh efisiensi sebesar 5,32%.
8. Sasaran “Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan” diukur melalui pencapaian kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender” dengan perolehan capaian sebesar 98,32% dan tingkat efisiensi sebesar 2,64%.

BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Jambi Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi. Laporan Kinerja ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis RPJMD dan Perjanjian Kinerja Gubernur Jambi Tahun 2023.

Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2023 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD sebesar 100,30%. Dari 12 IKU, sebanyak 7 Indikator berhasil melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi.

Sebagian sasaran strategis RPJMD belum mencapai kinerja sesuai dengan harapan yang ditandai oleh 5 target IKU yang belum tercapai. Pertama adalah “Akses terhadap Air Minum Layak”, “Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet”, “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”, “Tingkat Pengangguran Terbuka, dan “Indeks Pemberdayaan Gender”.

Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.787.513.026.746,70,- terealisasi sebesar Rp. 1.708.304.990.086,17,- dengan efisiensi sebesar 4,33%.

Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif strategis. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi semakin meningkat sehingga bisa mencapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.



LAMPIRAN



PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	4,75	4,75	100
		Tingkat Kemiskinan	7,60	7,58 (Maret)	100,26
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	54	54,05	100,09
		Akses terhadap Air Minum Layak	83,92	80,02	95,35
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	100	94,88	94,88
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,43	68,15	94,09
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO ₂ eq)	3,348 juta ton CO ₂ eq	4 juta ton CO ₂ eq	119,47
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50%	4,53	99,34
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	72%	72,17	100,24
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	72,62	73,73	101,53
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	69,02	67,86	98,32

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAERAH
DENGAN CAPAIAN NASIONAL
TAHUN 2022 DENGAN REALISASI 2023**

NO	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022			REALISASI				OPD PENANGGUNG JAWAB
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	2022	2023	RPJMD	NASIONAL 2023	
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	Kementerian PAN RB & Biro Organisasi
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	4,55%	4,6	4,75%	4,75%	Tidak ada data pembandingan	BPS, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas TPHP, Dinas Perkebunan, Dinas ESDM, Dinas Perindag, Dinas PUPR, Dinas LH
		Tingkat Kemiskinan	7,9	7,70 (Sept)	7.58	7.84	9,36	BPS, Dinas Sosial
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	53,9	52,69	54.05	54.0	73,39	Dinas Perhubungan
		Akses terhadap Air Minum Layak	79,08	78,86	80.02	83.92	91,72	BPS, Dinas PUPR
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	99%	89,9	94.88	100%	Tidak ada data pembandingan	Dinas Kominfo
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,07	70,32	68.15	72.43	72,54	Kementerian LHK, Dinas LH, Dinas Kehutanan
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO ₂ eq)	3,283 Juta ton CO ₂ eq	4 Juta ton CO ₂ eq	4 Juta ton CO ₂ eq	3.348 Juta ton CO ₂ eq	12,89	Bappeda, Tim Teknis Bidang Monitoring dan Reporting (MAR) Provinsi Jambi
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5	4,59	4.53	4.61	5,86	BPS
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	71	69,5	72.17	72	60,2	Dinas Ketahanan Pangan
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	72,14	72,14	73.73	72.62	74,39	BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	67,78	65,93	67.86	69.02	76,26	BPS, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jabatan : **GUBERNUR JAMBI**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, 20 Januari 2023

GUBERNUR JAMBI,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2.	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau	4,75%
		Tingkat Kemiskinan (September)	7,60%
3.	Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Rasio konektivitas	54,0
		Akses terhadap air minum layak	83,92%
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses internet	100%
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,43
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis lahan	3,348 juta ton CO ₂ eq
5.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka (Agustus)	4,50%
6.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan	72,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,62
8.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,02

Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	1.961.134.185.717
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	278.151.288.104
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp	967.450.000
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	48.396.966.215
5.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp	199.999.826
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	166.681.760.437
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	4.684.269.519
8.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	605.819.869
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	1.058.347.348
10.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	68.283.768.831
11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	2.900.000.000
12.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	4.549.999.970
13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	2.244.859.920
14.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	5.587.942.250
15.	Program Pengembangan Permukiman	Rp	24.299.199.150
16.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	206.340.000.100
17.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	25.150.000.000
18.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	520.850.357.583
19.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	3.999.997.701
20.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	3.041.454.000
21.	Program Kawasan Permukiman	Rp	14.395.357.648
22.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	1.970.141.979
23.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	4.749.479.467
24.	Program Penanggulangan Bencana	Rp	9.605.357.387

Program		Anggaran	
25.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	172.670.190
26.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	3.524.109.427
27.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp	244.999.126
28.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	17.740.395.292
29.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	2.874.315.901
30.	Program Penanganan Bencana	Rp	1.458.004.746
31.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	442.424.144
32.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	43.534.600
33.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	6.589.258.468
34.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	825.574.456
35.	Program Hubungan Industrial	Rp	432.647.904
36.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp	781.778.615
37.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	678.338.859
38.	Program Perlindungan Perempuan	Rp	419.644.352
39.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	165.585.056
40.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	438.345.828
41.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	7.272.197.000
42.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	4.346.927.917
43.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	4.003.540.250
44.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	320.030.227
45.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	999.400.000
46.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.239.229.050
47.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	1.105.009.745
48.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	Rp	769.323.647

Program		Anggaran	
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
49.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Rp	2.022.000.000
50.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	370.000.000
51.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	125.000.000
52.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	693.223.188
53.	Program Pencatatan Sipil	Rp	570.569.786
54.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	571.449.171
55.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	48.467.778
56.	Program Penataan Desa	Rp	45.012.600
57.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	89.997.264
58.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	364.681.882
59.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.744.763.121
60.	Program Pengendalian Penduduk	Rp	142.816.762
61.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	53.276.524
62.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	89.252.024
63.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	9.449.329.281
64.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp	804.967.000
65.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	18.035.261.389
66.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	8.517.413.425
67.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	135.000.000
68.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	245.994.780
69.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	113.999.920
70.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	3.246.713.532

Program		Anggaran	
71.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	676.539.512
72.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	22.821.081.606
73.	Program Pengembangan UMKM	Rp	385.133.100
74.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	199.999.900
75.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	379.000.299
76.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	670.123.600
77.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	1.268.554.904
78.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	3.230.144.064
79.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp	46.086.344.676
80.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	2.750.161.965
81.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	479.702.152
82.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	734.387.919
83.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	10.236.632.730
84.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	2.413.457.185
85.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	312.000.160
86.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	4.348.828.623
87.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	1.410.973.425
88.	Program Pengelolaan Arsip	Rp	762.772.658
89.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp	1.088.108.927
90.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	13.947.475.664
91.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	4.981.635.578
92.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp	374.082.400
93.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	1.613.318.265

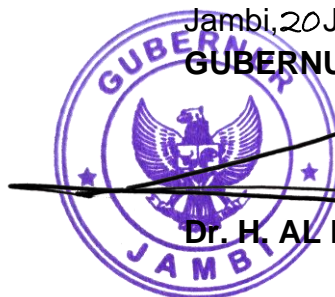
Program		Anggaran	
94.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	3.808.733.372
95.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	2.634.832.281
96.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp	413.981.084
97.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	90.140.480
98.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	41.774.819.974
99.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	26.146.118.545
100.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	1.235.300.000
101.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	10.818.787.021
102.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	650.000.000
103.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	7.156.613.874
104.	Program Pengelolaan Hutan	Rp	12.893.868.741
105.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rp	1.213.327.949
106.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp	4.260.237.122
107.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp	90.730.800
108.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp	170.191.800
109.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp	2.407.112.775
110.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp	8.166.928.623
111.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	60.894.400
112.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	913.287.650
113.	Program Pengembangan Ekspor	Rp	217.000.000
114.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	2.534.952.683
115.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	1.622.839.968

Program			Anggaran
116.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	3.231.908.059
117.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp	87.359.800
118.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	66.640.640
119.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp	68.397.152
120.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	46.989.690
121.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp	281.899.556
122.	Program Penataan Organisasi	Rp	945.619.800
123.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp	2.401.560.711
124.	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp	111.182.041.262
125.	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Rp	1.810.253.940
126.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	1.459.603.550
127.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp	2.560.666.141
128.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp	1.437.506.742
129.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	63.311.208.909
130.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	6.259.608.154
131.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	4.717.782.841
132.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	1.517.360.337.821
133.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	3.525.310.737
134.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	15.392.284.011
135.	Program Kepegawaian Daerah	Rp	3.620.907.823
136.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	4.891.603.648
137.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	1.358.513.592
138.	Program Pelayanan Penghubung	Rp	1.329.556.142
139.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	15.376.491.595

Program			Anggaran	
140.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	2.988.019.680	
141.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	11.146.495.402	
142.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	5.638.291.340	
143.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	1.853.703.906	
144.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	519.558.140	
145.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	2.432.559.000	

Jambi, 20 Januari 2023

GUBERNUR JAMBI,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1
Telanaipura Jambi**